

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Maret 2018

Menuju pertumbuhan inklusif



Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Menuju pertumbuhan inklusif

Maret 2018



Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic dan Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop dan Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al-Rikabi, Dhruv Sharma, Ibnu Edy Wiyono dan Pui Shen Yoong. Dukungan administrasi diberikan oleh Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara atas bimbingan Lestari Boediono Qureshi.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Indira Maulani Hapsari Indira Maulani Hapsari (Bagian A.1 dan Kotak A.1), Dhruv Sharma (Bagian A.3, A.5 dan A.6), Alief Aulia Rezza (Bagian A.2 dan A.3), Agnesia Adhissa dan Massimiliano Cali (Kotak A.2), Dwi Endah Abriningrum dan Yus Medina dibantu oleh Jaffar Al-Rikabi dan Pui Shen Yoong (Bagian A.4), Jonathan William Lain (Bagian A.7), Taufik Ramadhan Indrakesuma (Bagian A.8), Derek H.C. Chen (Bagian A.9); Ahya Ihsan, Jaffar Al-Rikabi, Pui Shen Yoong dibantu oleh Dwi Endah Abriningrum dan Yus Medina (Bagian B), Jaffar Al-Rikabi (Kotak B.1 dan B.2), Hidayat Amir dan Ardi Sugiyarto (BKF) (Kotak B.3); Abigail, Hamidah Alatas, Noviandri Nurlaili Khairina, dan Bagus Arya Wirapati (Lampiran). Untuk bagian B, kami mengucapkan terimakasih atas kontribusi Hidayat Amir dan Ardi Sugiyarto (BKF), Sailesh Tiwari, Francis A. Darko, Jonathan William Lain, Imam Setiawan dari Bank Dunia, *Poverty Global Practice*, dan juga rekan-rekan dari *the Governance and Education Global Practices*. Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Ekaterina T. Vashakmadze (*Senior Economist*, DECPG, Bank Dunia), Ha Nguyen (*Economist*, DECMG, Bank Dunia), Andy D. Mason (*Lead Economist*, EAPCE, Bank Dunia), Caterina Ruggero Laderchi (*Senior Economist*, GPV03, Bank Dunia), dan David Nellor (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi snjotomihardjo@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org.

Singkatan

AEOI	Automatic Exchange of Financial Account Information
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	Bank Indonesia
BEPs	Base Erosion and Profit Shifting
BLUs	Badan Layanan Umum
BOP	Balance of Payments
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CEQ	Commitment to Equity
COTS	Commercial off-the-Shelf
CPI	Consumer Price Index
CPO	Crude Palm Oil
CRM	Compliance Risk-Management
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DGT	Directorate General of Taxation
DID	Dana Insentif Daerah
ECED	Early Childhood Education and Development
EMCI	Emerging Market Currency Index
EMDE	Emerging Market and Developing Economies
ERM	Enterprise Risk-Management
ESDM	Ministry of Energy and Mineral Resources
FDI	Foreign Direct Investment
GDP	Gross Domestic Product
IEA	International Energy Agency
IMF	International Monetary Fund
IETU	El Impuesto Empresarial a Tasa Única (a flat rate business tax)
JCI	Jakarta Composite Index
JKN-PBI	Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran
LFPR	Labor Force Participation Rate
LGST	Luxury Goods Sales Tax
LHS	Left Hand Side
LNG	Liquefied Natural Gas
MIC	Middle Income Countries
MoF	Ministry of Finance
MSME	Micro Small and Medium Enterprises
NPL	Non-Performing Loans
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
O&G	Oil and gas
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PIP	Program Indonesia Pintar
PISA	Programme for International Student Assessment
PKH	Program Keluarga Harapan
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Purchasing Managers Index

PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rastra	Beras Sejahtera
R&D	Research and Development
RHS	Right Hand Side
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SOE	State Owned Enterprises (BUMN)
S&P	Standard and Poor's
STR	Student Teacher Ratio
SUN	Surat Utang Negara
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA	Technical Assistance
TAP	Tax Amnesty Program
ToT	Terms of Trade
VAT	Value-Added Tax

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	C
SINGKATAN	D
DAFTAR ISI.....	F
RINGKASAN EKSEKUTIF: MENUJU PERTUMBUHAN INKLUSIF	I
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....	1
1. Permintaan domestik mendorong pertumbuhan di Triwulan ke-4	1
2. Harga komoditas yang lebih tinggi mendukung permintaan dalam negeri.....	8
3. Defisit neraca transaksi berjalan melebar.....	10
4. Posisi fiskal membaik pada tahun 2017, dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan defisit yang rendah.....	16
5. Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan tetap rendah.....	20
6. Kondisi keuangan makro stabil, dengan pertumbuhan kredit yang masih lamban	22
7. Tingkat pekerjaan terus meningkat, tetapi pertumbuhan penghasilan telah menurun tajam	24
8. Penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi dalam empat tahun terakhir	27
9. Perkiraan perekonomian dan risiko	29
B. MEMUNGUT LEBIH BANYAK DAN MEMBELANJAKAN LEBIH BAIK UNTUK PERTUMBUHAN INKLUSIF	38
1. Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak dan membelanjakan dengan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif.....	39
2. Kebijakan fiskal telah mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, tetapi ketimpangan tetap tinggi	41
3. Efektivitas yang terbatas dan rendahnya tingkat belanja di sektor-sektor prioritas menghambat pertumbuhan dan pemerataan	44
4. Kualitas belanja telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemajuan lebih lanjut masih mungkin terjadi	49
a. Indonesia telah meningkatkan kualitas belanja melalui realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas	49
b. ...tetapi belanja yang lebih baik tetap menjadi tantangan di banyak bidang	52
5. Indonesia harus memacu lebih banyak penerimaan agar dapat berbelanja lebih banyak lagi... ..	55
a. Indonesia memungut terlalu sedikit penerimaan, serta seringkali tidak efektif	55
b. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan pemungutan pajak... ..	58
c. ... tetapi kebutuhan terhadap dan ruang lingkup untuk reformasi pajak tambahan tetaplah besar	60
6. Bagaimana Indonesia dapat memungut lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif?.....	67
REFERENSI.....	70
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1: Pertumbuhan investasi yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan PDB di Triwulan ke-4.....	2
Gambar A.2: Pertumbuhan tahun 2017 mencapai yang tertinggi dalam empat tahun terakhir	2
Gambar A.3: Pertumbuhan perdagangan global dan pertumbuhan produksi industri pada tahun 2017 mencapai nilai yang tertinggi selama enam tahun terakhir	2
Gambar A.4: Indeks Pembelian Manajer Komposit Global mencatat hasil yang tinggi selama hampir tujuh tahun	2
Gambar A.5: Investasi mesin dan peralatan terus mendorong pembentukan modal tetap	3
Gambar A.6: Produksi Industri dan Indeks Pembelian Manajer Manufaktur melemah.....	3
Gambar A.7: Pertumbuhan penjualan kendaraan niaga menurun dan pertumbuhan kredit investasi terus menurun.....	5
Gambar A.8: Hanya sepertiga dari investasi yang dibiayai melalui investasi asing langsung (FDI) dan kredit perbankan	5
Gambar A.9: Konsumsi pemerintah terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan nominal belanja barang.....	6
Gambar A.10: Di sisi produksi, pertumbuhan di Triwulan ke-4 didorong oleh ekspansi di sektor konstruksi dan jasa	7
Gambar A.11: Pertumbuhan untuk tahun 2017 secara keseluruhan didorong oleh ekspansi sektor sekunder.....	7
Gambar A.12: Harga komoditas global pulih kembali di tahun 2017	8
Gambar A.13: Harga global untuk sebagian besar dari enam komoditas ekspor utama Indonesia telah meningkat di Triwulan ke-4.	9
Gambar A.14: Harga Batubara, Minyak Mentah dan Logam Dasar terus menguat di bulan Januari dan Februari 2018, naik ke titik tertinggi dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir.....	9
Gambar A.15: Pertumbuhan ekspor komoditas utama Indonesia yang tinggi pada tahun 2017	10
Gambar A.16: Pertumbuhan ekspor melambat didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang lebih rendah	11
Gambar A.17: Pertumbuhan impor tetap kuat karena harga minyak yang meningkat lebih tinggi mendorong meningkatnya nilai impor bahan bakar	11
Gambar A.18: NPI terus mencatat surplus pada tahun 2017, didorong oleh arus investasi langsung dan investasi portofolio yang tinggi. Defisit neraca transaksi berjalan jatuh ke titik terendah dalam 6 tahun terakhir	14
Gambar A.19: Investor yang menjual saham Indonesia pada tahun 2017.....	14
Gambar A.20: Arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) adalah yang tertinggi dalam sejarah	15
Gambar A.21: Rupiah mencatat tren yang berbeda dari mata uang negara-negara berkembang lainnya dan mencatatkan depresiasi yang tidak terlalu besar.....	16
Gambar A.22: Secara riil, Rupiah terdepresiasi lebih dari kebanyakan mata uang regional lainnya.....	16
Gambar A.23: Rasio Pajak terhadap PDB tidak termasuk penerimaan pajak dari program Amnesti Pajak yang meningkat di tahun 2017.....	17
Gambar A.24: Penerimaan terkait PPN dan Migas mendorong penerimaan yang tinggi di tahun 2017	17
Gambar A.25: Belanja modal dan belanja sosial yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan belanja secara keseluruhan di tahun 2017.....	18
Gambar A.26: Pencairan secara keseluruhan meningkat, terutama untuk belanja modal dan belanja sosial... ..	18

Gambar A.27: Realisasi Januari-Februari 2018 mencerminkan peningkatan belanja sosial yang tinggi	19
Gambar A.28: Rasio Utang terhadap PDB sedikit meningkat pada tahun 2017, tetapi tetap jauh di bawah ambang batas menurut undang-undang	19
Gambar A.29: Jumlah pinjaman bruto pada tahun 2017 adalah sebesar dua kali lipat dari besarnya defisit fiskal.....	19
Gambar A.30: Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan yang menurun.....	20
Gambar A.31: Harga produsen juga melemah di Triwulan ke-4	21
Gambar A.32: Selisih (spread) antara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan imbal hasil obligasi pemerintah AS telah menyempit secara signifikan	22
Gambar A.33: Siklus pelonggaran kebijakan moneter dihentikan di Triwulan ke-4.....	23
Gambar A.34: Kebijakan moneter tampaknya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan investasi.....	23
Gambar A.35: Rasio Kredit Macet (NPL) sudah mulai menurun oleh karena adanya konsolidasi neraca oleh bank pada tahun 2017.....	23
Gambar A.36: Pertumbuhan lapangan kerja melambat, tetapi terjadi pergeseran dari pekerjaan keluarga yang tidak dibayar dan wirausaha pertanian ke arah pekerjaan berupah dan pekerjaan mandiri non-pertanian	24
Gambar A.37: Pengangguran secara luas terus menurun, tetapi tingkat pengangguran inti sedikit meningkat	24
Gambar A.38: Para pekerja beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri.....	26
Gambar A.39: Pertumbuhan penghasilan riil rata-rata untuk pekerja upahan menurun tajam pada tahun 2017 hingga bulan Agustus	26
Gambar A.40: Angka kemiskinan di bulan September 2017 mengalami penurunan terbesar sejak bulan Maret 2013.....	27
Gambar A.41: Kemiskinan secara perlahan-lahan bergeser ke perkotaan dalam 15 tahun terakhir	29
Gambar A.42: Ketidakstabilan harga pangan yang sudah diantisipasi diperkirakan belum mempengaruhi perkiraan perekonomian	32
Gambar A.43: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih – historis dan perkiraan hingga tahun 2020	34
Gambar A.44: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan melemah.....	34
Gambar A.45: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,3 persen dari PDB pada tahun 2018	35
Gambar B.1: Untuk membelanjakan lebih banyak dan dengan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif, Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak	41
Gambar B.2: Kebijakan fiskal yang berhati-hati mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.....	42
Gambar B.3:...tetapi pertumbuhan belum terlalu inklusif.....	42
Gambar B.4: Keputusan tentang belanja Pemerintah dan pemungutan penerimaan secara substansial mengurangi ketimpangan di negara-negara berkembang lainnya	43
Gambar B.5: Koefisien Gini sebelum diberlakukannya kebijakan fiskal di Indonesia tidak jauh berbeda dari negara-negara OECD, tetapi kebijakan fiskal memiliki dampak redistributif yang lebih besar di negara-negara OECD.....	43
Gambar B.6: Indonesia adalah salah satu negara yang membelanjakan paling sedikit untuk sektor kesehatan di dunia... ..	44
Gambar B.7:... dan juga kurang membelanjakan di sektor bantuan sosial dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya	44

Gambar B.8: Hingga saat ini, sekitar seperlima dari anggaran dibelanjakan untuk subsidi energi yang regresif.....	45
Gambar B.9:... daripada untuk bantuan langsung tunai yang progresif untuk bantuan sosial	45
Gambar B.10: Tingkat belanja pemerintah di Indonesia relatif rendah	46
Gambar B.11:... terutama karena rasio penerimaan terhadap PDB yang rendah	46
Gambar B.12: Meskipun tingkat belanja tinggi untuk pendidikan, kinerja siswa melalui tes PISA belum meningkat secara signifikan	47
Gambar B.13: Anak-anak miskin masih jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah menengah dan universitas... ..	47
Gambar B.14: Stunting (kekerdilan, gangguan pertumbuhan pada anak) memiliki dampak lebih besar pada anak-anak yang lebih miskin	48
Gambar B.15: Kebijakan Fiskal menurunkan ketimpangan sedikit lebih banyak di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012... ..	50
Gambar B.16:... dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012.....	50
Gambar B.17: Pengeluaran untuk subsidi energi yang regresif telah dialihkan ke infrastruktur... ..	51
Gambar B.18: ... dan pembelanjaan untuk PKH telah menjadi lebih berpihak kepada masyarakat miskin	51
Gambar B.19: Indonesia harus membelanjakan lebih banyak lagi untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial	53
Gambar B.20:... dan menciptakan ruang fiskal untuk melaksanakannya dengan mengurangi subsidi lebih banyak lagi	53
Gambar B.21: Penerimaan pajak telah menurun sejak tahun 2013, namun tanda-tanda pemulihan muncul di tahun 2017.....	55
Gambar B.22: Basis pajak Indonesia terlalu sempit	55
Gambar B.23: Ambang batas pendaftaran PPN Indonesia sebagai rasio dari PDB per kapita riil adalah yang tertinggi di dunia	57
Gambar B.24: Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara lainnya dalam hal kemudahan membayar pajak pada Indikator Kemudahan Melakukan Usaha tahun 2018	58
Gambar B.25: Reformasi harus meningkatkan kecukupan penerimaan, efisiensi, kesetaraan, kesederhanaan dan transparansi pajak.....	62
Gambar B.26: Pajak tembakau Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang dan banyak negara maju.....	65

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil	74
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB sector produksi	74
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB sector produksi	74
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor	74
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen	74
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI	74
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran.....	75
Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan.....	75
Lampiran Gambar 9: Neraca pembayaran.....	75
Lampiran Gambar 10: Komponen neraca berjalan	75
Lampiran Gambar 11: Ekspor barang	75
Lampiran Gambar 12: Impor barang	75
Lampiran Gambar 13: Cadangan devisa dan arus modal	76

Lampiran Gambar 14: Inflasi.....	76
Lampiran Gambar 15: Rincian IHK bulanan.....	76
Lampiran Gambar 16: Perbandingan inflasi beberapa negara.....	76
Lampiran Gambar 17: Harga beras domestik dan internasional.....	76
Lampiran Gambar 18: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	76
Lampiran Gambar 19: Indeks saham regional.....	77
Lampiran Gambar 20: Nilai tukar dollar AS.....	77
Lampiran Gambar 21: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal ..	77
Lampiran Gambar 22: Selisih imbal obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global.....	77
Lampiran Gambar 23: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan (rural) dan simpanan.....	77
Lampiran Gambar 24: Indikator sektor perbankan.....	77
Lampiran Gambar 25: Utang pemerintah.....	78
Lampiran Gambar 26: Utang luar negeri.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018.....	iii
Tabel A.1: Perubahan harga komoditas.....	8
Tabel A.2: Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).....	13
Tabel A.3: Peningkatan kecil dari pangsa konsumsi dari masyarakat yang berada di 40% Terbawah dan 40% di Tengah menyebabkan sedikit penurunan dalam koefisien Gini	29
Tabel A.4: Indikator perekonomian utama.....	30
Tabel A.5: Harga rata-rata komoditas untuk tahun 2016, 2017 dan perkiraan untuk tahun 2018, 2019.....	34
Tabel A.6: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di dalam APBN tahun 2018.....	37
Tabel B.1: Pengalaman reformasi pajak internasional belum lama ini.....	64
Tabel B.2: Tingkat konsumsi rokok Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia....	65

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah.....	78
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	78
Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia.....	79
Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia.....	80

DAFTAR KOTAK

Kotak A.1: Perekonomian global mengakhiri tahun 2017 dengan catatan yang kuat.....	2
Kotak A.2: Perubahan terbaru dalam kebijakan perdagangan.....	31
Kotak B.1: Mengapa rasio pajak terhadap PDB Indonesia sangat rendah?.....	57
Kotak B.2: Prinsip-prinsip pedoman untuk reformasi pajak Indonesia.....	62
Kotak B.3: Pengenaan cukai untuk mengatasi eksternalitas.....	65

Rinkasan eksekutif: Menuju pertumbuhan inklusif



Pertumbuhan PDB riil Indonesia meningkat di Triwulan ke-4, yang disebabkan oleh investasi yang lebih kuat

Pertumbuhan PDB riil meningkat menjadi 5,2 persen tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*) di Triwulan ke-4 dari 5,1 persen pada Triwulan ke-3, didorong oleh permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, khususnya investasi yang menguat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga sedikit menguat, sebagian karena pelemahan harga barang-barang konsumen di Triwulan ke-4. Pertumbuhan ekspor dan impor menurun dari puncaknya di Triwulan ke-3 dan tetap kuat karena adanya pemulihan yang berkelanjutan dalam perdagangan global dan harga-harga komoditas. Namun demikian, ekspor neto menjadi hambatan pada pertumbuhan di Triwulan ke-4, sebagian mencerminkan investasi yang lebih tinggi dalam hal mesin dan peralatan serta impor barang modal yang terkait. Setelah terjadinya penurunan persediaan (*destocking*) yang cukup besar di Triwulan ke-3, persediaan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB. Di sisi produksi, pertumbuhan sektor manufaktur meningkat, sementara sektor konstruksi dan sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang tercepat.

Kondisi global yang menguntungkan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB yang lebih tinggi di tahun 2017

Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, pertumbuhan PDB naik menjadi 5,1 persen dari 5,0 persen pada tahun 2016, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Peningkatan yang lebih tinggi ini sebagian disebabkan oleh investasi yang lebih tinggi dan ekspor neto, sejalan dengan berlanjutnya pemulihan harga komoditas, pertumbuhan global dan arus perdagangan yang tinggi, dan kondisi pembiayaan global yang relatif masih mendukung.

Mengkuatnya harga komoditas merupakan pendorong utama dalam investasi dan

Harga komoditas yang lebih tinggi berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi dan ekspor di Triwulan ke-4. Meskipun pertumbuhan kredit melambat, pertumbuhan investasi meningkat ke level tertinggi selama 5 tahun sebesar 7,3 persen di Triwulan ke-4 dari 7,1 persen di Triwulan ke-3, disebabkan oleh adanya lonjakan dalam investasi mesin dan peralatan impor, kategori yang mencakup alat-alat berat (*yellow goods*)

ekspor di Triwulan ke-4

pertambangan¹. Sebagai akibatnya, pertumbuhan nominal impor barang modal di Triwulan ke-4 tetap sebesar dua digit. Meskipun melambat dari Triwulan ke-3, pertumbuhan ekspor dari enam komoditas utama tetap pada rata-rata yang tinggi sebesar 22,4 persen di Triwulan ke-4.

Defisit neraca transaksi berjalan melebar di Triwulan ke-4, tetapi posisi eksternal secara keseluruhan tetap kuat

Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 2,2 persen dari PDB di Triwulan ke-4, dari 1,7 persen PDB di kuartal ketiga, terutama didorong oleh surplus perdagangan barang yang lebih rendah karena impor barang modal yang lebih tinggi untuk investasi mengimbangi harga ekspor yang lebih tinggi. Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, peningkatan nilai tukar perdagangan dan pulihnya perdagangan global membantu defisit neraca transaksi berjalan mengecil menjadi 1,7 persen dari PDB, yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Sementara itu, surplus neraca modal dan neraca keuangan menyusut pada tahun 2017. Hal ini terjadi, meskipun arus masuk modal kotor melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016, berkat kepercayaan investor yang meningkat karena peningkatan peringkat kredit dan efek tahun dasar yang rendah. Akibatnya, imbal hasil obligasi menurun di semua tenor. Penanaman modal asing langsung juga meningkat ke level tertinggi selama tujuh tahun ini di tahun 2017. Neraca pembayaran (*external account*) yang sehat berkontribusi terhadap stabilitas nilai Rupiah pada tahun 2017, meskipun berlanjutnya peningkatan impor di Triwulan ke-4 dan awal tahun ini telah menyebabkan pelemahan dalam beberapa bulan terakhir.

Inflasi menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan turun ke tingkat terendah dalam 14 tahun terakhir

Meskipun harga komoditas lebih tinggi, inflasi harga konsumen utama menurun menjadi rata-rata 3,5 persen *joy* di Triwulan ke-4 tahun 2017 dari 3,8 persen di Triwulan ke-3, yang mendukung konsumsi rumah tangga. Inflasi harga makanan mencapai rata-rata triwulanan yang terendah dalam 14 tahun ini, meskipun meningkat sejak bulan Desember. Inflasi inti di Triwulan ke-4 tetap tidak berubah dari Triwulan ke-3, rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan, mencerminkan tekanan inflasi yang stabil karena perekonomian dalam kondisi mendekati *full employment*. Secara tahunan, inflasi umum (*headline inflation*) adalah sebesar 3,8 persen, lebih tinggi dari 3,5 persen di tahun 2016, terutama karena kenaikan harga barang-barang yang diatur pemerintah (*administered prices*) di semester pertama tahun ini. Tekanan inflasi yang menurun ini mendukung pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2017, termasuk dua kali pemotongan sebesar 25 *basis point* (bps) secara berturut-turut di Triwulan ke-3. Oleh karena inflasi stabil dan volatilitas global meningkat, BI mempertahankan suku bunga tetap pada tingkat 4,25 persen sejak bulan September 2017.

Investasi publik juga mendukung pertumbuhan, tetapi kebijakan fiskal dibatasi karena defisit menyempit di tahun 2017

Total belanja pemerintah pada tahun 2017 tumbuh dengan laju tercepat dalam 3 tahun ini, didukung oleh belanja modal, belanja barang, dan belanja sosial yang lebih tinggi. Secara khusus, belanja modal mencapai tingkat pencairan sebesar 96,9 persen, dan tumbuh sebesar 18 persen pada tahun 2017, tertinggi dalam 8 tahun ini. Sementara total penerimaan pajak sebagai bagian dari PDB turun menjadi kurang dari 10 persen pada tahun 2017, jika pungutan dikecualikan dari satu kali program Amnesti Pajak sebenarnya bisa menunjukkan peningkatan rasio pajak dibandingkan dengan tahun 2016, yang mencerminkan upaya reformasi pajak yang sedang berlangsung. Harga komoditas yang lebih tinggi membantu pertumbuhan penerimaan yang mencapai nilai tertinggi dalam enam tahun terakhir dan mempertahankan defisit fiskal sebesar 2,4 persen dari PDB di tahun 2017, yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

¹ *Yellow goods* adalah peralatan atau mesin yang digunakan untuk konstruksi, peralatan pembukaan lahan dan galian (quarry). Contohnya termasuk traktor, ekskavator, dan *fork lift*.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat telah dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi

Tingkat kemiskinan resmi – dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia – mencapai 10,1 persen di bulan September 2017, 0,6 poin persentase lebih rendah dari pada bulan September 2016, penurunan *yoY* terbesar sejak bulan Maret 2013. Sementara pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan riil melambat antara bulan Agustus 2016 dan bulan Agustus 2017, penciptaan lapangan kerja condong ke arah pekerjaan formal di sektor manufaktur. Sektor manufaktur menciptakan 1,5 juta pekerjaan pada tahun 2017, menyerap banyak pekerja dari sektor pertanian, yang mengalami penurunan tajam dalam pangsa pekerjaannya.

Perkiraan perekonomian tetap positif yang didasarkan pada berlanjutnya peningkatan permintaan dalam negeri

Perkiraan perekonomian tetap positif dengan pertumbuhan PDB diproyeksikan mencapai rata-rata sebesar 5,3 persen pada periode 2018-2020 (Tabel 1). Meskipun angin baik dari kondisi harga komoditas yang sedang naik diperkirakan mereda dan yang akhirnya beralih menjadi penghambat, momentum dalam pertumbuhan investasi yang padat impor ini diperkirakan akan berlanjut dalam waktu dekat ini.

Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018

		2017	2018p
PDB riil	(Perubahan persen tahunan)	5,1	5,3
Indeks harga konsumen	(Perubahan persen tahunan)	3,8	3,5
Neraca transaksi berjalan	(Persen PDB)	-1,7	-1,9
Keseimbangan fiskal	(Persen PDB)	-2,4	-2,3

Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: 2017 adalah angka aktual; p singkatan dari perkiraan Bank Dunia

Mengingat permintaan dalam negeri yang tinggi, kontribusi dari ekspor bersih diperkirakan akan teredam seiring dengan menurunnya nilai tukar perdagangan dan pertumbuhan impor. Impor juga akan terbantu oleh perampangan proses impor yang berkelanjutan.

Inflasi yang rendah, pengeluaran menjelang pemilu mendatang dan harga komoditas yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan konsumsi

Secara empiris, tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah telah diketahui menjadi penggerak struktural pertumbuhan konsumsi, dengan efek yang kadang-kadang meningkat setelah beberapa triwulan. Inflasi yang rendah saat ini tetapi dengan nilai tukar yang melemah, oleh karenanya memiliki efek yang berlawanan, yang secara keseluruhan menciptakan efek yang ambigu/tidak pasti pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga ke depan. Namun demikian, pengeluaran dalam pemilu mendatang dan harga komoditas yang lebih baik diperkirakan akan memberikan dorongan independen, yang mengakibatkan adanya peningkatan yang sedang dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama dua tahun ke depan.

Defisit fiskal diperkirakan akan menyempit sementara defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar

Inflasi umum diperkirakan akan meningkat mulai tahun 2019 sebagian karena biaya impor yang lebih tinggi terkait dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi. Keseimbangan fiskal diperkirakan akan menyempit sedikit di atas cakupan perkiraan, sejalan dengan defisit yang lebih kecil seperti yang ditetapkan dalam APBN 2018, harga minyak yang tinggi, dan reformasi peningkatan penerimaan penting yang sedang dilaksanakan, meningkatkan total penerimaan. Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar dalam jangka menengah, sejalan dengan permintaan dalam negeri yang lebih kuat dan nilai tukar perdagangan yang lebih lemah.

Risiko terhadap perkiraan perekonomian antara lain melambatnya perdagangan global, volatilitas dan melambatnya konsumsi rumah tangga

Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi condong ke sisi negatifnya. Di sisi eksternal, dengan meningkatnya proteksionisme global, ada risiko bahwa pemulihan yang mulai terjadi dalam perdagangan internasional dapat terhenti, membebani pertumbuhan global dan harga-harga komoditas. Meskipun normalisasi kebijakan moneter AS sedang berlangsung secara proporsional, pengetatan moneter yang tidak terduga dapat menyebabkan arus keluar modal secara mendadak dari negara-negara pasar berkembang. Sementara konsumsi rumah tangga menguat di Triwulan ke-4, tetap ada risiko bahwa konsumsi rumah tangga akan tetap saja atau bahkan melemah dalam jangka menengah. Mengingat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan lebih dari separuh PDB, setiap perlambatan dalam konsumsi pribadi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap total pengeluaran.

Edisi kali ini mencakup topik fokus yang membahas pentingnya kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan bagaimana Indonesia dapat menggunakan perangkat fiskal dengan lebih baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan, mendorong inklusi dan menurunkan ketimpangan.

Untuk mencapai pertumbuhan inklusif, Indonesia harus belanja dengan lebih baik lagi dan membelanjakan lebih banyak di bidang-bidang prioritas, dan untuk mengumpulkan penerimaan yang lebih banyak lagi dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan

Keputusan mengenai belanja pemerintah dan pemungutan penerimaan – inti dari kebijakan fiskal – memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan membantu membagi manfaat pertumbuhan secara lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang efektif yang mendorong pertumbuhan inklusif, seperti berinvestasi dalam modal manusia atau meningkatkan konektivitas daerah-daerah terpencil, keduanya menurunkan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. Pengalaman Indonesia selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, kebijakan fiskal masih kurang berhasil dalam membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas: kesenjangan peluang masih besar, dan perkiraan menunjukkan bahwa pajak dan belanja publik hanya menurunkan koefisien Gini Indonesia sebesar 0,04 poin, dibandingkan dengan 0,18 poin di Afrika Selatan. Di masa lalu, dampak dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran pada pertumbuhan inklusif telah diredam oleh kurangnya pengeluaran di bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, dan oleh pengeluaran yang tidak efektif di bidang-bidang prioritas tersebut dan di bidang-bidang penting lainnya, terutama pendidikan. Belanja di bidang-bidang prioritas baru-baru ini meningkat karena adanya realokasi belanja dari subsidi energi; namun demikian, realisasi penerimaan yang rendah terus menghambat peningkatan belanja sektor prioritas. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih inklusif, Indonesia harus melakukan belanja dengan lebih baik lagi dan membelanjakan lebih banyak di bidang-bidang prioritas. Hal ini akan membutuhkan upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja kementerian dan lembaga (KL) dan belanja daerah, melakukan realokasi lebih lanjut pengeluaran lintas sektoral dan di dalam sektor, dan mengumpulkan lebih banyak lagi penerimaan dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan. Reformasi pajak yang terkait termasuk memperluas basis pajak, menyederhanakan peraturan pajak, dan secara signifikan memperkuat manajemen kepatuhan.

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



1. Permintaan domestik mendorong pertumbuhan di Triwulan ke-4

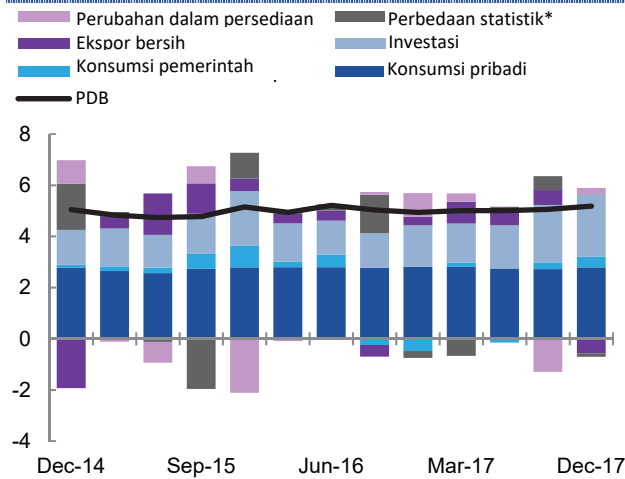
Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen yoy di Triwulan ke-4, tertinggi dalam enam triwulan terakhir

Perekonomian Indonesia meningkat 5.2 persen tahun ke tahun (yoy) di Triwulan ke-4, pertumbuhan tertinggi dalam enam triwulan. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan konsensus untuk Triwulan ke-4 dan pertumbuhan di Triwulan ke-3, keduanya sebesar 5,1 persen. Kenaikan pertumbuhan PDB didorong oleh permintaan domestik, khususnya investasi yang lebih kuat (Gambar A.1). Pertumbuhan ekspor dan impor keduanya melambat di Triwulan ke-4, tetapi tetap tinggi, didukung oleh pemulihan yang berkelanjutan dalam perdagangan global dan harga komoditas. Namun demikian, ekspor bersih menurun pada pertumbuhan di Triwulan ke-4, karena impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor, sebagian mencerminkan investasi yang lebih tinggi dalam permesinan dan peralatan. Perubahan dalam persediaan, yang berkontribusi negatif sebesar 1,3 poin persentase (pp) dari pertumbuhan PDB di Triwulan ke-3, mengalami peningkatan di Triwulan ke-4, berkontribusi sebesar 0,2 pp terhadap pertumbuhan PDB. Di sisi produksi, di antara 9 sektor produksi, sektor manufaktur terus memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu sebesar 1,0 pp di Triwulan ke-4, sedangkan sektor konstruksi dan sektor jasa lainnya (administrasi publik, pertahanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan sosial dan lainnya) mengalami pertumbuhan yang terbesar.

Pertumbuhan PDB riil meningkat menjadi 5,1 persen pada 2017, tertinggi dalam empat tahun terakhir, sebagian karena memulihnya perekonomian global

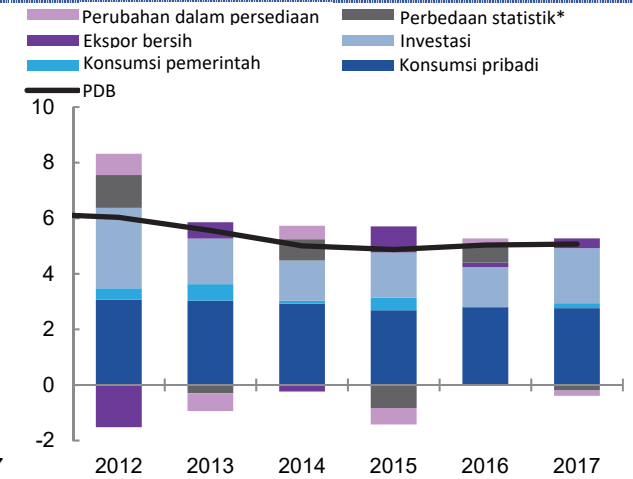
Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, dan sejalan dengan perkiraan Bank Dunia, pertumbuhan PDB riil tahunan meningkat menjadi 5,1 persen dari 5,0 persen pada tahun 2016, tertinggi dalam empat tahun terakhir (Gambar A.2). Peningkatan dalam pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi dan ekspor bersih yang lebih tinggi, karena pemulihan harga komoditas global dan perekonomian global serta arus perdagangan internasional yang lebih baik (Kotak A.1).

Gambar A.1: Pertumbuhan investasi yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan PDB di Triwulan ke-4
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.2: Pertumbuhan tahun 2017 mencapai yang tertinggi dalam empat tahun terakhir
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Kotak A.1: Perekonomian global mengakhiri tahun 2017 dengan catatan yang kuat

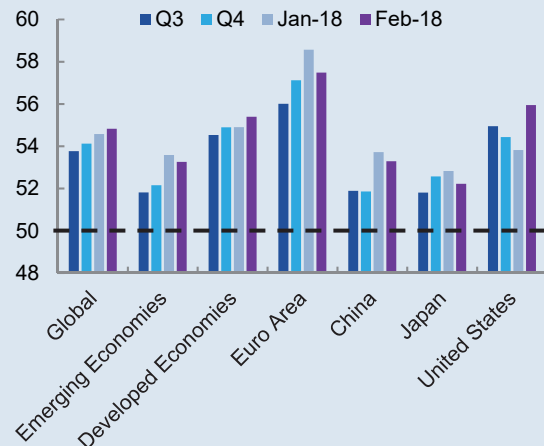
Pemulihan ekonomi global terus berlanjut dan merata hampir diseluruh negara. Pertumbuhan ekonomi global tetap baik di Triwulan ke-4 dan di sepanjang tahun 2017. Hal ini didukung oleh tingkat perdagangan dan investasi global yang tinggi¹, kepercayaan dunia usaha yang meningkat, dan kondisi moneter global yang relatif mendukung². Penguatan berkelanjutan harga komoditas global, khususnya harga komoditas energi, juga mendorong pertumbuhan komoditas ekspor negara berkembang. Peningkatan perekonomian global yang terus berlanjut ini telah mendukung perekonomian Indonesia.

Gambar A.3: Pertumbuhan perdagangan global dan pertumbuhan produksi industri pada tahun 2017 mencapai nilai yang tertinggi selama enam tahun terakhir
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CBP World Trade Monitor, perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.4: Indeks Pembelian Manajer Komposit Global mencatat hasil yang tinggi selama hampir tujuh tahun
(indeks)



Sumber: Markit Economics, Haver Analytics; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data di atas 50 menggambarkan ekspansi ekonomi dan data di bawah 50 menggambarkan kontraksi ekonomi.

Aktivitas perekonomian global terus menguat sepanjang tahun 2017, dan indikator berfrekuensi tinggi menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di Triwulan ke-1 tahun 2018. Peningkatan yang stabil dalam pertumbuhan global telah terjadi secara meluas, yang berasal dari negara-negara maju maupun negara-negara pasar berkembang dan negara-

negara berkembang (*emerging markets and developing economies*, EMDEs)³. Pertumbuhan di negara-negara utama seperti Kawasan Eropa dan Amerika Serikat tetap kuat masing-masing sebesar 2,5 persen *yoy* dan 2,7 persen di Triwulan ke-4. Secara keseluruhan, pada tahun 2017, Amerika Serikat dan Kawasan Eropa mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 2,3 persen⁴ dan 2,5 persen (tertinggi 10 tahun)⁵. Sementara itu, pertumbuhan di Jepang meningkat menjadi 2,0 persen *yoy* di Triwulan ke-4, membuat pertumbuhan di tahun 2017 secara keseluruhan menjadi 1,7 persen, hampir dua kali lipat pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 0,9 persen⁶. Negara-negara pasar berkembang, seperti Brasil dan Tiongkok juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2017, masing-masing sebesar 1,0 persen⁷ dan 6,9 persen,⁸ yang tercepat sejak tahun 2015.

Perdagangan global juga mencatat pertumbuhan yang solid di tahun 2017 sebesar 4,7 persen, yang tertinggi sejak tahun 2011, meskipun terjadi sedikit perlambatan di Triwulan ke-4 menjadi 4,9 persen *yoy* dari 5,6 persen di Triwulan ke-3 tahun 2017⁹. Demikian pula, pertumbuhan produksi industri global melambat dari Triwulan ke-3 (Gambar A.3), tetapi masih membukukan pertumbuhan yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir di tahun 2017. Sentimen bisnis juga meningkat di Triwulan ke-4, ditandai oleh Indeks Manajer Pembelian (*Purchasing Managers' Index* - PMI) yang terbesar selama hampir tujuh tahun terakhir sebesar 54,1 di Triwulan ke-4¹⁰. Hal ini sebagian didukung oleh pertumbuhan yang tinggi dalam keluaran dan pesanan baru (Gambar A.4). Pada bulan Februari 2018, indeks komposit PMI global menguat lebih lanjut ke 54,8, yang disebabkan oleh peningkatan yang tinggi di Amerika Serikat, menyiratkan bahwa peningkatan global kemungkinan akan berlanjut hingga Triwulan ke-1 tahun 2018.

¹ Tingkat pertumbuhan keduanya naik ke level tertinggi dalam enam tahun terakhir. (CPB, 2017).

² Kondisi moneter global masih relatif akomodatif, terlepas dari adanya perkiraan kenaikan inflasi yang tinggi di negara-negara maju, yang akan menyebabkan pengetatan moneter lebih cepat dari yang diharapkan dalam waktu dekat.

³ *International Monetary Fund* (2018). Laporan *World Economic Outlook* juga mencatat sekitar 120 negara mengalami peningkatan pertumbuhan perekonomian mereka di tahun 2017, peningkatan pertumbuhan global yang paling meluas sejak tahun 2010.

⁴ Dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 1,5 persen *yoy*

⁵ Data pertumbuhan triwulanan diambil dari data PDB Triwulanan OECD, sementara data pertumbuhan tahunan diambil dari Eurostat dan Departemen Perdagangan AS melalui Haver Analytics.

⁶ Kantor Kabinet Jepang melalui Haver Analytics. Data diakses pada tanggal 22 Maret, 2018.

⁷ Konsensus Perkiraan. Brasil mencatat peningkatan yang tinggi dalam pertumbuhan pada tahun 2017 dibandingkan dengan kontraksi dalam ekonomi terjadi di tahun 2016, mencatat pertumbuhan -3,5 persen *yoy*.

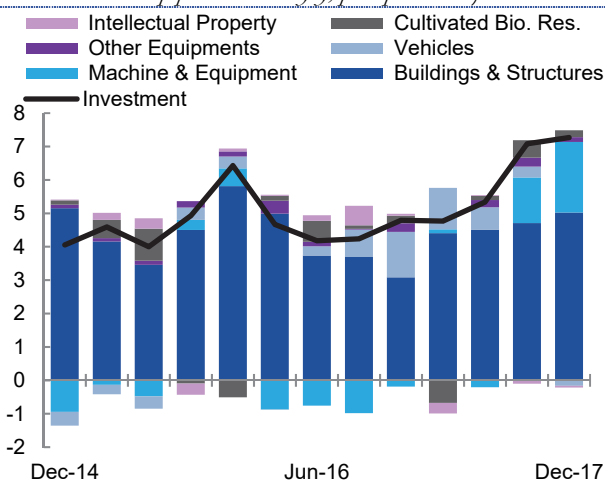
⁸ Siaran pers Badan Pusat Statistik Tiongkok.

⁹ CPB World Trade Monitor, Februari 2018 – hanya data saja hingga bulan November 2017.

¹⁰ Indeks Pembelian Manajer (PMI) berada di atas batas 50 menunjukkan adanya ekspansi.

Gambar A.5: Investasi mesin dan peralatan terus mendorong pembentukan modal tetap

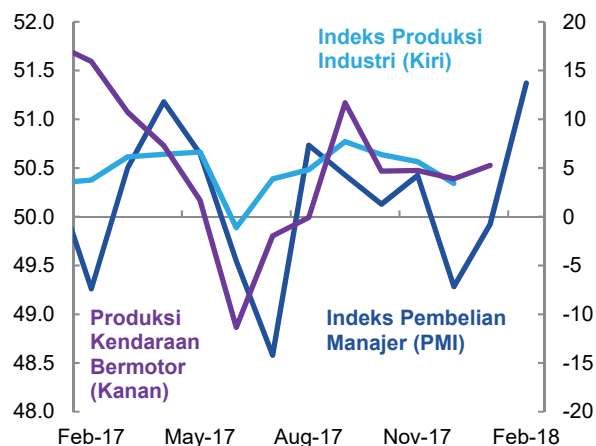
(kontribusi terhadap pertumbuhan *yoy*, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.6: Produksi Industri dan Indeks Pembelian Manajer Manufaktur melemah

(indeks, Seb. Kiri; pertumbuhan *yoy*/3mma *yoy*, persen, Seb. Kanan)



Sumber: Nikkei/Markit; BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pertumbuhan IPI dalam *yoy*; pertumbuhan produksi kendaraan bermotor dalam 3 bulan pergerakan rata-rata (*month moving average*, *mma*) *yoy*. PMI Manufaktur di atas 50 poin menunjukkan wilayah ekspansi.

Pertumbuhan investasi tetap terus meningkat dan mendukung pertumbuhan PDB di Triwulan ke-4

Pembentukan modal tetap bruto tetap menjadi komponen utama pendorong ekonomi, dengan pertumbuhan investasi meningkat dari 7,1 persen di Triwulan ke-3 menjadi 7,3 persen di Triwulan ke-4, yang tertinggi dalam hampir lima tahun ini (Gambar A.5). Investasi mesin dan peralatan mengalami pertumbuhan yang tercepat, naik dari 15,2 persen di Triwulan ke-3 menjadi 22,3 persen di Triwulan ke-4, sejalan dengan lonjakan impor modal nominal yang tetap sebesar dua digit² di Triwulan ke-4. Hal ini, pada gilirannya, sebagian didorong oleh investasi yang lebih tinggi di sektor pertambangan, mengingat harga komoditas global yang lebih tinggi. Investasi di sektor bangunan dan struktur tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan investasi secara keseluruhan di Triwulan ke-4, dibantu oleh ekspansi investasi publik. Nilai nominal belanja modal pemerintah meningkat sebesar 43,0 persen pada Triwulan ke-4, tetapi sebagian karena adanya dampak dasar (*base effect*) yang rendah di Triwulan ke-4 tahun lalu. Sementara itu, investasi di sektor kendaraan bermotor melambat, terutama karena dampak dasar (*base effect*) yang tinggi di Triwulan ke-4 tahun lalu dan konsisten dengan perlambatan signifikan dalam pertumbuhan penjualan kendaraan niaga (Gambar A.6). Juga berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi yang tinggi, investasi asing langsung mengalami pertumbuhan dua digit *yoy* di Triwulan ke-4, dengan arus masuk terbesar masuk ke sektor manufaktur.

Pertumbuhan investasi pada 2017 mencapai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir

Pertumbuhan investasi tahunan pada tahun 2017 naik ke level tertinggi dalam lima tahun terakhir, sebesar 6,2 persen, dari 4,5 persen di tahun 2016. Pemulihan harga komoditas secara bertahap, biaya pembiayaan yang tetap rendah, kepercayaan investor yang lebih tinggi karena adanya peningkatan peringkat kredit, dan lonjakan investasi infrastruktur dan investasi asing langsung, semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.

Namun demikian, indikator bulanan untuk investasi menunjukkan gambaran yang lemah

Sementara itu, serangkaian pemotongan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dengan total pengurangan sebesar 200 basis poin selama dua tahun terakhir, tidak meningkatkan pertumbuhan kredit ke sektor swasta, karena pertumbuhan kredit investasi terus menurun menjadi 4,9 persen pada Triwulan ke-4 dari 6,3 persen di Triwulan ke-3³ (Gambar A.7). Namun demikian, perlu dicatat bahwa baik investasi asing langsung (FDI) maupun kredit investasi dari bank secara historis hanya merupakan sepertiga dari total pembiayaan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar pembiayaan investasi berasal dari pinjaman non-bank seperti penyertaan modal, obligasi, dan laba ditahan (Gambar A.8).

Pertumbuhan konsumsi swasta tetap lambat ...

Pertumbuhan konsumsi swasta naik sedikit menjadi 5,0 persen *yoy* di Triwulan ke-4 dari revisi sebesar 4,9 persen di Triwulan ke-3⁴. Pertumbuhan konsumsi swasta tetap tidak berubah sejak Triwulan ke-1 tahun 2016, bertahan mendekati 5,0 persen. Ini lebih lambat dari rata-rata tahun 2012-14 sebesar 5,4 persen, tetapi hanya sedikit di bawah rata-rata 10 tahun terakhir, sebesar 5,1 persen. Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, konsumsi swasta meningkat sebesar 5,0 persen, tidak berubah sejak tahun 2016.

² Nilai nominal pertumbuhan impor barang modal melambat tetapi masih mencatat pertumbuhan sebesar 19,6 persen *yoy* pada Triwulan ke-4. Beberapa komponen yang mencatat perlambatan adalah mesin pengolah data otomatis, kendaraan bermotor niaga untuk mengangkut barang, dan peralatan bangunan dan struktur (Bank Indonesia, 2018).

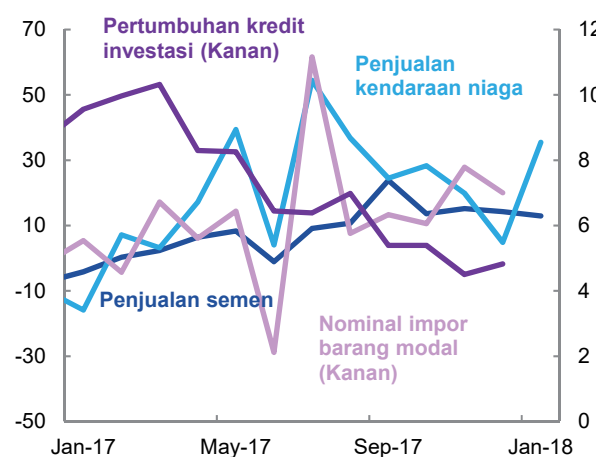
³ Peningkatan pertumbuhan investasi bersama dengan penurunan pertumbuhan kredit menunjukkan bahwa investasi semakin banyak yang dibiayai oleh pinjaman non-bank.

⁴ Dengan basis triwulan-ke-triwulan tahunan yang disesuaikan secara musiman (*seasonally adjusted quarter-on-quarter annualized*, qoq saar), konsumsi pribadi menurun dari 5,6 persen di Triwulan ke-3 menjadi 4,5 persen di Triwulan ke-4. Penyesuaian musiman X12 dilakukan.

Konsumsi makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan konsumsi swasta dengan pertumbuhan yang lebih tinggi di Triwulan ke-4⁵. Peningkatan dalam pertumbuhan konsumsi konsisten dengan peningkatan marjinal dalam kredit konsumen⁶, terlepas dari penurunan yang signifikan dalam suku bunga pinjaman konsumen⁷, dan inflasi yang lebih rendah di Triwulan ke-4. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi swasta yang menurun bukanlah tren yang terjadi baru-baru ini. Nyatanya, pertumbuhan konsumsi swasta rata-rata mencapai 5,0 sejak semester kedua tahun 2014, dibandingkan dengan rata-rata 5,5 persen pada periode antara 2012 hingga semester pertama tahun 2014.

Gambar A.7: Pertumbuhan penjualan kendaraan niaga menurun dan pertumbuhan kredit investasi terus menurun

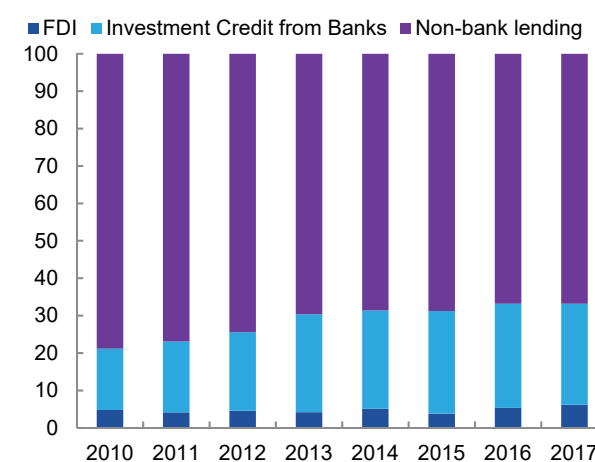
(pertumbuhan sebesar 3mma yoy, pertumbuhan yoy, persen, Seb. Kiri; pertumbuhan yoy, persen, Seb. Kanan)



Sumber: BI; BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Investasi dan impor nilai nominal barang modal diukur dalam yoy. Penjualan semen dan kendaraan niaga diukur dalam persen rata-rata pergerakan selama 3 bulan (*month moving average*, mma) yoy.

Gambar A.8: Hanya sepertiga dari investasi yang dibiayai melalui investasi asing langsung (FDI) dan kredit perbankan

(porsi dari total investasi, persen)



Sumber: Bank Indonesia; BPS; perhitungan staf Bank Dunia

⁵ Berkontribusi sebesar 1,9 pp untuk pertumbuhan konsumsi, dengan pertumbuhan yang menguat menjadi 5,4 persen yoy di Triwulan ke-4 dari 5,1 persen di Triwulan ke-3.

⁶ 10,3 persen yoy di Triwulan ke-4 dari 10,0 persen di Triwulan ke-3.

⁷ Lihat pembahasan terperinci di Bagian 4.

Peningkatan dalam konsumsi Pemerintah berlanjut di Triwulan ke-4

Konsumsi riil pemerintah terus meningkat menjadi 3,8 persen *yoy* dari 3,5 persen di Triwulan ke-3. Peningkatan berkelanjutan ini terjadi sebagian karena adanya dampak dasar (*base effect*) yang rendah yang diakibatkan oleh pemotongan belanja publik di Triwulan ke-4 tahun 2016, dan lonjakan belanja barang secara nominal⁸ (Gambar A.9). Pertumbuhan nominal dalam belanja pegawai juga meningkat⁹, sementara nominal belanja sosial berkontraksi¹⁰, adalah hal yang tidak mengherankan karena sebagian besar belanja sosial yang dianggarkan telah dicairkan di Triwulan ke-3. Secara keseluruhan untuk 2017, konsumsi pemerintah riil mengalami pemulihan moderat, bertumbuh sebesar 2,1 persen untuk tahun ini setelah berkontraksi sebesar 0,2 persen di tahun 2016.

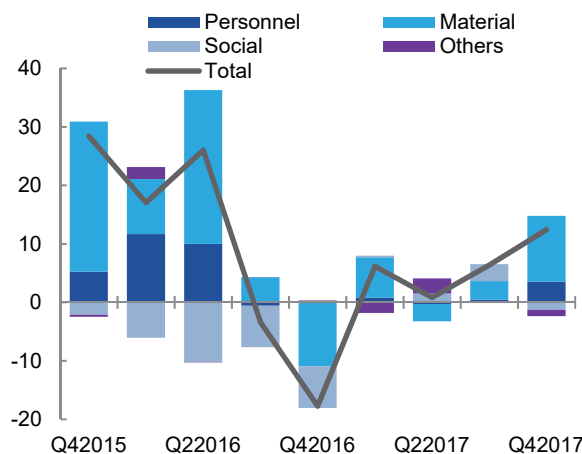
Walaupun pertumbuhan ekspor dan impor melambat di Triwulan ke-4, keduanya positif untuk tahun 2017, pertama kalinya sejak tahun 2014

Sejalan dengan sedikit berkurangnya aktivitas global di Triwulan ke-4, pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia melambat dari Triwulan ke-3; tetapi dengan impor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ekspor, ekspor bersih menjadi penghambat pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Pertumbuhan ekspor turun menjadi 8,5 persen di Triwulan ke-4, sementara pertumbuhan impor melambat menjadi 11,8 persen. Penurunan dalam pertumbuhan ekspor dan impor sebagian karena adanya dampak dasar (*base effect*). Pada tahun 2017, baik ekspor maupun impor riil kembali mengalami pertumbuhan positif, pertama kali sejak tahun 2014.

Sektor konstruksi dan jasa mendorong pertumbuhan, konsisten dengan berlanjutnya peningkatan dalam belanja pemerintah

Di sisi produksi, sektor manufaktur tetap menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, di seluruh 9 sektor produksi. Sektor konstruksi dan sektor jasa lainnya (administrasi publik, pertahanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan sosial dan lain-lain) mencatat tingkat pertumbuhan yang tercepat¹¹, sejalan dengan terjadinya pemulihan berkelanjutan dalam belanja pemerintah (Gambar A.10). Sementara itu, sektor pertambangan dan galian memberikan kontribusi terkecil terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan di Triwulan ke-4, mencatatkan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan¹². Hal ini mungkin sebagian karena terjadinya renegotiasi Kontrak Kerja yang lama antara perusahaan pertambangan dan Kementerian Energi

Gambar A.9: Konsumsi pemerintah terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan nominal belanja barang (kontribusi terhadap pertumbuhan nominal, poin persentase)



Sumber: Data realisasi APBN bulanan, Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Realisasi konsumsi pemerintah terdiri dari belanja Pemerintah Pusat untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja sosial, dan belanja lainnya (belanja hibah dan lainnya).

⁸ 22,0 persen di Triwulan ke-4 dibandingkan dengan 7,8 persen di Triwulan ke-3.

⁹ Dari pertumbuhan sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-3 menjadi 9,7 persen di Triwulan ke-4.

¹⁰ Nominal belanja sosial turun 17,0 persen di Triwulan ke-4 dari pertumbuhan sebesar 36,9 persen di Triwulan ke-3.

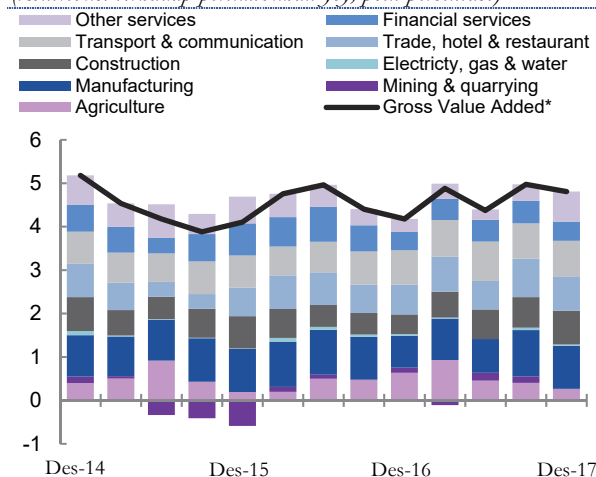
¹¹ Pertumbuhan sektor konstruksi menguat menjadi 7,2 persen *yoy* di Triwulan ke-4 dari 7,0 persen di Triwulan ke-3, sementara pertumbuhan sektor jasa lainnya menguat menjadi 6,8 persen dari 4,0 persen.

¹² Dari 1,8 persen di Triwulan ke-3 menjadi 0,1 persen di Triwulan ke-4.

dan Sumber Daya Mineral¹³. Sementara itu, sektor pertanian mencatat pertumbuhan sektoral yang paling lambat selama tiga triwulan berturut-turut sebesar 2,2 persen¹⁴, sebagian disebabkan oleh karena hama dan penyakit yang menyebabkan kegagalan panen dan menghambat produksi komoditas pertanian, menyebabkan kekurangan pasokan pada komoditas tertentu¹⁵. Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, pertumbuhan terjadi di tiga sektor utama ekonomi, dengan sektor sekunder mengalami ekspansi yang paling menonjol (Gambar A.11).

Gambar A.10: Di sisi produksi, pertumbuhan di Triwulan ke-4 didorong oleh ekspansi di sektor konstruksi dan jasa

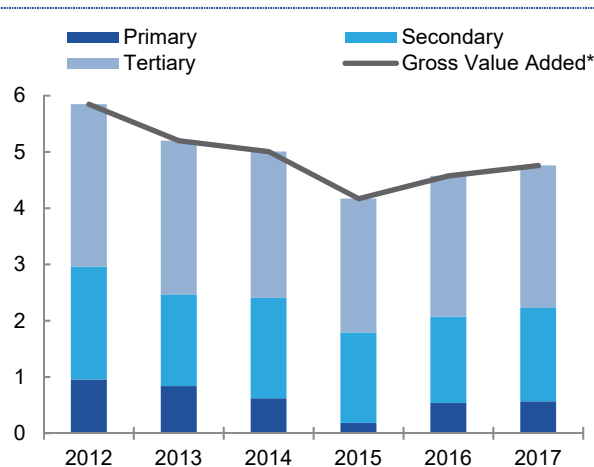
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: * Nilai Tambah Bruto diperoleh sebagai penjumlahan dari nilai tambah di sektor-sektor pertanian, industri dan jasa. Jika nilai tambah dari sektor-sektor ini dihitung pada nilai pembeli, nilai tambah bruto pada biaya faktor diperoleh dengan mengurangkan pajak tidak langsung neto dari PDB.

Gambar A.11: Pertumbuhan untuk tahun 2017 secara keseluruhan didorong oleh ekspansi sektor sekunder

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Sektor primer terdiri dari pertanian, pertambangan dan penggalan. Sektor sekunder meliputi manufaktur, utilitas dan konstruksi; Sektor tersier terdiri dari perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa lainnya.

¹³ Reuters (3 Februari 2018).

¹⁴ Pertumbuhan di sektor pertanian menguat di Triwulan ke-1 tahun 2017 sebesar 7,1 persen yoy tetapi menurun tajam menjadi 3,2 persen di Triwulan ke-2 dan 2,8 persen di Triwulan ke-3.

¹⁵ Tempo (2018). Dari sub-kategori sektor pertanian, tanaman pangan pertanian mencatat kontraksi sebesar 4,7 persen yoy di Triwulan ke-4, setelah mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen di Triwulan ke-3.

2. Harga komoditas yang lebih tinggi mendukung permintaan dalam negeri

Tahun 2017 juga mencatat adanya lonjakan harga komoditas energi global

Setelah jatuh di paruh pertama tahun 2017, harga komoditas global melonjak di paruh kedua tahun 2017, dan tetap melambung memasuki tahun 2018. Indeks harga energi Bank Dunia melonjak di Triwulan ke-4 2017 dan melonjak 23,6 persen *yoy* di tahun 2017, yang sebagian besar didorong oleh tingginya harga batubara dan harga minyak. Harga minyak Brent melonjak 18,8 persen pada bulan Desember saja, karena pengetatan pasokan global, yang sebagian disebabkan

oleh perpanjangan masas berlaku perjanjian OPEC untuk memangkas produksi minyak global, serta meningkatnya ketidakpastian politik di Timur Tengah¹⁶. Sementara itu, indeks harga non-energi naik 5,2 persen di tahun 2017, sebagian karena indeks harga logam dan mineral melonjak sebanyak dua digit. (Gambar A.12).

Peningkatan harga komoditas berlanjut ke tahun 2018. Pada bulan Januari dan Februari tahun ini, harga komoditas naik di semua komoditas secara keseluruhan, yang diakibatkan oleh meningkatnya harga energi. Harga komoditas non-energi juga meningkat, sebagian karena harga logam dan bahan tambang serta harga logam mulia yang lebih tinggi.

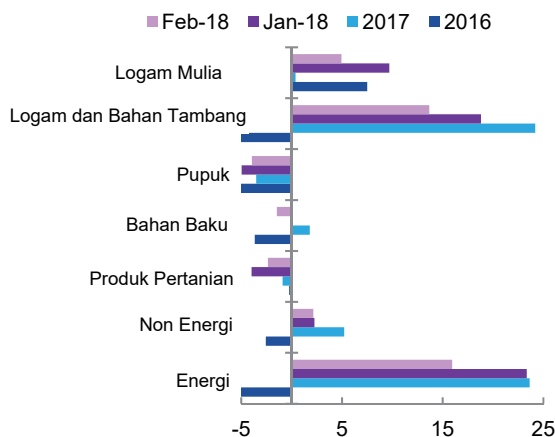
Harga komoditas utama Indonesia rata-rata naik di Triwulan ke-4

Setelah sebagian besar menurun selama paruh pertama tahun 2017, harga untuk komoditas ekspor utama Indonesia yang mencakup minyak mentah, minyak kelapa sawit (CPO), LNG, karet, batu bara dan logam dasar

sebagian besar mengakhiri tahun 2017 dengan catatan positif. Harga minyak mentah, batubara, dan logam dasar yang jauh lebih tinggi pada paruh kedua tahun 2017 menyebabkan pertumbuhan tahunan rata-rata dari enam komoditas menjadi 20,9 persen pada tahun 2017, bertolak belakang dengan terjadinya kontraksi sebesar 4,4 persen pada tahun 2016. (Tabel A.1).

Gambar A.12: Harga komoditas global pulih kembali di tahun 2017

(pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: *Pink Sheet* Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia

Tabel A.1: Perubahan harga komoditas (*yoy*, persentase)

	2016	2017	Q3-2017	Q4-2017
Batubara (Australia)	14,6	34,2	37,8	5,9
Minyak Mentah (rata-rata)	(15,7)	23,4	12,3	19,6
Gas Alam (Jepang)	(32,6)	16,2	23,3	12,3
Karet	2,2	24,3	15,5	(15,6)
Minyak Kelapa Sawit	12,5	2,6	(3,9)	(6,6)
Logam Dasar	(7,2)	24,4	26,5	24,0

Sumber: Bank Dunia (2017, 2018) dan *Macro Poverty Outlook* 2018.

¹⁶ The Economist Intelligence Unit (2018).

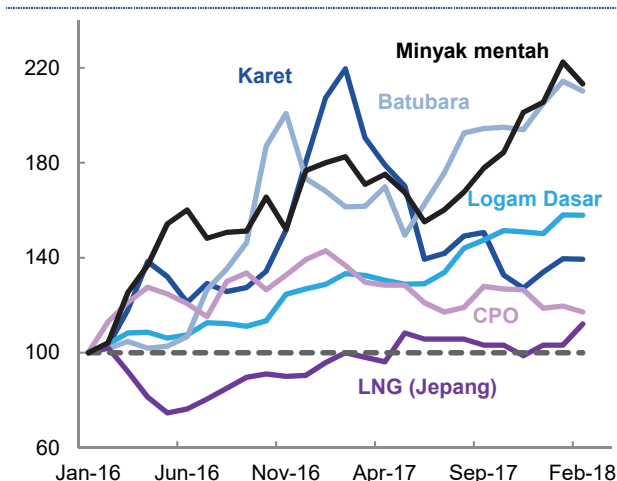
Harga energi dan logam dasar terus menguat di Triwulan ke-4 karena menurunnya pasokan, sementara harga karet dan minyak sawit menurun

Setelah naik sebesar 37,8 persen di Triwulan ke-3, harga batu bara melonjak 5,9 persen yoy di Triwulan ke-4, mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 2012 karena ketatnya pasokan¹⁷. Pada saat yang sama, harga minyak mentah melonjak sebesar 20,0 persen menjadi rata-rata USD 61,2 per barel di Triwulan ke-4, lebih tinggi dari 12,3 persen di Triwulan ke-3, yang disebabkan oleh menurunnya pasokan karena penurunan pasokan yang besar di Venezuela dan menurunnya produksi dari Laut Utara (Gambar A.13).

Harga logam dasar meningkat sebesar 24,0 persen yoy di Triwulan ke-4, melanjutkan kenaikan sebesar 26,5 persen di Triwulan ke-3. Kenaikan harga di industri logam didorong oleh aluminium, tembaga, seng, nikel dan timah. Kenaikan harga aluminium dan tembaga terutama disebabkan oleh pasokan yang lebih ketat, meskipun harga tembaga telah meningkat pada tahun 2018 karena adanya perkiraan permintaan yang lebih tinggi oleh karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat di seluruh dunia¹⁸.

Gambar A.13: Harga global untuk sebagian besar dari enam komoditas ekspor utama Indonesia telah meningkat di Triwulan ke-4.

(indeks Januari 2016 = 100)

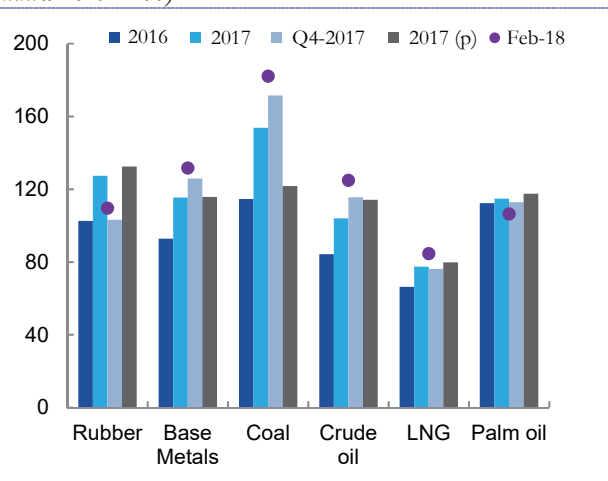


Sumber: Pink Sheet Bank Dunia; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: LNG singkatan dari *Liquefied Natural Gas* dan CPO singkatan dari *Crude Palm Oil*. Harga LNG adalah harga rata-rata dari 20 eksportir LNG ke Jepang. Data untuk Januari-2016 hingga Desember-2017 adalah data historis aktual, Januari-Februari 2018 adalah perkiraan. Angka-angka tersebut berbeda dari harga spot yang diterbitkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang.

Gambar A.14: Harga Batubara, Minyak Mentah dan Logam Dasar terus menguat di bulan Januari dan Februari 2018, naik ke titik tertinggi dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir

(indeks 2015=100)



Sumber: Bank Dunia (2018); perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: p singkatan dari perkiraan

Sebaliknya, minyak kelapa sawit dan karet menutup tahun 2017 dengan harga yang lebih rendah. Yang pertama menurun sebesar 6,7 persen pada Triwulan ke-4, lebih

¹⁷ Peningkatan harga di Triwulan ke-4 terutama didorong oleh gangguan pasokan karena salah satu tempat berlabuh di Terminal Batubara Dalrymple Bay Queensland sedang menjalani pemeliharaan terjadwal selama sebulan, yang mengakibatkan antrian kapal meningkat ke titik tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir. Lihat metalbulletin.com (27 Desember 2017).

¹⁸ Harga tembaga dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi global yang baik karena digunakan secara intensif dalam peralatan listrik seperti motor, kabel dan barang-barang elektronik. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat ditemukan di World Bank (2017d).

cepat dari penurunan sebesar 3,9 persen yang terjadi di Triwulan ke-3, sementara yang terakhir turun 15 persen di Triwulan ke-4, suatu perubahan total dari peningkatan sebesar 15 persen di Triwulan ke-3. Harga minyak kelapa sawit cenderung menurun sejak bulan November menyusul menurunnya permintaan dari India, setelah pemerintah menaikkan pajak impor minyak nabati ke titik tertinggi dalam lebih dari satu dekade ini. Di sisi lain, harga karet melemah karena kelebihan pasokan yang terjadi secara terus menerus di sepanjang tahun.¹⁹ Harga komoditas-komoditas utama tersebut terus menguat pada bulan Januari dan Februari 2018, dengan beberapa dari mereka naik ke titik tertinggi dalam beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun terakhir (Gambar A.14).

Harga komoditas yang lebih tinggi mendorong ekspor enam komoditas utama

Harga komoditas global yang lebih tinggi telah memicu pemulihan harga komoditas Indonesia. Dari enam komoditas utama, logam dasar adalah komoditas dengan kinerja terbaik di Triwulan ke-4, dengan ekspor bertumbuh sebesar 39,4 persen. Ekspor minyak mentah dan batu bara juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi di Triwulan ke-4 (Gambar A.15).

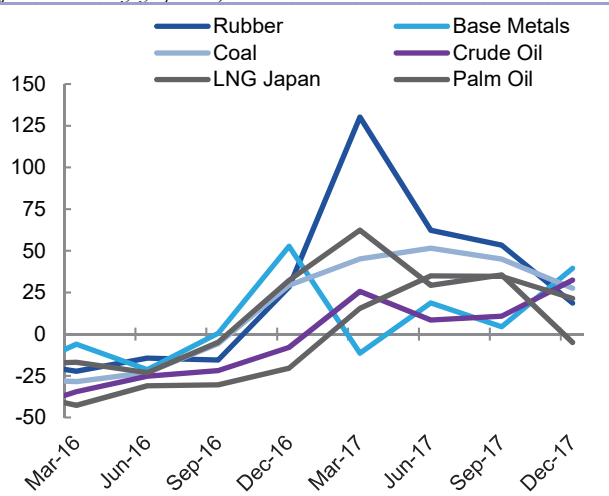
Ekspor dari enam komoditas mengalami pertumbuhan yang tinggi di tahun 2017 secara keseluruhan. Ekspor karet tumbuh pada laju tercepat sebesar 66,1 persen. Sebaliknya, ekspor logam dasar mengalami pertumbuhan yang terendah di sepanjang tahun. Secara umum, tahun 2017 adalah titik balik dari sektor komoditas. Pertumbuhan ekspor rata-rata dari enam komoditas adalah sebesar 33,0 persen pada tahun 2017, pemulihan yang sangat nyata dari kontraksi rata-rata sebesar 10,5 persen yang terjadi di tahun 2016.

3. Defisit neraca transaksi berjalan melebar

Defisit neraca transaksi berjalan melebar di Triwulan ke-4 disebabkan oleh surplus perdagangan yang lebih rendah

Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 2,2 persen dari PDB di Triwulan ke-4, yang terbesar dalam enam triwulan terakhir, dari 1,7 persen dari PDB di Triwulan ke-3, karena surplus perdagangan barang yang lebih sempit, dan defisit perdagangan jasa yang sedikit lebih tinggi, lebih dari sekadar mengimbangi defisit penerimaan primer yang sedikit lebih rendah. Pada perdagangan barang, ekspor dan impor tumbuh lebih lambat daripada di Triwulan ke-3 dengan impor yang meningkat

Gambar A.15: Pertumbuhan ekspor komoditas utama Indonesia yang tinggi pada tahun 2017
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

¹⁹ Untuk mengatasi kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan, Indonesia, Malaysia dan Thailand telah sepakat untuk memangkas ekspor sebesar 350.000 ton antara tanggal 22 Desember dan 31 Maret. Ketiga negara ini juga secara aktif memberikan pinjaman sebagai subsidi bagi petani untuk mendorong penanaman kembali dan meningkatkan produktivitas. Harga karet dapat lebih didukung oleh awal musim dingin dan tingkat produksi berikutnya yang lebih rendah.

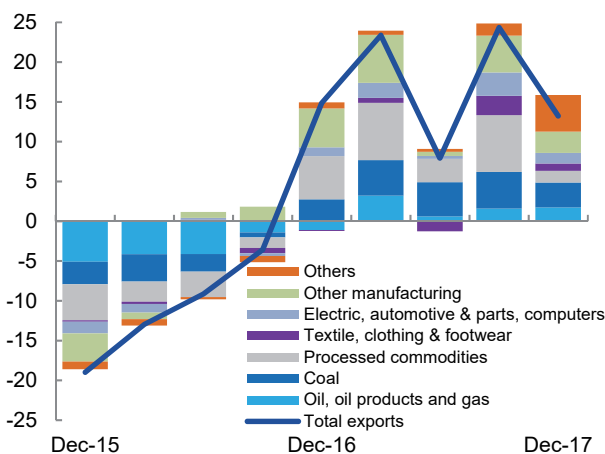
lebih cepat daripada ekspor. Defisit perdagangan jasa sedikit melebar karena jumlah pembayaran yang lebih tinggi untuk jasa pengiriman barang, yang pada gilirannya disebabkan oleh impor yang lebih tinggi dan penerimaan yang lebih rendah dari pariwisata yang disebabkan oleh terjadinya letusan Gunung Agung di Bali. Perbaikan dalam hal defisit keseimbangan primer, dipengaruhi oleh pembayaran bunga pinjaman pemerintah yang lebih rendah²⁰.

Perdagangan barang tetap mengalami surplus, tetapi lebih rendah daripada di Triwulan ke-3 karena harga minyak dan produk minyak yang lebih tinggi mendorong impor yang lebih tinggi

Sejalan dengan menurunnya perdagangan global di Triwulan ke-4, ekspor barang dan impor barang Indonesia juga melambat di Triwulan ke-4, yang menyebabkan surplus perdagangan barang menurun tajam menjadi 1,2 persen dari PDB di Triwulan ke-4 tahun 2017 dari 2,0 persen di Triwulan ke-3.

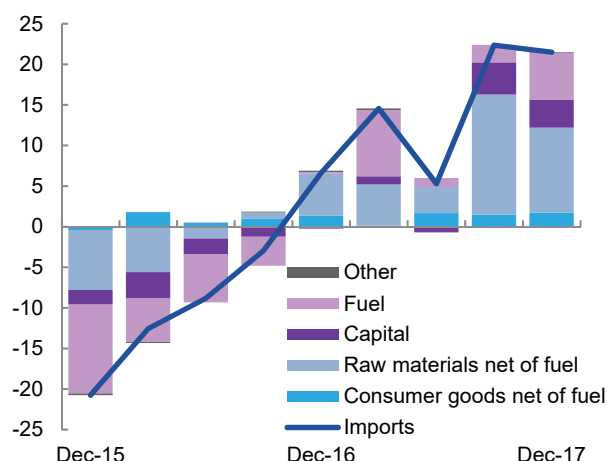
Nilai barang ekspor tumbuh sebesar 13,2 persen *yoy* di Triwulan ke-4, sedikit lebih dari setengah dari lonjakan sebesar 24,3 persen yang tercatat di Triwulan ke-3, yang merupakan yang tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir. Pertumbuhan nilai impor barang naik tipis menjadi 21,5 persen, dari 22,4 persen di Triwulan ke-3, yang juga menjadi yang tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir. Lemahnya pertumbuhan ekspor dan impor sebagian disebabkan oleh perlambatan perdagangan global dan dampak dasar (*base effect*) yang tinggi di Triwulan ke-3. Dengan menggunakan data *deseasonalized* (data yang sudah dikeluarkan pola musimannya), pertumbuhan triwulan-ke-triwulan (*qoq*) untuk ekspor dan impor masih menurun tajam di Triwulan ke-4 dibandingkan dengan Triwulan ke-3.

Gambar A.16: Pertumbuhan ekspor melambat didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigras yang lebih rendah
(pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Kategori 'manufaktur lainnya' termasuk kertas, bahan kertas, furnitur, plastik, makanan olahan, bahan kimia, dan 'lainnya'.

Gambar A.17: Pertumbuhan impor tetap kuat karena harga minyak yang meningkat lebih tinggi mendorong meningkatnya nilai impor bahan bakar
(pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

²⁰ Enam belas triwulan terakhir telah menunjukkan bahwa puncak pembayaran bunga pinjaman sebelumnya selalu terjadi di triwulan ketiga, kemudian menurun secara signifikan di triwulan keempat.

Ekspor bertumbuh lebih lambat daripada di Triwulan ke-3

Dibandingkan dengan Triwulan ke-3, pertumbuhan ekspor barang *yy* di Triwulan ke-4 melambat di hampir semua kategori. Ekspor batubara²¹, komoditas olahan, tekstil, pakaian dan alas kaki, serta komponen listrik dan otomotif, semua mengalami pertumbuhan yang lebih rendah²² (Gambar A.16). Satu-satunya pengecualian adalah pada ekspor minyak dan gas bumi²³, dan ekspor hasil tambang lainnya²⁴. Dengan pengecualian ekspor yang diperuntukkan bagi Filipina, ekspor ke sembilan negara tujuan teratas mencatat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Triwulan ke-3. Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura menyumbang sedikit lebih dari 50 persen ekspor Indonesia di tahun 2017, lebih banyak daripada pangsa mereka di tahun 2016²⁵.

Impor bahan bakar naik di Triwulan ke-4 dengan harga minyak yang lebih tinggi

Pertumbuhan impor barang berkurang sebagian karena melambatnya pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal (Gambar A.17). Namun demikian, impor barang modal tetap tinggi untuk barang modal secara umum, dan juga barang modal yang terkait dengan peralatan transportasi²⁶. Impor bahan bakar melonjak, dengan volume dan harga yang lebih tinggi²⁷. Impor barang konsumsi sedikit meningkat dibandingkan dengan Triwulan ke-3, sejalan dengan pertumbuhan konsumsi pribadi yang lebih tinggi²⁸. Impor dari hampir semua mitra dagang mengalami perlambatan, kecuali impor dari Thailand, Amerika Serikat dan India.

Surplus neraca keuangan menurun di Triwulan ke-4, karena aliran investasi langsung maupun investasi portofolio menurun

Surplus yang tercatat dalam neraca modal dan neraca keuangan turun menjadi 2,5 persen dari PDB (USD 6,5 miliar) dari 4,1 persen di Triwulan ke-3, karena menurunnya aliran investasi langsung dan investasi portofolio.

Aliran investasi portofolio menurun tajam di Triwulan ke-4 menjadi USD 1,9 miliar – kurang dari setengahnya di Triwulan ke-3, terutama disebabkan oleh investor asing yang menarik diri dari ekuitas Indonesia (Tabel A.2). Arus masuk asing bersih ke dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menjadi negatif sejak bulan Juni 2017. Aksi jual di Triwulan ke-4, menjadi yang terbesar sejak Triwulan ke-2 tahun 2013, merupakan cerminan dari persepsi luas dari pasar ekuitas yang dinilai terlalu tinggi di seluruh dunia daripada terhadap pasar modal Indonesia. Pembelian asing bersih dari obligasi Surat Utang Negara (SUN) dari Kementerian Keuangan di

²¹ Pengiriman batu bara ke Tiongkok turun menjadi 9,1 juta ton pada bulan November, lebih rendah dari pada bulan Oktober (10,1 juta ton) dan September (9,6 juta ton). Minat terhadap batubara Indonesia di Tiongkok telah sedikit terganggu oleh menurunnya permintaan untuk jenis batubara kelas rendah. Lihat Reuters (5 Desember 2017).

²² Minyak Kelapa Sawit, baik yang mentah maupun yang diolah, telah terpukul oleh kelebihan pasokan di pasar, keputusan pemerintah India untuk menerapkan pajak impor untuk minyak nabati impor, dan resolusi dari Parlemen Eropa pada bulan April 2017, yang bertujuan untuk mengurangi Pembatasan hutan hujan secara sembarangan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit.

²³ Peningkatan ekspor minyak dan gas bumi didorong oleh volume dan harga. Ekspor minyak dan gas bumi naik dalam volume tetapi volume produk minyak yang diekspor menurun. Peningkatan volume minyak yang diekspor sejalan dengan lonjakan lifting minyak yang secara siklis lebih tinggi di Triwulan ke-4.

²⁴ Kategori pertambangan lainnya mencakup semua hasil tambang kecuali untuk batubara, minyak dan gas bumi, tembaga, nikel dan bauksit.

²⁵ Negara-negara lain yang terdaftar di sepuluh negara tujuan ekspor utama adalah Malaysia, Korea Selatan, Belanda dan Thailand.

²⁶ Satu-satunya komponen impor barang modal yang menurun adalah kendaraan bermotor penumpang.

²⁷ Rata-rata harga minyak untuk Brent dan WTI adalah USD 51,7 per barel, dan USD 48,1 per barel selama Triwulan ke-3 tahun 2017. Harga tersebut masing-masing naik menjadi USD 61,5 per barel dan USD 55,4 per barel selama Triwulan ke-4 tahun 2017.

²⁸ Lihat bagian 1.

Triwulan ke-4 juga lebih rendah daripada yang terjadi di Triwulan ke-3 terutama karena terjadinya arus keluar modal pada bulan Oktober. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah terus bertahan di sekitar 40 persen.

Investasi asing langsung bersih lebih rendah nilainya dibandingkan dengan Triwulan ke-3 tetapi masih tinggi

Investasi asing langsung bersih (*foreign direct investment*, FDI) jelas lebih rendah dibandingkan dengan arus masuk yang tercatat di Triwulan ke-3 yang telah didorong oleh arus masuk berprofil tinggi ke perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) besar Indonesia. Hasil di Triwulan ke-4 juga sebagian karena terjadinya arus keluar di sektor pertambangan karena beberapa kontrak minyak dan gas bumi berakhir²⁹. Sebaliknya, di sektor manufaktur kembali terjadi masuknya arus masuk positif yang terbesar, dengan arus masuk FDI sebesar sekitar 3,3 miliar dolar AS – sekitar 71 persen dari total FDI di Triwulan ke-4 (Tabel A.2).

Tabel A.2: Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

(miliar USD kecuali dinyatakan lain)

	Q3-2017	Q4-2017	2016	2017
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	5,4	1,0	12,1	11,6
<i>Sebagai persen PDB</i>	2,0	0,4	1,3	1,1
Neraca Transaksi Berjalan	(4,3)	(5,8)	(17,0)	(17,3)
<i>Sebagai persen PDB</i>	(1,7)	(2,2)	(1,8)	(1,7)
Neraca perdagangan barang	5,3	3,2	15,3	18,9
Neraca perdagangan jasa	(2,2)	(2,3)	(7,1)	(7,9)
Penerimaan	(7,4)	(6,6)	(25,2)	(28,3)
Neraca Modal dan Neraca Keuangan	10,4	6,5	29,3	29,9
<i>Sebagai persen PDB</i>	4,1	2,5	3,2	2,9
Investasi langsung	8,1	4,6	16,1	20,2
Investasi Portofolio	4,1	1,9	19,0	20,7
Investasi Lainnya	(1,4)	0	(5,8)	(10,9)

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

NPI membukukan surplus yang ketujuh secara berturut-turut di Triwulan ke-4 karena defisit neraca transaksi berjalan yang lebih tinggi diimbangi oleh surplus dalam neraca keuangan

Dengan defisit transaksi berjalan yang lebih lebar dan surplus neraca modal dan neraca keuangan yang sempit, Indonesia mencatat surplus neraca pembayaran sebesar USD 1 miliar (0,4 persen dari PDB) di Triwulan ke-4 tahun 2017, surplus untuk triwulan yang ketujuh secara berturut-turut, tetapi turun dari surplus sebesar USD 5,4 miliar (2,0 persen dari PDB) di Triwulan ke-3 (Tabel A.2). Cadangan devisa meningkat hanya sebesar 0,8 miliar dolar AS untuk mencapai 130,2 miliar dolar AS di akhir Triwulan ke-4, yang tertinggi dalam sejarah, dan cukup untuk membiayai pembayaran utang luar negeri pemerintah dan impor selama 8,3 bulan.

Defisit neraca transaksi berjalan untuk tahun 2017 berada pada level terendah selama enam tahun terakhir karena nilai ekspor tumbuh lebih cepat daripada nilai impor

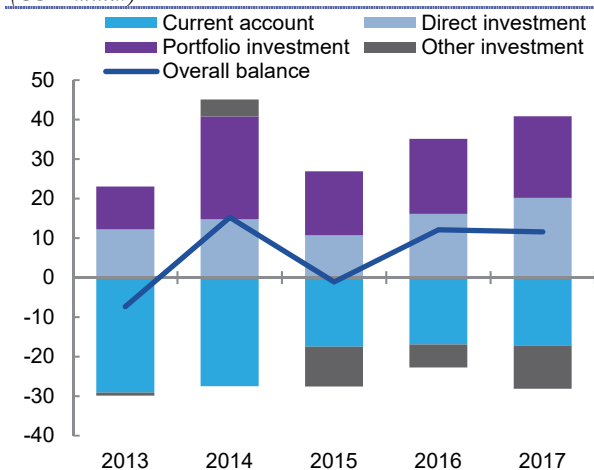
Untuk seluruh tahun 2017, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar USD 11,6 miliar (1,1 persen dari PDB), sedikit lebih rendah dari USD 12,1 miliar (1,3 persen dari PDB) yang terjadi di tahun 2016. Defisit neraca transaksi berjalan mencapai USD 17,3 miliar atau 1,7 persen dari PDB, yang terendah dalam enam tahun terakhir, dari defisit tahun sebelumnya sebesar 1,8 persen PDB, didorong oleh terjadinya lonjakan neraca perdagangan (Gambar A.18). Neraca perdagangan barang meningkat karena pertumbuhan nilai ekspor lebih cepat daripada nilai impor, oleh karena nilai impor minyak dibatasi karena harganya relatif lebih rendah untuk sebagian besar tahun 2017 sebelum harga tersebut melonjak di Triwulan ke-4. Di sisi lain,

²⁹ Kontrak yang sudah berakhir termasuk Blok Attaka (sebagian dioperasikan oleh perusahaan Jepang), Blok North West Java Offshore (sebagian dioperasikan oleh perusahaan Singapura), dan Blok Mahakam (sebagian dioperasikan oleh perusahaan Perancis).

defisit dalam perdagangan jasa melebar karena lonjakan impor untuk barang-barang konsumsi dan investasi mendorong melonjaknya pembayaran untuk jasa pengiriman barang.

Gambar A.18: NPI terus mencatat surplus pada tahun 2017, didorong oleh arus investasi langsung dan investasi portofolio yang tinggi. Defisit neraca transaksi berjalan jatuh ke titik terendah dalam 6 tahun terakhir

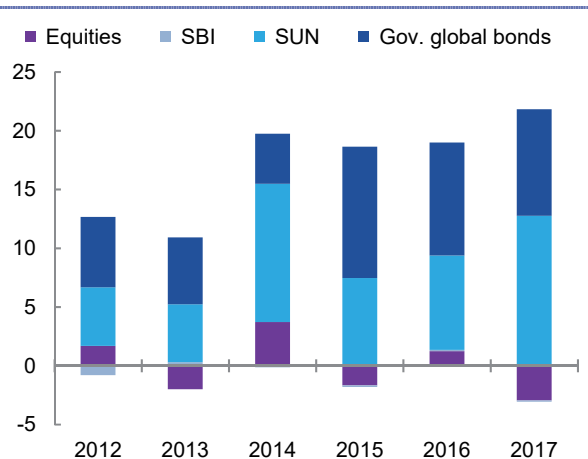
(USD miliar)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.19: Investor yang menjual saham Indonesia pada tahun 2017

(USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia, Bursa Efek Jakarta, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN)

Surplus neraca modal dan neraca keuangan menyempit di tahun 2017

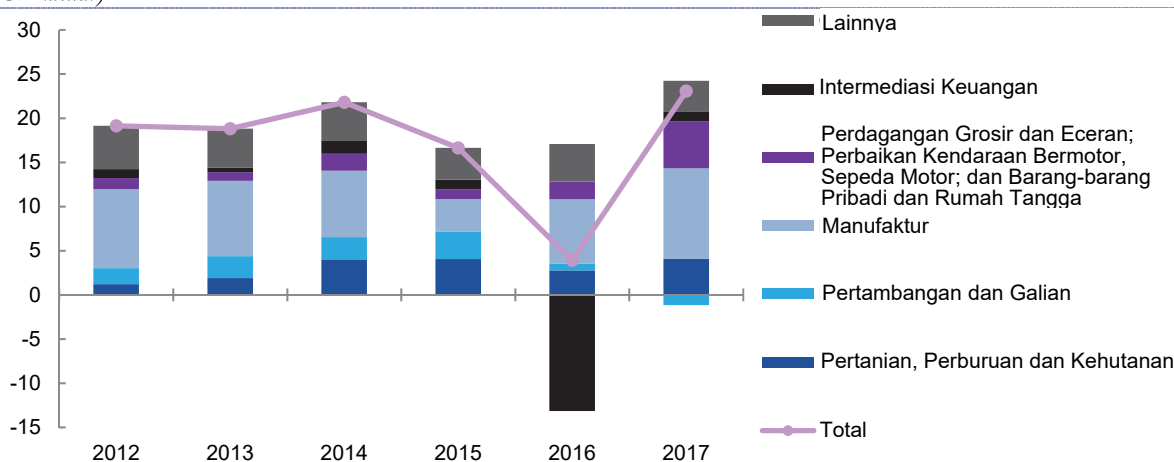
Secara tahunan, surplus neraca keuangan pada tahun 2017 adalah sebesar 2,9 persen dari PDB dibandingkan dengan 3,2 persen pada tahun 2016, meskipun meningkatnya investasi langsung dan investasi portofolio menunjukkan masih kuatnya minat investor terhadap aset keuangan Indonesia.

Investasi Asing Langsung (FDI) naik ke level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada tahun 2017

Secara tahunan, arus Investasi Asing Langsung (FDI) bersih pada tahun 2017 adalah yang terbesar dalam 7 tahun terakhir, terutama karena adanya arus masuk pada Triwulan ke-3 (Gambar A.20). Hasil yang tinggi di tahun 2017 ini sejalan dengan indikator ekonomi positif lainnya, seperti penurunan imbal hasil obligasi dan naiknya peringkat dari tiga lembaga pemeringkat kredit utama selama 12 bulan terakhir yang menunjukkan Indonesia sebagai pilihan investasi yang sehat. Perdagangan di sektor manufaktur dan grosir serta ritel mendorong sebagian besar peningkatan FDI tersebut, sementara arus keluar investasi langsung terjadi di sektor pertambangan.

Gambar A.20: Arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) adalah yang tertinggi dalam sejarah

(USD miliar)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

Rupiah terdepresiasi sedikit di Triwulan ke-4, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan di Triwulan ke-3 dan menutup tahun 2017 dengan depresiasi yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahun 2016...

Rupiah secara umum stabil di Triwulan ke-4, terdepresiasi terhadap Dolar AS sekitar 0,4 persen menjadi Rp. 13.548 (per USD 1), dibandingkan dengan depresiasi sebesar 1,3 persen pada di Triwulan ke-3. Pergerakan ini menyebabkan depresiasi tahunan keseluruhan sebesar 0,5 persen pada tahun 2017, dibandingkan dengan apresiasi sebesar 3,3 persen pada tahun 2016. Terlepas dari depresiasi yang tidak terlalu besar ini³⁰, kinerja Rupiah pada tahun 2017 juga ditandai oleh volatilitas yang lebih tinggi di paruh kedua setelah cukup stabil di paruh pertama. Mata uang ini mencapai puncaknya sebesar Rp 13.154 per USD 1 pada bulan September 2017 dan jatuh ke posisi terendah sebesar Rp 13.630 per USD 1 pada akhir bulan Oktober, ayunan sebesar lebih dari 3 persen selama periode dua bulan ini.

...dan cenderung berbeda tren dari mata uang negara-negara berkembang lainnya

Di tahun 2017 juga terjadi perbedaan tren mata uang Rupiah dari mata uang negara-negara berkembang lainnya (Gambar A.21). Secara historis, Rupiah cenderung secara longgar mengikuti pergerakan nilai tukar negara-negara berkembang, yang diwakili oleh Indeks Mata Uang Negara-negara Berkembang (*Emerging Markets Currency Index, EMCI*) dari JP Morgan. Pergerakan dalam cadangan devisa menunjukkan bahwa seiring dengan kokohnya kekuatan yang mendasarinya, intervensi terhadap pasar uang oleh Bank Indonesia memainkan beberapa peran dalam mendukung stabilitas.

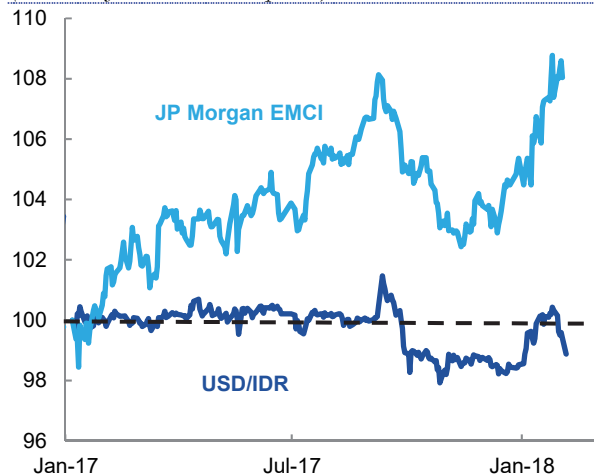
Rupiah telah mengawali tahun 2018 dengan volatilitas yang relatif lebih tinggi

Secara riil, Rupiah terdepresiasi sebesar 5,2 persen pada tahun 2017, sebagian besar di antara mata uang regional lainnya, yang akan memberikan dorongan bagi daya saing ekspor Indonesia. Ini adalah kondisi yang benar-benar terbalik dari kondisi pada tahun 2016, di mana Rupiah terapresiasi sebesar 3,9 persen, lebih tinggi dari semua mata uang utama regional kecuali Jepang (Gambar A.22). Selama 4 tahun terakhir, Rupiah telah terapresiasi sebesar 9,1 persen secara riil, lebih dari mata uang lainnya kecuali Rupee India. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan daya saing hanya terjadi sekitar setahun terakhir atau lebih.

³⁰ Rupiah terdepresiasi di paruh kedua tahun 2017 karena adanya perkembangan perekonomian global seperti pengumuman oleh Federal Reserve AS yang akan mulai mengecilkan neracanya, serta perkembangan perekonomian dalam negeri dengan Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakannya sebanyak dua kali di Triwulan ke-3.

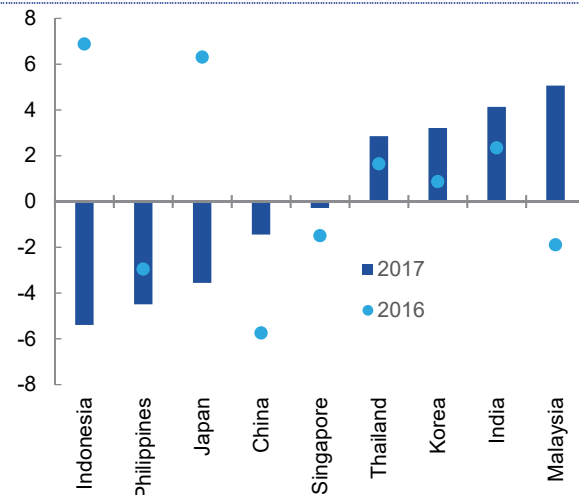
Sejauh ini, di Triwulan ke-1 tahun 2018 Rupiah relatif bergejolak dibandingkan dengan tahun 2017³¹ – terapresiasi hanya di bawah 2 persen di pertengahan Januari sebelum semua peningkatannya terhenti di awal Februari. Gejolak yang meningkat ini telah menarik perhatian Bank Indonesia sehingga, meskipun belum mengkhawatirkan, bank sentral tetap siap melakukan intervensi untuk memastikan stabilitasnya jika diperlukan³².

Gambar A.21: Rupiah mencatat tren yang berbeda dari mata uang negara-negara berkembang lainnya dan mencatatkan depresiasi yang tidak terlalu besar (indeks, 1 Januari = 2017, persen)



Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi.

Gambar A.22: Secara riil, Rupiah terdepresiasi lebih dari kebanyakan mata uang regional lainnya (perubahan persentase tahun-ke-tanggal (ytd))



Sumber: Nilai Tukar Riil Efektif JP Morgan, berdasarkan IHK (2010=100); perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi.

4. Posisi fiskal membaik pada tahun 2017, dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan defisit yang rendah

Tahun 2017 terjadi peningkatan penerimaan pajak, pelaksanaan belanja, dan defisit fiskal yang rendah

Karena harga minyak global yang lebih tinggi dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penerimaan Indonesia bertumbuh pada laju tercepat dalam enam tahun terakhir, tidak termasuk penerimaan dari Program Amnesti Pajak (PAP). Penerimaan yang lebih tinggi mendukung pertumbuhan nominal yang tercepat dalam total belanja pemerintah dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh belanja modal, belanja barang, dan belanja sosial. Secara keseluruhan, defisit fiskal mencapai 2,4 persen dari PDB³³ di tahun 2017, lebih rendah dari defisit sebesar 2,5 persen di tahun 2016. Total utang pemerintah mencapai 29 persen dari PDB pada akhir tahun 2017, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 60 persen PDB, sedikit meningkat dari 28,3 persen pada tahun 2016.

³¹ Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia Baru-baru ini mengacu pada stabilitas nilai Rupiah dalam 18 bulan terakhir. Volatilitas relatif yang disebutkan di atas mengacu pada stabilitas yang disebutkan sebelumnya. Untuk nilai tukar mengambang, pergerakan sebesar 1 atau 2 persen bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

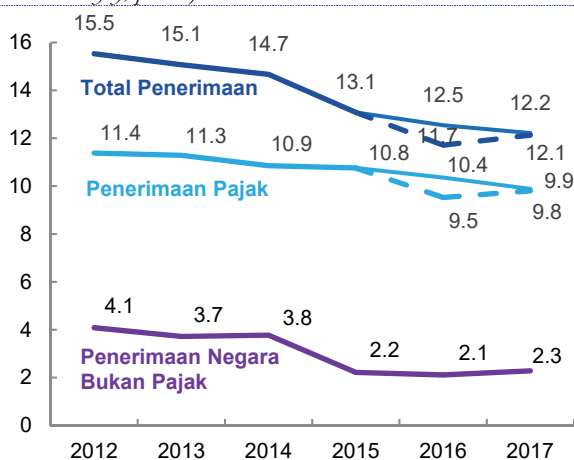
³² Netralnews.com (3 Februari 2018).

³³ Semua angka di bagian ini merujuk pada angka realisasi awal dari Kementerian Keuangan, yang diterima pada tanggal 9 Februari 2018, kecuali dinyatakan lain.

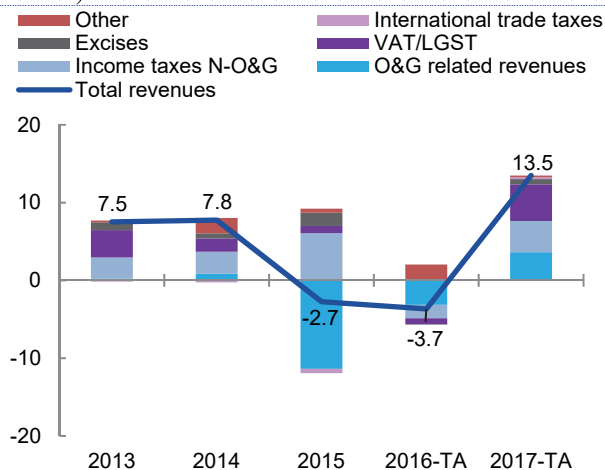
Dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan kecil dalam rasio pajak terhadap PDB di tahun 2017 jika penerimaan dari program Amnesti Pajak tidak dimasukkan

Rasio pajak terhadap PDB³⁴ menurun dari 10,4 persen dari PDB di tahun 2016 menjadi 9,9 persen dari PDB di tahun 2017, melanjutkan kecenderungan penurunan yang terjadi sejak tahun 2012. Namun demikian, jika dana penyesuaian dari PAP dikeluarkan dari angka penerimaan di tahun 2016 dan 2017, rasio tersebut meningkat menjadi 9,8 persen dari 9,5 persen di tahun 2016 (Gambar A.23). Kenaikan kecil dalam rasio pajak ini menunjukkan dampak dari harga minyak yang lebih tinggi³⁵ dan beberapa hasil awal dari upaya Pemerintah untuk meringankan beban untuk membayar pajak dan meningkatkan manajemen kepatuhan. Dengan tidak memasukkan penerimaan dari PAP, pertumbuhan penerimaan secara keseluruhan mencapai 13,5 persen, dengan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar dengan 4,7 poin persentase, terutama didukung oleh PPN impor (Gambar A.24)³⁶. Harga minyak yang lebih tinggi juga berarti penerimaan terkait minyak dan gas bumi (Migas) memainkan peranan penting, berkontribusi sebesar 3,6 poin persentase terhadap pertumbuhan total penerimaan di luar penerimaan dari PAP.³⁷ Kontribusi dari penerimaan cukai kecil tetapi positif, yang menunjukkan keuntungan dari reformasi cukai tembakau³⁸.

Gambar A.23: Rasio Pajak terhadap PDB tidak termasuk penerimaan pajak dari program Amnesti Pajak yang meningkat di tahun 2017
(perubahan *yoy*, persen)



Gambar A.24: Penerimaan terkait PPN dan Migas mendorong penerimaan yang tinggi di tahun 2017
(kontribusi terhadap pertumbuhan, Januari-Desember, poin persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia.

Catatan: Angka di tahun 2012-2016 adalah angka aktual yang sudah diaudit, angka di tahun 2017 adalah angka aktual awal mulai tanggal 9 Februari 2018.

Pendapatan terkait komoditas dan PPN terus mendorong realisasi penerimaan

Data awal realisasi bulanan menunjukkan bahwa penerimaan terkait komoditas dan PPN berperan penting dalam realisasi penerimaan pada awal tahun 2018. Realisasi penerimaan total di akhir Februari bertumbuh sebesar 17,7 persen *yoy* dalam nominal,

³⁴ Penerimaan pajak didefinisikan sebagai jumlah pajak dalam negeri dan internasional yang dipungut oleh pemerintah pusat. Penerimaan ini menyumbang sekitar 92 persen dari total penerimaan pajak di Indonesia.

³⁵ Harga minyak rata-rata sebesar USD 51 per barel, lebih tinggi dari asumsi APBN 2017 sebesar USD 48 per barel.

³⁶ PPN impor dan PPN dalam negeri masing-masing menyumbang 3,1 dan 1,6 poin persentase bagi pertumbuhan nominal penerimaan non-PAP pada tahun 2017.

³⁷ Lihat Bagian 4 tentang komoditas.

³⁸ Lihat Bagian B untuk pembahasan lebih lanjut.

dalam dua bulan pertama tahun 2018

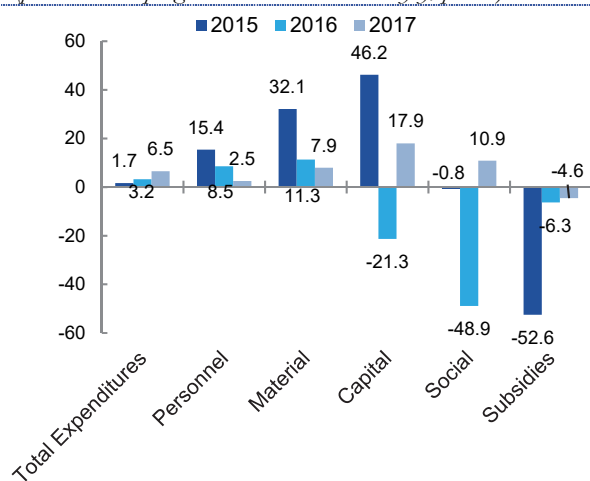
lebih cepat dari 8,9 persen selama periode yang sama di tahun 2017³⁹. Penerimaan pajak tumbuh sebesar 14,1 persen selama dua bulan pertama tahun ini. Sumber penerimaan lainnya seperti bea masuk, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) juga meningkat setelah mengalami penurunan secara nominal di tahun 2017.

Pengeluaran bertumbuh dengan laju tercepat dalam tiga tahun terakhir ini, sebagian karena dampak dasar (*base effect*) yang rendah di tahun 2016

Pada tahun 2017, total pengeluaran bertumbuh sebesar 6,5 persen *yoY* secara nominal, tingkat pertumbuhan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir (Gambar A.25). Belanja modal menjadi pendorong utama pertumbuhan, meningkat tajam dari minus 21,3 persen di tahun 2016 menjadi 17,9 persen di tahun 2017, meskipun secara nominal tetap lebih rendah dari tahun 2015. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dari total pengeluaran ini sebagian disebabkan karena dampak dasar (*base effect*) yang rendah, karena adanya pemotongan anggaran untuk belanja modal dan belanja barang di Triwulan ke-4 tahun 2016. Belanja sosial juga sebagian meningkat, tumbuh sebesar 10,9 persen dari lebih dari setahun yang lalu.

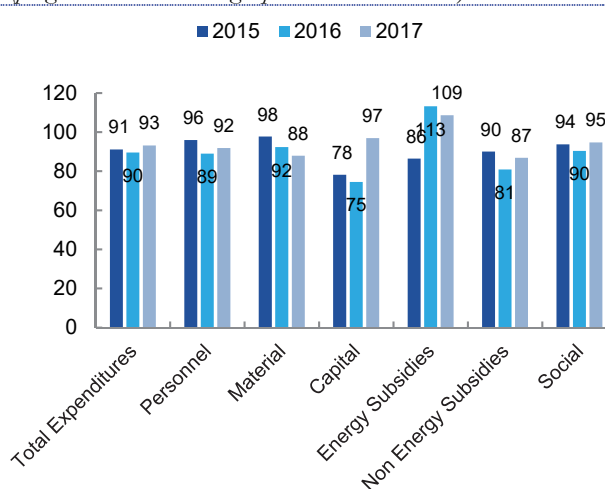
Gambar A.25: Belanja modal dan belanja sosial yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan belanja secara keseluruhan di tahun 2017

(pertumbuhan pengeluaran aktual tahunan *yoY*, persen)



Gambar A.26: Pencairan secara keseluruhan meningkat, terutama untuk belanja modal dan belanja sosial...

(pengeluaran aktual sebagai persen dari APBN-P)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Beberapa pengeluaran sosial direklasifikasi ke dalam belanja barang di tahun 2015. Angka di tahun 2015-2016 adalah angka aktual yang sudah diaudit. Angka di tahun 2017 adalah angka awal mulai 9 Februari 2018.

Pencairan anggaran modal dan sosial meningkat

Hingga akhir tahun 2017, Rp.1986 triliun atau 93,1 persen dari total belanja pemerintah dalam APBN-P tahun 2017 telah dicairkan, ini merupakan angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir (Gambar A.26). Hal ini mencerminkan peningkatan dalam pelaksanaan anggaran pengeluaran, dengan pengeluaran belanja modal meningkat dari 74,5 persen di tahun 2016 menjadi 96,9 persen di tahun 2017, tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Pencairan belanja sosial juga meningkat menjadi 94,7 persen dari APBN, tetapi pencairan subsidi non-energi tetap rendah karena masalah administrasi yang tetap terjadi. Pemerintah melebihi anggarannya untuk subsidi energi karena harga

³⁹ Tahun 2018 adalah pertama kalinya realisasi penerimaan bulanan bertumbuh sebanyak dua digit di bulan Januari-Februari sejak tahun 2014, ketika mereka bertumbuh sebesar 16,3 persen.

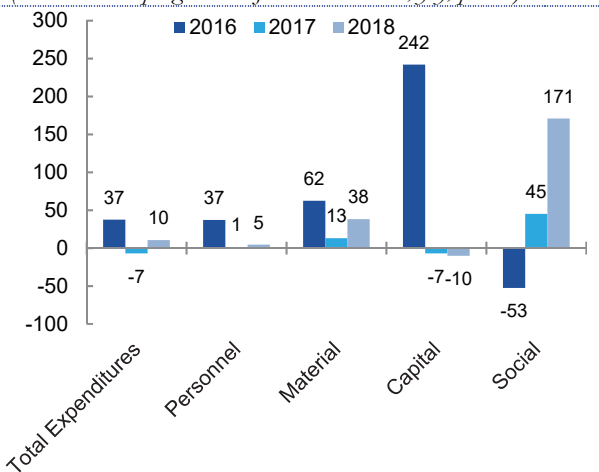
minyak yang lebih tinggi dari yang diperkirakan⁴⁰ dan beberapa tunggakan pembayaran dari tahun 2016.⁴¹

Realisasi pengeluaran pada Februari 2018 menunjukkan momentum berkelanjutan dalam belanja sosial

Hingga akhir Februari tahun 2018, Pemerintah telah mencairkan 11,3 persen dari total APBN tahun 2018 yang disetujui, 0,5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pencairan selama periode yang sama tahun lalu. Pencairan belanja sosial meningkat 170,8 persen *yoy* secara nominal. Hal ini disebabkan karena manajemen data penerima manfaat yang lebih baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Dana Kesehatan Bersubsidi (Penerima Bantuan Iuran atau PBI).⁴²

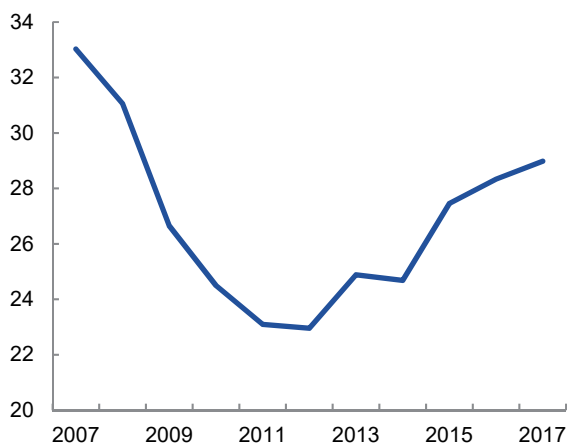
Gambar A.27: Realisasi Januari-Februari 2018 mencerminkan peningkatan belanja sosial yang tinggi

(Pertumbuhan pengeluaran Januari-Februari, *yoy*, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

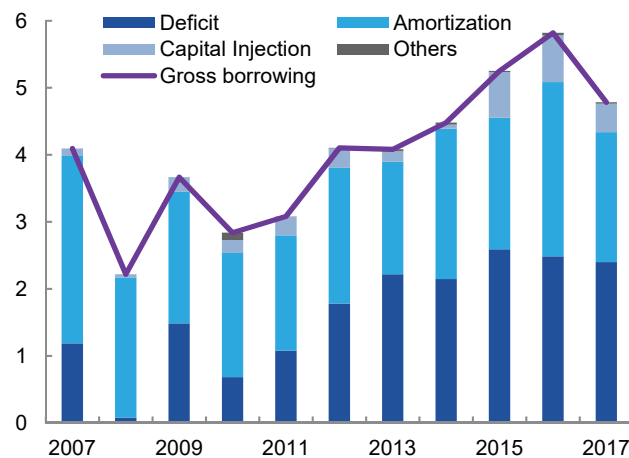
Gambar A.28: Rasio Utang terhadap PDB sedikit meningkat pada tahun 2017, tetapi tetap jauh di bawah ambang batas menurut undang-undang
(Utang luar negeri pemerintah pusat; persen dari PDB)



Sumber: CEIC; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia.

Catatan: Pada Gambar 41, 'lainnya' terdiri dari pemerintah lain di bawah lini pengeluaran seperti kewajiban jaminan

Gambar A.29: Jumlah pinjaman bruto pada tahun 2017 adalah sebesar dua kali lipat dari besarnya defisit fiskal
(persen dari PDB)



⁴⁰ Harga minyak mentah rata-rata sebesar USD 51 per barel pada tahun 2017, dibandingkan dengan asumsi dalam APBN-P tahun 2017 sebesar USD 48/barel.

⁴¹ Pemerintah membayar tunggakan sebesar Rp 5 triliun kepada PLN pada tahun 2017.

<http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/15/p2lvax383-kurang-bayar-anggaran-subsidi-energi-membengkak-pada-2017>

⁴² Kemenkeu (Februari 2018).

Rasio utang tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang

Hingga akhir tahun 2017, utang Pemerintah Pusat naik dari 28,3 persen dari PDB pada tahun 2016 menjadi 29,0 persen dari PDB⁴³, tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 60 persen (Gambar A.28)⁴⁴. Sebagian besar utang tahun 2017 masih didominasi oleh penerbitan obligasi pemerintah dalam mata uang dalam negeri⁴⁵. Pinjaman bruto pada tahun 2017 adalah sebesar 4,8 persen dari PDB, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Suntikan modal ke BUMN dan BLU telah berkontribusi lebih besar terhadap pinjaman bruto dalam beberapa tahun terakhir ini, sebesar 8,8 persen dari total (Gambar A.29)⁴⁶.

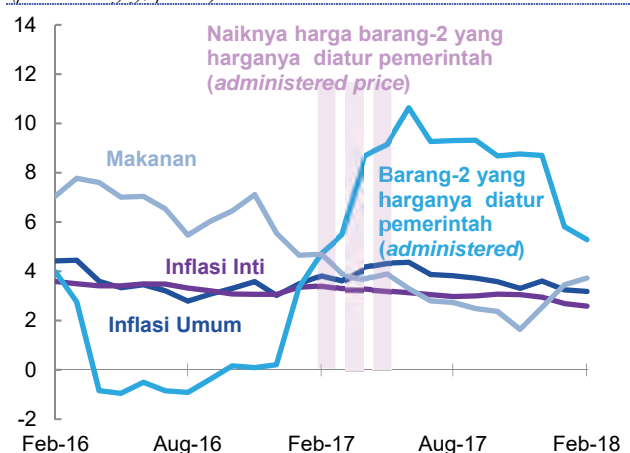
5. Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan tetap rendah**Tekanan inflasi menurun lebih lanjut di Triwulan ke-4, sebagian besar diakibatkan oleh harga makanan yang lebih rendah**

Inflasi IHK atau inflasi umum menurun menjadi rata-rata 3,5 persen yoy di Triwulan ke-4 2017, yang terendah sejak Triwulan ke-4 tahun 2016, dari 3,8 persen di Triwulan ke-3. Inflasi yang lebih rendah di Triwulan ke-4 ini sebagian besar disebabkan oleh inflasi harga pangan yang diredam, 0,5 persen di Triwulan ke-4, rata-rata triwulanan terendah dalam 14 tahun ini. Dalam dua bulan pertama tahun 2018, inflasi umum terus menurun. Bahkan, pada bulan Februari 2018, inflasi

berada pada titik terendah sejak bulan Desember 2016, meskipun terjadi kenaikan harga makanan karena adanya masalah pasokan dengan bahan pokok seperti beras.

Dalam hal komponen utama dari inflasi umum, inflasi inti di Triwulan ke-4 tetap tidak berubah dari rata-rata di Triwulan ke-3 sebesar 3,0 persen yoy, rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan, karena ekonomi terus beroperasi mendekati kapasitas potensialnya. Inflasi inti terus menurun selama dua bulan pertama tahun ini, mencapai yang terendah pada catatan, yaitu sebesar 2,6 persen yoy pada bulan Februari. Demikian pula, sebagian besar disebabkan oleh inflasi harga makanan yang rendah, inflasi harga makanan yang bergejolak rata-rata sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-4, tidak berubah dari Triwulan ke-3, juga merupakan rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan. Setelah naik rata-rata 8,7 persen di Triwulan ke-4, turun dari 9,3 persen di Triwulan ke-3, kenaikan harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah

Gambar A.30: Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan yang menurun
(perubahan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Harga makanan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan makanan dan makanan olahan dari IHK

⁴³ Termasuk tambahan USD 4.0 miliar dari pra-pembiayaan APBN tahun 2018. Lihat DJPPR (2017).

⁴⁴ Pasal 12 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁴⁵ Obligasi dalam denominasi Rupiah tidak menanggung risiko nilai tukar bagi Indonesia, tidak seperti obligasi dalam mata uang asing.

⁴⁶ Suntikan modal adalah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

(*administered price*) turun di bawah 6 persen untuk pertama kalinya sejak bulan Maret 2017.

Secara tahunan, inflasi umum adalah sebesar 3,8 persen, sedikit lebih tinggi dari 3,5 persen yang tercatat pada tahun 2016, terutama karena harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*) yang lebih tinggi yang disebabkan oleh kenaikan tarif listrik di paruh pertama tahun 2017 (Gambar A.30).

Kecenderungan inflasi harga makanan dapat berbalik arah

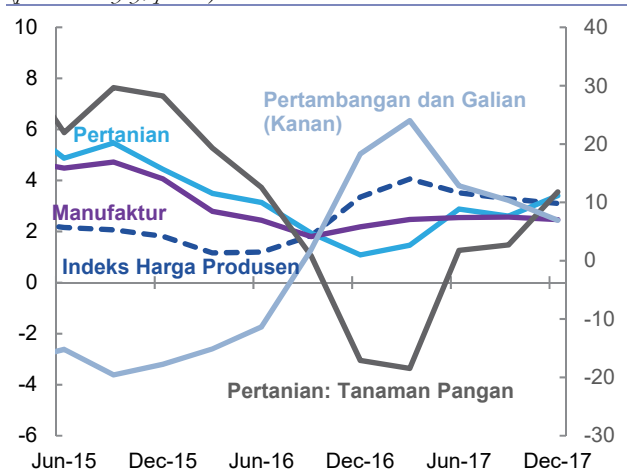
Tahun 2017 sebagian besar ditandai dengan turunnya inflasi harga makanan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kondisi cuaca yang baik serta upaya langsung Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan dan mengurangi gejolak melalui pemberlakuan plafon harga dan meningkatkan distribusi dengan bantuan dari kementerian lini dan lembaga seperti Bulog, badan urusan logistik negara⁴⁷. Namun demikian, karena adanya lonjakan harga bahan makanan biji-bijian, ubi kayu dan produk-produk terkait, harga makanan pada bulan Januari dan Februari 2018 sedikit meningkat, membalikkan kecenderungan penurunan pada inflasi harga makanan di sebagian besar tahun 2017. Harga beras juga meningkat tajam di bulan Desember 2017 dan dua bulan pertama tahun 2018, berkontribusi terhadap naiknya inflasi harga makanan dan mendorong Pemerintah untuk mengizinkan peningkatan jumlah impor beras untuk mengurangi tekanan harga yang disebabkan oleh menurunnya stok dalam negeri⁴⁸.

Peningkatan harga produsen menurun di Triwulan ke-4 karena menurunnya peningkatan harga di sektor pertambangan dan galian

Di sisi produksi, inflasi umum dari produsen utama di Triwulan ke-4 menurun menjadi rata-rata 3,1 persen yoy dibandingkan dengan 3,3 persen di Triwulan ke-3. Ini adalah laju pertumbuhan paling lambat sejak Triwulan ke-3 tahun 2016, yang sebagian besar didorong oleh perlambatan yang signifikan dari kenaikan harga di sektor pertambangan dan galian ke titik yang terendah sejak

Gambar A.31: Harga produsen juga melemah di Triwulan ke-4

(perubahan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Triwulan ke-3 tahun 2016 (Gambar A.31). Hampir semua kategori lainnya tetap stabil dengan pengecualian harga tanaman pangan yang mengalami kenaikan harga ke tingkat yang terakhir terjadi di Triwulan ke-2 tahun 2016. Hama penyakit yang berdampak pada tanaman juga berkontribusi pada peningkatan harga pangan, dan ini kemungkinan akan memberi beberapa tekanan peningkatan pada harga untuk beberapa bulan sampai dengan masa panen tiba.

⁴⁷ Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat World Bank (2017b).

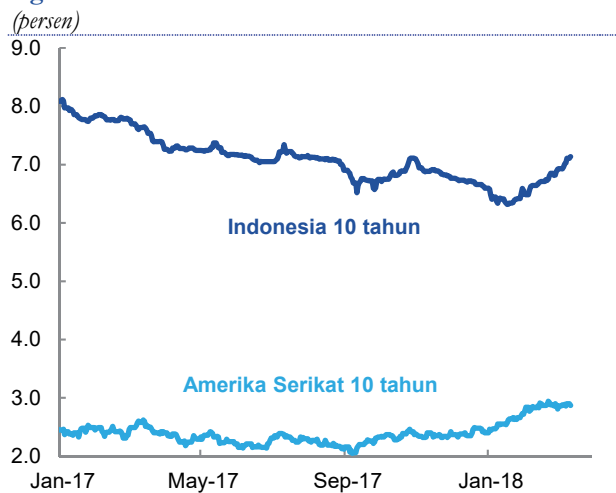
⁴⁸ The Jakarta Post (22 Januari 2018).

6. Kondisi keuangan makro stabil, dengan pertumbuhan kredit yang masih lamban

Imbal hasil obligasi terus menurun di Triwulan ke-4, di tengah minat investor yang tinggi terhadap obligasi pemerintah Indonesia

Sebagaimana dicatat sebelumnya, arus masuk modal ke Indonesia pada tahun 2017 tinggi didorong oleh minat investor yang tinggi untuk aset keuangan Indonesia. Pada Triwulan ke-4, imbal hasil obligasi dalam negeri melanjutkan tren penurunan keseluruhan yang terjadi selama tahun 2017 (Gambar A.32). Namun demikian, arah lintasannya mendatar dan imbal hasil untuk obligasi dengan tenor 10 tahun turun 15 basis poin, dibandingkan dengan 30 basis poin di Triwulan ke-3. Untuk tahun ini, imbal hasil tersebut turun, secara rata-rata dan di semua tenor, sekitar 150 basis poin. Selisih (*spread*) antara imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia dan imbal hasil 10 tahun AS menyempit ke titik terendah selama hampir 4 tahun terakhir pada Triwulan ke-4 karena imbal hasil di Amerika Serikat mulai meningkat seiring dengan berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter oleh *Federal Reserve AS*.

Gambar A.32: Selisih (*spread*) antara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan imbal hasil obligasi pemerintah AS telah menyempit secara signifikan



Telah terjadi peningkatan imbal hasil obligasi Indonesia di awal tahun 2018 – sebagian besar merupakan cerminan dari volatilitas yang lebih luas di pasar keuangan global. Terlepas dari semakin menyempitnya selisih antara imbal hasil obligasi AS dan Indonesia dan mengingat bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, imbal hasil Indonesia kemungkinan akan tetap menarik bagi investor.

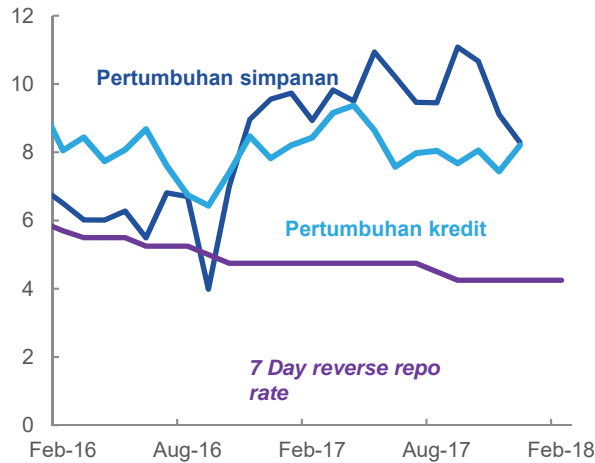
Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil di Triwulan ke-4

Setelah dua kali penurunan suku bunga yang mengejutkan di Triwulan ke-3, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya stabil sebesar 4,25 persen di Triwulan ke-4. BI mengacu pada peningkatan kondisi ekonomi global dan pelonggaran di Triwulan ke-3 sebagai alasan untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil⁴⁹. Meskipun pelonggaran kebijakan moneter sebesar 200 bps kumulatif selama 2 tahun terakhir, pertumbuhan kredit dan simpanan tetap rendah, dengan pertumbuhan kredit tidak meningkat secara substansial dan pertumbuhan simpanan tidak menurun secara signifikan (Gambar A.33).

Pertumbuhan kredit rata-rata 8,2 persen pada tahun 2017 – sedikit lebih tinggi dari 7,9 persen yang tercatat pada tahun 2016. Oleh karena pertumbuhan yang kurang bergairah ini, kisaran target pertumbuhan kredit BI pada tahun 2017 direvisi turun dari 10 – 12 persen menjadi 8 – 10 persen pada bulan November 2017. Namun demikian, pertumbuhan investasi tetap mempertahankan arah lintasannya ke atas di

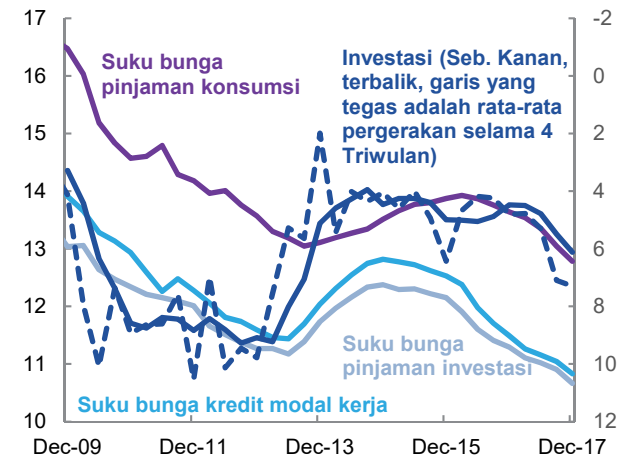
⁴⁹ Bank Indonesia (2017).

Gambar A.33: Siklus pelonggaran kebijakan moneter dihentikan di Triwulan ke-4 (persen)



Sumber: CEIC; Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.34: Kebijakan moneter tampaknya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan investasi (persen)



Sumber: CEIC; Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia

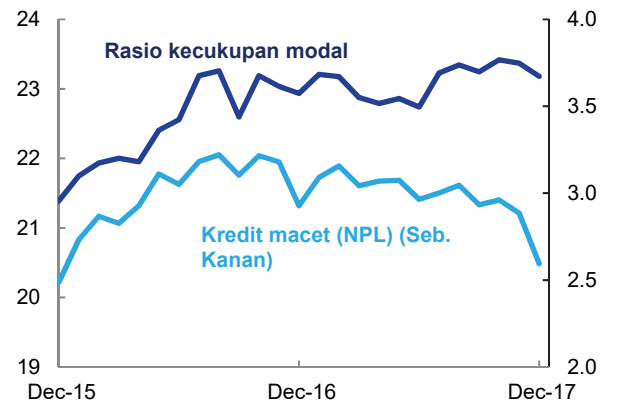
Triwulan ke-4 yang menunjukkan bahwa investasi, setidaknya sebagian, dibiayai oleh pinjaman non-bank. (Gambar A.34).

Sektor perbankan tetap sehat, dengan NPL yang nampak menurun

Rasio kredit macet di Triwulan ke-4 tahun 2017 turun ke rasio terakhir yang terjadi di Triwulan ke-4 tahun 2015 (Gambar A.35). Hasil ini sejalan dengan tren penurunan secara keseluruhan di tahun 2017 dan adanya sinyal bahwa masalah kualitas pinjaman terus menurun. Rasio kecukupan modal tetap stabil di Triwulan ke-4, yang bertahan di sekitar 23 persen, menunjuk pada sistem permodalan perbankan yang baik.

Kedua ukuran tersebut biasanya dikaitkan dengan sistem perbankan yang sehat.

Gambar A.35: Rasio Kredit Macet (NPL) sudah mulai menurun oleh karena adanya konsolidasi neraca oleh bank pada tahun 2017 (persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

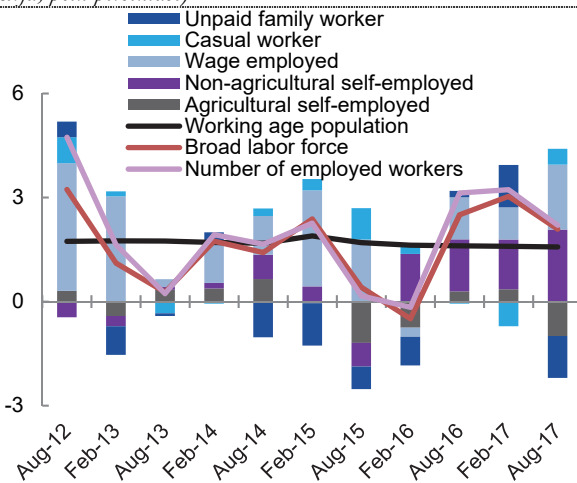
7. Tingkat pekerjaan terus meningkat, tetapi pertumbuhan penghasilan telah menurun tajam

Tingkat pekerjaan naik menjadi 63,0 persen pada Agustus 2017 seiring dengan pertumbuhan lapangan kerja yang melampaui pertumbuhan tenaga kerja

Tingkat tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan meningkat menjadi 63,0 persen pada bulan Agustus 2017, naik dari 62,6 persen pada bulan Agustus 2016.⁵⁰ Terdapat 121,0 juta orang yang dipekerjakan di Indonesia pada bulan Agustus 2017, dengan jumlah pekerja yang tumbuh sebesar 2,2 persen selama tahun sebelumnya.⁵¹ Terlihat adanya perlambatan dalam pertumbuhan lapangan kerja dibandingkan dengan tahun 2016 hingga bulan Agustus, ketika jumlah pekerja bertumbuh sebesar 3,1 persen. Namun demikian, pertumbuhan lapangan kerja terus melebihi pertumbuhan angkatan kerja – yang tumbuh sebesar 2,1 persen – dan pertumbuhan dalam jumlah penduduk usia kerja – yang tumbuh sebesar 1,6 persen – antara bulan Agustus 2016 dan bulan Agustus 2017 (Gambar A.36).⁵²

Gambar A.36: Pertumbuhan lapangan kerja melambat, tetapi terjadi pergeseran dari pekerjaan keluarga yang tidak dibayar dan wirausaha pertanian ke arah pekerjaan berupah dan pekerjaan mandiri non-pertanian

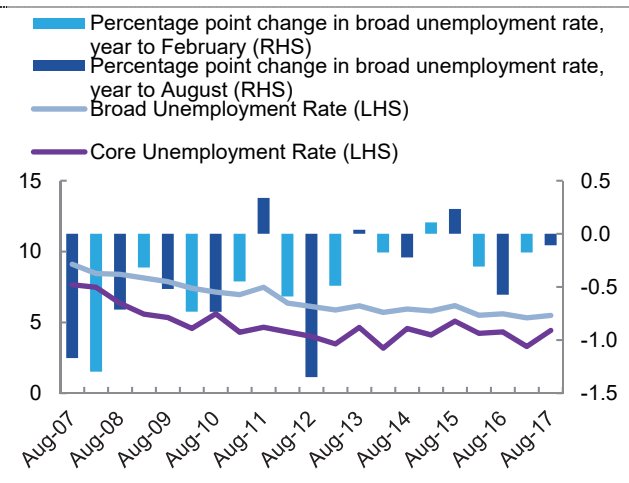
(pertumbuhan dalam pekerjaan, angkatan kerja, dan penduduk usia kerja, poin persentase)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Gambar A.37: Pengangguran secara luas terus menurun, tetapi tingkat pengangguran inti sedikit meningkat

(tingkat pengangguran, persen, Seb. Kiri; perubahan tingkat pengangguran, poin persentase, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Di tahun 2017 hingga bulan Agustus juga terjadi penurunan kecil dalam tingkat pengangguran secara luas, yang turun dari 5,6 persen menjadi 5,5 persen, tetapi tingkat pengangguran inti menunjukkan sedikit kenaikan, naik dari 4,3 persen menjadi 4,4

⁵⁰ Tingkat pekerjaan adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Nilainya yang tercatat cenderung lebih tinggi pada Sakernas bulan Februari daripada Sakernas bulan Agustus.

⁵¹ Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS).

⁵² Sesuai dengan konvensi BPS, ‘usia kerja’ didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia 15 tahun atau lebih.

persen (Gambar A.37).⁵³ Secara bersama-sama, hasil ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengetatan pasar tenaga kerja pada tahun 2016 dan berlanjut ke awal tahun 2017, tetapi cenderung pada kecepatan yang lebih lambat.

Perbedaan gender di dalam kepesertaan angkatan kerja dan tingkat lapangan kerja melebar

Menurunnya kesenjangan gender yang besar dalam tingkat pekerjaan yang terjadi di tahun sebelumnya sebagian berbalik pada tahun 2017 hingga bulan Agustus. Tingkat pekerjaan untuk perempuan bergerak dari 48,0 persen menjadi 48,1 persen, sementara tingkat pekerjaan untuk laki-laki bergerak dari 77,3 persen menjadi 77,9 persen. Kesenjangan gender dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*, LFPR), menurut definisi luas, juga meningkat di tahun 2017 ini hingga bulan Agustus. Secara keseluruhan, LFPR secara luas adalah sebesar 66,7 persen pada bulan Agustus 2017, naik dari 66,3 persen pada bulan Agustus tahun 2016. Sementara LFPR secara luas untuk wanita naik sedikit dari 50,8 persen menjadi 50,9 persen, LFPR secara luas untuk laki-laki naik lebih tinggi, bergerak dari 82,0 persen menjadi 82,5 persen.

Pertumbuhan lapangan kerja bergeser ke arah pekerjaan upahan dan pekerjaan mandiri non-pertanian

Pekerja upahan merupakan 39,7 persen dari semua pekerja pada bulan Agustus 2017, dengan pekerjaan upahan yang bertumbuh sebesar 4,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini secara signifikan lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2016 hingga bulan Agustus, ketika jumlah pekerja upahan meningkat 3,1 persen. Tahun 2017 hingga bulan Agustus juga terjadi pertumbuhan pekerja mandiri non-pertanian sebesar 9,7 persen – naik dari 7,3 persen di tahun sebelumnya – dengan proporsi pekerja tersebut yang mencapai 22,9 persen, tingkat yang tertinggi sejak tahun 2011. Pada saat yang sama, proporsi pekerja keluarga yang tidak dibayar dan pekerja mandiri pertanian mencapai tingkat terendah,⁵⁴ dengan jumlah pekerja tersebut yang masing-masing turun sebesar 8,8 persen dan 6,3 persen. Pertumbuhan pekerjaan upahan yang diperbarui dan penurunan pekerjaan keluarga yang tidak dibayar serta pekerja mandiri pertanian secara parsial menandai kembalinya penciptaan pekerjaan formal yang tinggi yang terjadi antara tahun 2010 dan 2015, meskipun hal tersebut telah diimbangi oleh semakin pentingnya pekerjaan mandiri non-pertanian.

Sektor manufaktur menciptakan 1,5 juta pekerjaan, sementara transisi untuk keluar dari sektor pertanian jadi lebih cepat

Pada bulan Agustus 2017, 48,1 persen pekerja bekerja di sektor jasa, naik dari 46,7 persen di tahun sebelumnya (Gambar A.38). Selama periode yang sama, proporsi pekerja di sektor industri meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2015, naik dari 21,4 persen menjadi 22,3 persen. Ini sebagian besar disebabkan oleh penciptaan 1,5 juta pekerjaan di sektor manufaktur. Untuk mengakomodasi hal ini, proporsi pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan tahun-ke-tahun (*yo-yo*) yang terbesar sejak tahun 2004, turun dari 31,9 persen menjadi 29,7 persen. Hal ini mencerminkan terjadinya percepatan dalam transisi tenaga kerja Indonesia yang keluar dari sektor pertanian dan memasuki sektor jasa dan industri, meskipun masih harus dilihat apakah

⁵³ Berdasarkan definisi pengangguran 'inti', para penganggur adalah mereka yang tidak bekerja, tetapi yang aktif mencari pekerjaan. Definisi pengangguran 'secara luas' mencakup para penganggur inti, serta pekerja yang sudah kehilangan harapan, mereka yang membangun bisnis baru, dan mereka yang memiliki pekerjaan di masa depan yang sedang diatur. Tingkat pengangguran inti dan secara luas bergerak ke arah yang berbeda karena, sementara terdapat hampir 260.000 pencari kerja baru yang memasuki angkatan kerja pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, jumlah pekerja yang sudah kehilangan harapan – yang dihitung di dalam perhitungan pengangguran secara luas tetapi bukan penganggur inti – turun sekitar 380.000.

⁵⁴ Pada bulan Agustus 2017, pekerja keluarga yang tidak dibayar dan pekerja mandiri pertanian masing-masing meliputi 12,3 persen dan 14,3 persen dari semua orang yang bekerja.

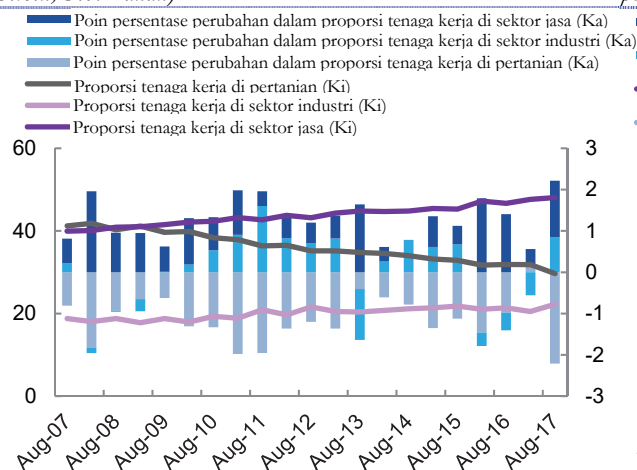
peningkatan yang jelas dalam laju transformasi struktural ini akan bertahan atau tidak.⁵⁵

Pertumbuhan penghasilan riil tetap positif, tetapi menurun jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Penghasilan rata-rata untuk pekerja upahan meningkat sebesar 3,5 secara riil dan 7,4 persen secara nominal pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, yang mengisyaratkan berakhirnya pertumbuhan upah sebanyak dua digit yang diamati dalam survei Sakernas sebelumnya pada Agustus 2016 dan Februari 2017 (Gambar A.39). Penghasilan rata-rata untuk pekerja upahan juga naik sebesar 4,3 persen secara riil dan 5,0 persen nominal, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan upah telah turun di semua sektor.⁵⁶ Ini memberikan bukti tambahan bahwa pengetatan pasar tenaga kerja yang terjadi selama tahun 2016 dan awal 2017 sekarang mungkin telah berkurang.⁵⁷

Gambar A.38: Para pekerja beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri

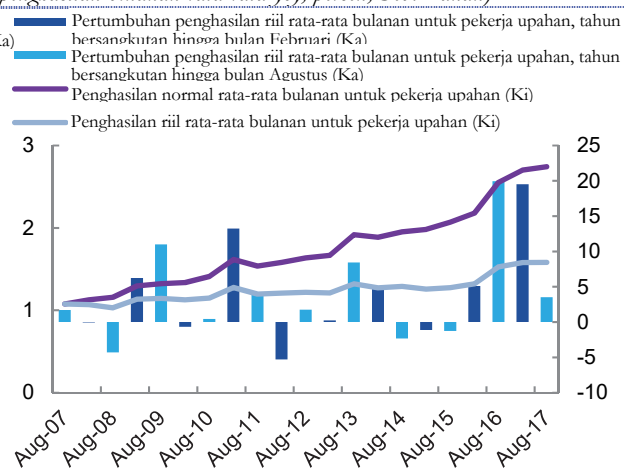
(proporsi pekerja yang dipekerjakan, persen, Seb. Kiri; persentase perubahan poin dalam proporsi pekerja yang dipekerjakan yoy, persen, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Gambar A.39: Pertumbuhan penghasilan riil rata-rata untuk pekerja upahan menurun tajam pada tahun 2017 hingga bulan Agustus

(penghasilan, miliar Rupiah, Seb. Kiri; persentase pertumbuhan penghasilan bulanan rata-rata yoy, persen, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

⁵⁵ Antara bulan Agustus 2007 dan Agustus 2016, proporsi pekerja di sektor jasa dan industri meningkat, rata-rata sebesar 0,9 dan 0,3 poin persentase per tahun, sementara proporsi pekerja di sektor pertanian turun sebesar 1,2 poin persentase per tahun. Dengan demikian, perubahan yang diamati pada tahun 2017 hingga bulan Agustus – ketika proporsi pekerja di sektor jasa dan industri tumbuh masing-masing sebesar 1,4 dan 0,8 poin persentase dan proporsi pekerja di sektor pertanian turun sebesar 2,2 poin persentase – jauh melebihi kecenderungan yang terjadi selama dasawarsa terakhir.

⁵⁶ Jika penghasilan pekerja mandiri dan pekerja harian/lepas – satu-satunya pekerja lain yang penghasilannya tercakup dalam Sakernas – dimasukkan, pertumbuhan penghasilan rata-ratanya adalah 2,5 persen secara riil dan 6,4 persen secara nominal. Pertumbuhan rata-rata penghasilan untuk sampel yang diperluas ini adalah sebesar 2,7 persen secara riil dan 12,0 persen secara nominal. Perbedaan antara pertumbuhan rata-rata penghasilan secara riil dan pertumbuhan rata-rata penghasilan secara nominal tidak selalu sesuai dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) rata-rata karena data penghasilan dikecilkan dengan menggunakan IHK kota, di mana pengamatannya dapat dilakukan kembali dalam tahun yang sama.

⁵⁷ Perubahan metodologi terhadap survei Sakernas, yang dijelaskan dalam Laporan Triwulanan edisi bulan Oktober 2017, harus tetap dipertimbangkan ketika melakukan perbandingan penghasilan antar waktu. Formulasi baru dari pertanyaan mengenai penghasilan yang dimasukkan di dalam Sakernas bulan Februari 2017 tetap dipertahankan untuk Sakernas bulan Agustus 2017.

Pertumbuhan penghasilan lebih tinggi di sektor industri daripada di sektor jasa atau pertanian

Meskipun terjadi perlambatan, pertumbuhan penghasilan paling tinggi adalah di sektor industri, di mana penghasilan rata-rata untuk pekerja upahan meningkat sebesar 6,0 persen secara riil pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, memberikan satu alasan potensial untuk pertumbuhan dalam pekerjaan di sektor industri sebagaimana dijelaskan di atas. Selama periode yang sama, penghasilan riil rata-rata untuk pekerja upahan di sektor pertanian dan jasa tumbuh masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,5 persen.⁵⁸ Dengan demikian, tahun 2017 hingga bulan Agustus mengalami perataan kurva insiden pertumbuhan untuk penghasilan riil dibandingkan dengan tahun 2016 hingga bulan Agustus, yang berarti bahwa pertumbuhan penghasilan turun lebih banyak untuk kelompok berpenghasilan rendah daripada kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, penurunan pertumbuhan penghasilan belum dirasakan secara merata di seluruh perekonomian Indonesia.

8. Penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi dalam empat tahun terakhir

Kemiskinan menurun tajam di bulan September 2017

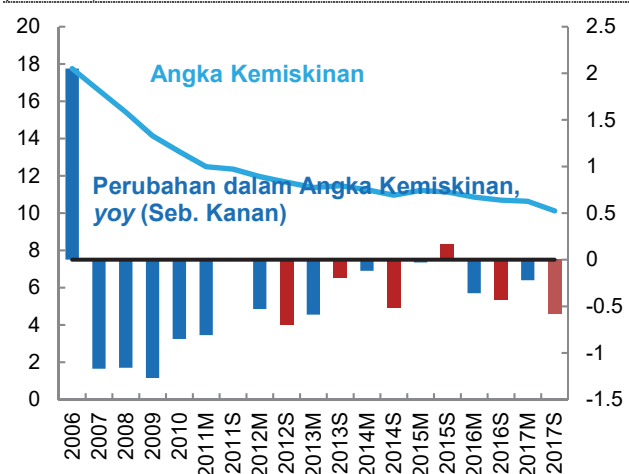
Angka kemiskinan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bulan September 2017 adalah 10,1 persen, atau turun 0,6 poin persentase dari bulan September 2016 (Gambar A.40). Ini adalah penurunan besar dalam angka kemiskinan, penurunan yoy yang terbesar sejak bulan Maret 2013. Namun demikian, tingkat pengentasan kemiskinan ini masih lebih lambat dibandingkan dengan yang dicapai Indonesia antara tahun 2007 dan tahun 2011, di mana angka kemiskinan turun rata-rata sebesar 1,1 poin persentase setiap tahunnya. Secara absolut, terdapat 26,6 juta orang miskin di bulan September 2017, atau 1,2 juta lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Angka kemiskinan menurun meskipun terjadi peningkatan garis kemiskinan yang lebih besar

Penurunan angka kemiskinan yang cukup besar ini terjadi meskipun ada peningkatan garis kemiskinan yang relatif lebih besar. Peningkatan garis kemiskinan untuk bulan September 2016 - September 2017 adalah sebesar 7 persen, dari Rp 361.990 menjadi Rp 387.160. Ini lebih besar dari peningkatan yang terjadi untuk bulan Maret 2016 - Maret 2017 (5,7 persen) dan bulan September 2015 - September 2016 (5 persen).

Gambar A.40: Angka kemiskinan di bulan September 2017 mengalami penurunan terbesar sejak bulan Maret 2013

(tingkat kemiskinan, persen; perubahan dalam kemiskinan, poin persentase)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas

⁵⁸ Pada tahun 2016 hingga bulan Agustus, pertumbuhan penghasilan riil rata-rata untuk pekerja upahan adalah 20,3 persen di sektor pertanian, 21,3 persen di sektor industri, dan 18,1 persen di sektor jasa.

Peningkatan ini sedikit didorong oleh komponen makanan dari garis kemiskinan (7,2 persen) dibandingkan dengan komponen non-makanan (6,3 persen)⁵⁹.

Perubahan metodologi mungkin turut mempengaruhi besarnya penurunan tingkat kemiskinan

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2017, yang digunakan untuk menghasilkan data tingkat kemiskinan pada bulan September 2017, mengalami perubahan metodologi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara khusus, jumlah komoditas pangan yang dimasukkan di dalam modul konsumsi berkurang dari 222 menjadi 174. Sebelum perubahan ini, kuesioner modul konsumsi Susenas telah diubah sebanyak dua kali dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Maret 2015, kuesioner berubah dari 215 item makanan dan 108 item non-makanan menjadi 112 item makanan dan 116 item non-makanan⁶⁰. Pada bulan September 2016, terdapat penyesuaian lebih lanjut untuk 222 item makanan dan 116 item non-makanan. Selama periode ini, perubahan metodologi mungkin telah mempengaruhi perhitungan untuk garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang digunakan untuk menilai status kemiskinan rumah tangga, termasuk peningkatan yang besar terhadap garis kemiskinan yang disebutkan sebelumnya. Namun demikian, sejauh mana dampaknya belum diketahui.

Angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan menurun dalam besaran yang sama

Angka kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan turun dengan besaran yang sama, dengan penurunan angka kemiskinan perkotaan dan pedesaan sebesar 0,5 poin persentase antara bulan September 2016 dan 2017. Namun demikian, dalam hal jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin perkotaan hanya turun sebesar 220.000 orang, sementara jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebesar 970.000 orang. Ini terjadi karena selama periode waktu tersebut, jumlah penduduk pedesaan menyusut 2,7 juta orang, sementara penduduk perkotaan meningkat sebesar 5,8 juta. Ini merupakan kelanjutan pengamatan Bank Dunia (2017b) bahwa meningkatnya urbanisasi mengubah wajah kemiskinan di Indonesia.

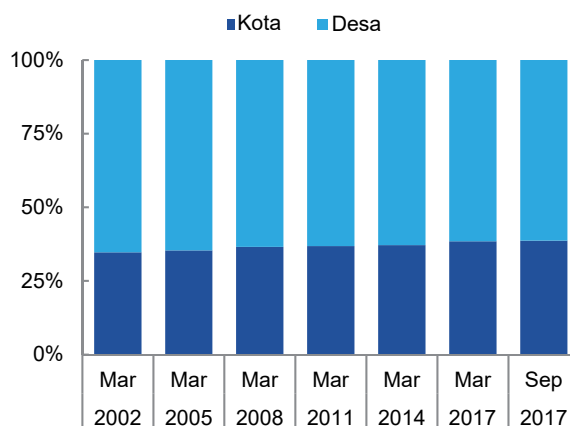
⁵⁹ Ini tampaknya bertentangan dengan fakta bahwa inflasi harga makanan antara bulan Oktober 2016 dan September 2017 adalah yang terendah dari tiga periode tersebut. Namun demikian, hal ini dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam kelompok barang yang digunakan untuk mengukur inflasi IHK dan kelompok yang digunakan untuk mengukur konsumsi untuk tingkat kemiskinan, serta perubahan yang terjadi dalam kelompok kemiskinan dari periode ke periode. Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan referensi jumlah penduduk yang 20 persen yang berada di atas garis kemiskinan pada periode sebelumnya, sehingga kelompok kemiskinan akan selalu berubah berdasarkan apa yang dikonsumsi oleh kelompok yang “tidak begitu miskin.”

⁶⁰ Lihat World Bank (2015b).

Selama 15 tahun terakhir, kemiskinan secara perlahan-lahan lebih menjadi fenomena perkotaan

Pengamatan terhadap tren jangka panjang dalam kemiskinan menunjukkan adanya pergeseran yang lambat ke arah “urbanisasi kemiskinan”. Pada bulan Maret 2002, 34,7 persen penduduk miskin tinggal di daerah perkotaan. Hingga bulan September 2017, pangsa tersebut telah meningkat menjadi 38,6 persen (Gambar A.41). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kecenderungan global yang lebih luas dari migrasi dari desa ke kota, yang terjadi ketika orang mencari peluang kerja yang lebih baik dan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan di daerah perkotaan. Ke depan, upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan harus mempertimbangkan sifatnya yang semakin urban.

Gambar A.41: Kemiskinan secara perlahan-lahan bergeser ke perkotaan dalam 15 tahun terakhir
(persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan)



Sumber: IDR: Susenas

Koefisien Gini juga sedikit menurun, yang sebagian besar didorong oleh pertumbuhan kelompok 40 di Tengah daripada kelompok 40 Terbawah

Koefisien Gini untuk bulan September 2017 adalah 39,1, yang merupakan penurunan kecil sebesar 0,3 poin dibandingkan dengan bulan September 2016. Sepanjang tahun lalu, penduduk yang berada di kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen di Tengah mengalami sedikit peningkatan dalam proporsi total konsumsi nasional mereka (Tabel A.3). Namun demikian, seperti pada periode-periode sebelumnya, pengurangan ketimpangan sebagian besar didorong oleh pertumbuhan kelompok 40 persen di Tengah dan bukan kelompok 40 persen terbawah. Ini bukanlah masalah Indonesia saja: tingkat ketimpangan untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik secara agregat meningkat antara tahun 1998 dan 2012, sebagian besar karena kelompok 40 persen terbawah di kawasan ini stagnan⁶¹. Dengan demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membuat kesejahteraan terdistribusi lebih merata bagi rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia.

Tabel A.3: Peningkatan kecil dari pangsa konsumsi dari masyarakat yang berada di 40 persen Terbawah dan 40 persen di Tengah menyebabkan sedikit penurunan dalam koefisien Gini

(pangsa dari konsumsi nasional, persen)

Periode	40 persen Terbawah	40 persen di Tengah	20 persen Teratas
Sep 2015	17,45	34,70	47,85
Sep 2016	17,11	36,33	46,56
Sep 2017	17,22	36,66	46,12
Δ 2015-2016	-0,34	+1,63	-1,29
Δ 2016-2017	+0,11	+0,33	-0,44
Δ 2015-2017	-0,23	+1,96	-1,73

Sumber: Susenas

9. Perkiraan perekonomian dan risiko

Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan mencapai rata-

Perkiraan perekonomian tetap positif dengan perekonomian Indonesia yang diproyeksikan akan meningkat rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun untuk tahun 2018-2020, oleh karena adanya peningkatan permintaan dalam negeri didorong oleh

⁶¹ World Bank (2018a).

rata 5,3 persen dalam Pemilu mendatang serta kondisi keuangan global dan dalam negeri yang relatif jangka menengah mendukung (Tabel A.4). Namun demikian, ekspor bersih akan terus mendukung pertumbuhan perekonomian karena pertumbuhan investasi yang sarat barang impor tetap tinggi, juga berkat adanya penyederhanaan proses impor yang terus berlangsung (Kotak A.2).

Tabel A.4: Indikator perekonomian utama
(pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain)

	Pertumbuhan Tahunan			Perubahan dari
	2017	2018f	2019f	IEQ edisi Desember 2017
1. Indikator perekonomian utama				
Produk Domestik Bruto (PDB)	5,1	5,3	5,3	0,0
Pengeluaran konsumsi pribadi	5,0	5,1	5,2	0,0
Konsumsi pemerintah	2,1	4,0	4,5	0,5
Pembentukan modal tetap bruto	6,2	6,0	5,7	-0,1
Ekspor barang dan jasa	9,1	7,0	6,0	1,0
Impor barang dan jasa	8,1	7,0	6,0	1,4
2. Indikator perekonomian lainnya				
Indeks Harga Konsumen	3,8	3,5	3,7	0,0
Neraca transaksi berjalan (% dari PDB)	-1,7	-1,9	-2,1	-0,1
3. Asumsi Ekonomi				
Nilai tukar (Rp/USD)	13.381	13.550	13.750	50
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bl)	51	56	57	-0

Sumber: BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Angka untuk tahun 2017 adalah hasil aktual. P singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan dalam persediaan tidak disajikan di dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terbaru. Nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Perubahan relatif terhadap proyeksi pada IEQ edisi Desember 2017.

Konsumsi pribadi diproyeksikan dapat meningkat secara bertahap dengan inflasi yang rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat

Secara empiris, tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah telah diketahui menjadi penggerak struktural pertumbuhan konsumsi, dengan efek yang kadang-kadang meningkat setelah beberapa triwulan. Inflasi yang rendah saat ini tetapi dengan nilai tukar yang melemah oleh karenanya memiliki efek yang berlawanan, yang secara keseluruhan menciptakan efek yang ambigu/tidak pasti pada pertumbuhan konsumsi pribadi ke depan. Namun demikian, pengeluaran pada Pemilu mendatang dan harga komoditas yang lebih baik diperkirakan akan memberikan dorongan independen, yang mengakibatkan adanya peningkatan yang tidak terlalu tinggi dalam pertumbuhan konsumsi pribadi selama dua tahun ke depan. Sementara itu, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat saat ini bersama dengan transformasi struktural yang terus berlanjut dari pangsa pekerjaan yang menyusut di sektor pertanian, dan perluasan berbagai program pemerintah⁶², semuanya juga diperkirakan akan berkontribusi terhadap konsumsi pribadi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap tinggi, didukung oleh

Meskipun diproyeksikan adanya sedikit penurunan, karena beberapa investor potensial mengadopsi pendekatan “wait-and-see” mengingat Pemilu mendatang, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan akan tetap tinggi, konsisten dengan kinerjanya dalam beberapa triwulan terakhir. Faktor-faktor pendukungnya antara lain kenaikan harga komoditas global secara bertahap, biaya

⁶² Contoh dari program pemerintah tersebut antara lain perluasan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 hingga 10 juta rumah tangga, program bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program pembangunan padat karya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.

**infrastruktur
investasi yang baik
dan PMA yang
tinggi**

pendanaan rendah yang berkelanjutan setidaknya dalam jangka pendek, pulihnya sentimen bisnis, dorongan yang terus-menerus pada investasi infrastruktur serta penanaman modal asing (PMA) yang melonjak.

Kotak A.2: Perubahan terbaru dalam kebijakan perdagangan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah reformasi perdagangan yang signifikan selama triwulan terakhir ini.

Pergeseran ke pemeriksaan post-border (pemeriksaan yang dilakukan setelah barang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia – pent.) untuk mempercepat proses pengeluaran barang di bea cukai

Dalam upaya untuk memfasilitasi pemrosesan impor dan ekspor, pemerintah telah memindahkan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengimpor sejumlah produk dari pemeriksaan di perbatasan ke pemeriksaan *post-border* (pemeriksaan yang dilakukan setelah barang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia – pent.). Langkah tersebut sejauh ini telah diterapkan pada lebih dari 2.000 produk yang termasuk dalam daftar barang yang terkena larangan dan/atau pembatasan, yang disebut sebagai “Lartas (larangan dan/atau pembatasan)”, terutama melalui serangkaian peraturan Kementerian Perdagangan yang baru. Daftar ini terdiri dari 5.229 produk (hampir setengah dari semua produk yang mungkin sesuai dengan klasifikasi 8-digit HS 2017), yang tunduk pada persyaratan impor yang paling ketat.

Reformasi tersebut – yang telah diumumkan di bulan Juni lalu melalui paket kebijakan ekonomi no. XV⁶³ - harus memfasilitasi proses impor karena akan mempercepat proses pengeluaran barang di bea cukai, yang akan menjadi otomatis. Mengingat persyaratan dokumen yang membebani terkait dengan impor dari banyak produk “Lartas”, potensi keuntungan dalam hal biaya dan penghematan waktu sangatlah besar. Pada saat yang sama, pendekatan baru ini menghadirkan banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Pertama, diperlukan adanya harmonisasi peraturan di berbagai kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan perizinan untuk mengimpor produk-produk tersebut, sehingga pemeriksaan dokumen-dokumen untuk produk tersebut dipindahkan ke pemeriksaan *post-border*. Pada saat penulisan dokumen ini dilakukan, proses ini masih sedang berjalan dan beberapa barang yang pemeriksaannya telah dialihkan ke pemeriksaan *post-border* oleh satu Kementerian masih harus diverifikasi di perbatasan oleh kementerian-kementerian lainnya.

Kedua, ada kebutuhan untuk membangun kapasitas pemeriksaan *post-border* di dalam Kementerian yang bertanggung jawab untuk memeriksa perizinan impor yang terkait di lokasi pabrik. Ini adalah tugas baru yang berpotensi memberatkan bagi Kementerian, yang di masa lalu telah mendelegasikan pemeriksaan yang dipersyaratkan ini kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di perbatasan, dan pada akhirnya harus mengirim pegawai mereka sendiri ke seluruh pelosok nusantara untuk melakukan inspeksi yang memakan waktu di pabrik dan kawasan komersial lainnya. Beberapa bentuk teknik manajemen risiko – yang baru bagi kementerian ini – kemungkinan harus dilakukan untuk memfokuskan pemeriksaan tersebut pada kasus-kasus yang paling berisiko. Selain itu, pemeriksaan tersebut – yang dapat terjadi hingga 3 tahun setelah impor barang dilakukan – dapat menjadi peluang untuk melakukan korupsi jika tidak disediakan suatu sistem insentif yang memadai bagi para pemeriksa untuk melawan risiko tersebut.

Penyederhanaan persyaratan dokumen untuk impor

Dalam reformasi yang terkait erat, pemerintah juga telah berupaya menyederhanakan dan merasionalisasi persyaratan dokumen impor pada beberapa barang Lartas dalam dua cara. Pertama, Kementerian Perdagangan telah menghapuskan beberapa izin impor untuk produk tertentu, seperti semen dan produk terkait, dan telah mengurangi jumlah dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan impor, seperti Akta Pendirian pada impor jagung, rekomendasi teknis oleh kementerian lini untuk mengimpor produk seperti ban, jagung, besi, baja dan produk-produk terkait. Kedua, pemerintah telah mengurangi duplikasi yang ada di antara berbagai kementerian dan lembaga yang mensyaratkan dokumen pendukung yang sama untuk mengeluarkan perizinan untuk mengimpor barang yang sama.

Kewajiban penggunaan perusahaan pengapalan dan perusahaan asuransi dalam negeri

Selain dari reformasi di atas, yang menjanjikan untuk secara substansial memfasilitasi perdagangan jika dilaksanakan dengan tepat, pemerintah telah menerapkan reformasi perdagangan yang lebih kontroversial lagi. Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yang mulai bulan April 2018 akan memaksa eksportir minyak sawit mentah (CPO) dan batubara serta importir beras dan pengadaan barang pemerintah untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia

⁶³ The Jakarta Post (15 Juni 2017).

dan untuk mengasuransikan produk mereka yang diperdagangkan dari perusahaan Indonesia. Tujuan yang diarah adalah untuk mendorong industri pelayaran dan asuransi dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan yang besar, terutama dalam jasa angkutan. Meskipun dampaknya terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan pelayaran dalam negeri tidak jelas, ketika perusahaan pelayaran dalam negeri sudah beroperasi pada kapasitas penuh atau hampir penuh, langkah ini dapat meningkatkan biaya impor dan ekspor barang-barang tersebut secara substansial karena pasokan jasa pengiriman untuk produk ini akan menyusut. Ini pada gilirannya dapat menaikkan harga dari layanan jasa ini sekaligus mengurangi kualitas mereka karena persaingan yang lebih rendah. Memang ada kekhawatiran di kalangan eksportir komoditas bahwa armada Indonesia tidak dapat mengakomodasi volume ekspor batubara dan CPO saat ini.

Risiko terhadap perkiraan perekonomian termasuk perdagangan global yang lebih lambat, ...

Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Di sisi eksternal, dengan proteksionisme yang meningkat, ada risiko bahwa pemulihan yang baru berlangsung dalam perdagangan global dapat terhenti, yang menghambat ekspor Indonesia dan oleh karenanya menghambat pertumbuhan pula.

...gejolak keuangan

Meskipun normalisasi kebijakan moneter AS sedang berlangsung secara bertahap, inflasi yang lebih cepat dari perkiraan dapat memicu kontraksi moneter yang tidak terduga, yang mengakibatkan terjadinya gejolak arus keluar modal yang dari negara-negara berkembang. Selain itu, sejumlah pasar ekuitas saat ini dianggap terlalu tinggi nilainya, dan kemungkinan terjadinya koreksi penilaian, seperti yang terjadi di pasar saham AS awal tahun ini, tetap ada dalam waktu dekat ini. Terdapat risiko bahwa koreksi penilaian seperti itu dapat menyebabkan gejolak keuangan dan lonjakan imbal hasil obligasi, dan secara tiba-tiba meningkatkan biaya pembiayaan untuk negara-negara berkembang.

... dan menurunnya konsumsi pribadi

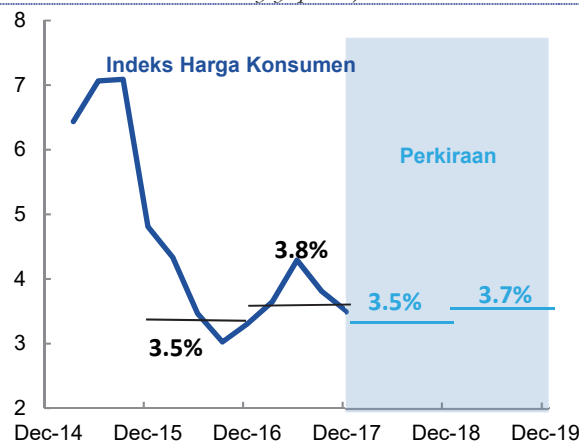
Sementara konsumsi pribadi meningkat di Triwulan ke-4, tetap ada risiko bahwa konsumsi pribadi ini tetap lesu atau bahkan melemah dalam jangka menengah. Mengingat bahwa konsumsi pribadi merupakan lebih dari separuh PDB, perlambatan dalam konsumsi pribadi dapat menimbulkan dampak pada total pengeluaran.

Inflasi IHK diperkirakan terjaga

Inflasi diharapkan berada pada rata-rata 3,5 persen di 2018, tetapi risiko terhadap perkiraan inflasi lebih ke arah positif (*upside*)

Meskipun inflasi harga makanan meningkat di akhir tahun 2017 dan di awal tahun 2018, inflasi umum diperkirakan rata-rata sebesar 3,5 persen di tahun 2018, lebih rendah daripada tahun 2017, dan karena itu mendukung konsumsi pribadi dan menciptakan ruang yang lebih bagi penerapan kebijakan moneter yang stabil. (Gambar A.42). Perkiraan *baseline* mengasumsikan kenaikan harga minyak mentah dan

Gambar A.42: Ketidakstabilan harga pangan yang sudah diantisipasi diperkirakan belum mempengaruhi perkiraan perekonomian
(perubahan rata-rata tahunan yoy, persen)



Sumber: BPS; perkiraan Bank Dunia

beberapa efek inflasi dari pemilihan kepala daerah tahun ini dan pemilu di tahun 2019. Risiko terhadap perkiraan inflasi tetap tinggi terutama mengingat kecenderungan harga minyak internasional dan beberapa ketidakpastian mengenai apakah kekurangan pasokan beras dapat sepenuhnya diatasi melalui peningkatan impor.

Nilai tukar perdagangan diperkirakan akan melemah dan defisit neraca transaksi berjalan akan sedikit meningkat

Nilai tukar perdagangan komoditas utama Indonesia menutup tahun 2017 pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari tahun 2016, tetapi diperkirakan akan menurun di tahun 2018

Bank Dunia memproyeksikan bahwa harga karet, minyak mentah, LNG, minyak kelapa sawit, dan logam dasar akan naik pada tahun 2018 dan 2019, sementara harga batubara diperkirakan akan turun⁶⁴ (Tabel A.5). Harga minyak diperkirakan akan naik menjadi USD 58/bbl pada tahun 2018 dari USD 53/bbl di tahun 2017, karena permintaan yang tinggi dan berlanjutnya pengendalian produksi negara-negara OPEC dan non-OPEC.⁶⁵ Harga batubara diperkirakan turun ke USD 70/mt di tahun 2018 dari USD 85/mt di tahun 2017, karena permintaan yang turun, terutama dari Cina di mana inisiatif ramah lingkungan sedang dilakukan untuk mengurangi konsumsi batubara^{66,67} (Gambar A.43).

Karena Indonesia adalah pengeksport batu bara bersih dan pengimpor minyak bersih, perkiraan pergerakan harga batubara dan minyak menyiratkan fluktuasi yang signifikan dalam nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*, ToT)⁶⁸. Negara ini. Mengingat harga rata-rata di tahun 2017 dari enam komoditas lebih tinggi daripada di tahun 2016, Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih untuk tahun 2017 jauh lebih tinggi daripada di tahun 2016. Namun demikian, sejalan dengan perkiraan harga, Indeks tahun 2018 diproyeksikan akan lebih rendah dari tahun 2017, meskipun masih sedikit lebih tinggi dari tingkat di tahun 2016. Turunnya indeks tahun 2018 masih terlihat

⁶⁴ World Bank (2017d).

⁶⁵ Pasar minyak semakin ketat karena stok minyak mentah negara-negara OECD turun rata-rata 630 kb/hari dalam tiga triwulan berturut-turut, Triwulan ke-2 tahun 2017-Triwulan ke-4 tahun 2017. Kondisi seperti ini hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah modern, termasuk di tahun 1999 (harga meningkat dua kali lipat), 2009 (harga meningkat hampir USD 20/bbl), dan 2013 (harga meningkat sebesar USD 6/bbl). Di sisi lain, OPEC melaporkan kepatuhan yang tinggi terhadap pengurangan OPEC yang disetujui sebesar lebih dari 129 persen dalam laporan bulanan mereka, yang didorong oleh penurunan produksi minyak Venezuela.

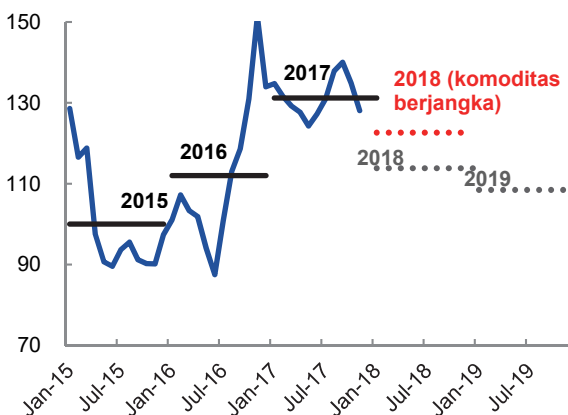
⁶⁶ Menurut Badan Energi Internasional (*International Energy Agency*, IEA), pangsa batubara dalam bauran energi global diperkirakan menurun dari 27 persen di tahun 2016 menjadi 26 persen di tahun 2022 oleh karena pertumbuhan permintaan yang lambat dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Sebagai konsumen batubara terbesar di dunia, harga batubara akan tetap sangat bergantung pada Tiongkok. Dengan demikian, reformasi struktural industri batubara Tiongkok adalah kunci dari evolusi harga batubara. Pembaca yang tertarik dengan masalah ini diharapkan untuk mengacu pada IEA (2018).

⁶⁷ Risiko yang menguntungkan dan merugikan dibahas lebih lanjut secara terinci dan dapat dilihat di *Perkiraan Pasar Komoditas Bank Dunia (World Bank Commodity Market Outlook)* yang terbaru, tersedia di <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>. Pembaca juga dapat mengacu pada *Perkiraan Energi Dunia tahun 2017 (Outlook World Energy 2017)* (IEA, 2017) untuk skenario permintaan dan pasokan energi di masa depan.

⁶⁸ Nilai tukar perdagangan (*terms of trade*, TOT) mengacu pada harga relatif impor dalam hal ekspor dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal ini dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang dapat dibeli per satuan barang ekspor oleh suatu negara.

kelas bahkan jika harga rata-rata komoditas berjangka pada tahun 2018 digunakan sebagai ganti harga perkiraan dari Bank Dunia (2017)⁶⁹ (Gambar A.43)⁷⁰.

Gambar A.43: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih – historis dan perkiraan hingga tahun 2020
(indeks 2015=100)



Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih dibangun di atas enam komoditas ekspor utama Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, LNG, dan minyak kelapa sawit)

Tabel A.5: Harga rata-rata komoditas untuk tahun 2016, 2017 dan perkiraan untuk tahun 2018, 2019

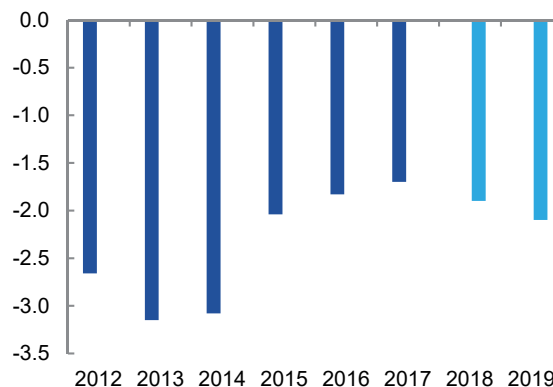
	2016	2017	2018p	2019p
Batubara (Australia)	65.9	88.4	70.0	60.0
Minyak Mentah (rata-rata)	42.8	52.8	58.0	59.0
Gas Alam (Jepang)	6.9	8.1	8.3	8.5
Karet	1.6	2.0	2.1	2.1
Minyak Kelapa Sawit	700.0	715.0	732.5	745.1
Logam Dasar	68.3	83.8	85.2	86.0

Sumber: Bank Dunia (2017, 2018)

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar pada tahun 2018, sejalan dengan penurunan nilai tukar perdagangan dan pertumbuhan investasi yang tinggi

Nilai tukar perdagangan Indonesia mungkin telah mencapai puncaknya di tahun 2017 dan diproyeksikan cenderung menurun di tahun 2018. Karena permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, pertumbuhan investasi yang tinggi dan proyeksi pertumbuhan yang sedikit lebih lemah untuk para mitra dagang utama Indonesia, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun 2018 dan 2,1 persen dari PDB pada tahun 2019 (Gambar A.44).

Gambar A.44: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan melemah
(persen)



Sumber: CEIC dan BI; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data tahun 2018 dan 2019 adalah perkiraan

⁶⁹ Harga komoditas berjangka yang digunakan adalah harga minyak (rata-rata harga tahun 2018 untuk WTI, Dubai dan Brent adalah USD 60,1), minyak kelapa sawit (USD 629,4) dan batubara (USD 93,8). Harga komoditas berjangka diambil pada tanggal 09 Februari 2018.

⁷⁰ Indeks Harga Perdagangan Komoditas Bersih (NTI) ditetapkan sebagai: $NTI_t = \frac{Berat_{i,p} \times Harga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$ di mana $Berat_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum (E_{N,t}) - \sum (I_{N,t})}$ dan i= jenis komoditas; t= bulan; p=periode siklus (mis. rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T= tahun basis; E=nilai ekspor; I=nilai impor

Defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,3 persen dari PDB pada tahun 2018

Keseimbangan fiskal diperkirakan akan menyempit sedikit di atas rentang perkiraan (Gambar A.45).

Penyempitan ini sejalan dengan defisit yang lebih kecil yang ditetapkan di dalam APBN tahun 2018, karena harga minyak yang tinggi bertahan dan reformasi peningkatan penerimaan yang penting dilaksanakan, sehingga meningkatkan total realisasi penerimaan.

Konsisten dengan perkiraan ekonomi makro untuk tahun 2018 dan reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan, total penerimaan pemerintah pusat diproyeksikan tumbuh sebesar 8,0 persen *yo-y* secara nominal, didorong terutama oleh proyeksi peningkatan dalam penerimaan pajak penghasilan⁷¹. Sementara itu, total belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat sebesar 7,5 persen dari 2017 secara nominal, didorong oleh proyeksi peningkatan belanja barang dan material⁷². Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,3 persen dari PDB, lebih tinggi dari proyeksi APBN tahun 2018 sebesar 2,2 persen (Tabel A.6)⁷³.

Risiko yang menguntungkan dan merugikan tetap ada di tahun 2018

Bagian terbesar dari penerimaan di tahun 2018 akan tetap berhubungan erat⁷⁴ dengan harga minyak dunia, yang menghadapkan Pemerintah terhadap risiko kenaikan dan penurunan dari fluktuasi harga minyak. Tanpa melanjutkan reformasi yang memperluas basis pajak dan mengumpulkan pajak saat ini secara lebih efisien dan adil, posisi fiskal jangka menengah Pemerintah akan menjadi rawan, bersama dengan pengeluaran fiskal yang sangat penting bagi kemajuan negara menuju pertumbuhan inklusif (Lihat Bagian B). Di sisi pengeluaran, Pemerintah telah mengumumkan bahwa akan mempertahankan harga bahan bakar dan listrik yang diaturnya tidak berubah⁷⁵ hingga akhir tahun 2019 di tengah harga bahan bakar global yang lebih tinggi. Kebijakan ini meningkatkan risiko fiskal dari potensi kerugian oleh Pertamina dan pengeluaran yang lebih tinggi melalui pembayaran tunggakan kepada Pertamina

⁷¹ Proyeksi penerimaan dari Bank Dunia adalah 5,4 persen lebih rendah daripada APBN tahun 2018.

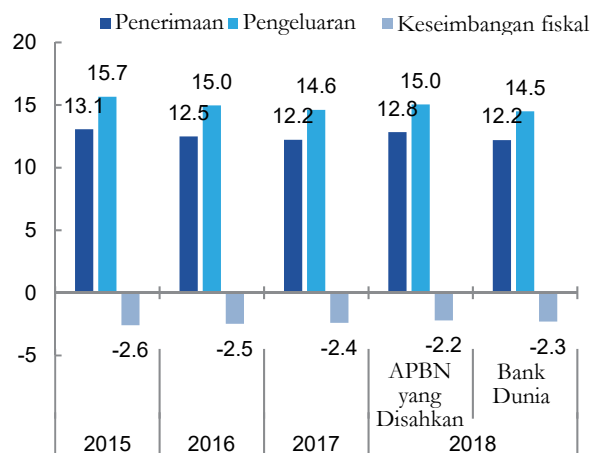
⁷² Proyeksi pengeluaran dari Bank Dunia adalah 3,9 persen lebih rendah daripada APBN tahun 2018.

⁷³ Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan berusaha untuk meningkatkan alokasi bagi subsidi energi, sebagai tanggapan terhadap harga minyak mentah yang lebih tinggi dari perkiraan. Realokasi tersebut saat ini diharapkan memiliki dampak yang terbatas terhadap defisit fiskal.

⁷⁴ Gejolak aliran penerimaan pajak utama, seperti PPN dan pajak penghasilan, hingga harga minyak global juga dibahas dalam IEQ edisi bulan Desember, Oktober, Juni tahun 2017.

⁷⁵ Bahan bakar yang diatur mengacu pada bensin RON 88 dan solar. Lihat Jakarta Globe (30 November 2017).

Gambar A.45: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,3 persen dari PDB pada tahun 2018 (persen dari PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Angka untuk tahun 2012-2016 adalah angka aktual yang sudah diaudit; angka tahun 2017 adalah angka aktual awal pada tanggal 9 Februari 2018.

dan PLN⁷⁶, yang mengakibatkan adanya pengeluaran subsidi energi yang lebih tinggi. Selain itu, mungkin ada beberapa risiko yang berasal dari kewajiban kontinjensi terkait dengan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Jika risiko turunnya realisasi penerimaan ini terwujud dan pengeluaran dipertahankan, defisit fiskal yang lebih tinggi dapat terjadi di tahun 2018. Secara keseluruhan, mempertahankan momentum reformasi dalam administrasi penerimaan, kebijakan pajak, dan kualitas belanja, akan berpotensi lebih menantang mengingat pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden yang akan berlangsung di tahun 2018-2019.

⁷⁶ Harga bahan bakar yang diatur belum berubah sejak 1 April 2016 ketika harga minyak mentah Brent berada di kisaran USD 35-40/barel. Sementara itu, harga minyak mentah Brent rata-rata dari 1 Januari 2018 hingga 19 Maret 2018 adalah USD 66,6/barel. Namun demikian, pada tanggal 25 Februari Pertamina menaikkan harga bahan bakar non-subsidi, di mana harga Pertamina (Ron 92) naik sebesar Rp 300/liter (menjadi Rp 8.900/liter), Pertamina Turbo naik sebesar Rp 500 (menjadi Rp10.100/liter), dan mempertahankan harga Peralite tidak berubah, yang dapat mengindikasikan adanya subsidi silang lebih lanjut untuk mengelola tekanan pada neraca Pertamina dari harga bahan bakar yang lebih tinggi.

Tabel A.6: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di dalam APBN tahun 2018

(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2016 Aktual Sudah diperiksa	2017 APBN	2017 APBN-P	2017 Data awal	2018 APBN	2018 Bank Dunia
A. Penerimaan	1.556	1.750	1.736	1.660	1.895	1.793
(% dari PDB)	12,5	12,5	12,8	12,2	12,8	12,2
1. Penerimaan pajak	1.285	1.499	1.473	1.343	1.618	1.498
(% dari PDB)	10,4	10,9	10,8	9,9	10,9	10,2
PPH	666	788	784	647	855	753
Migas	36	36	42	50	38	47
Non-Migas	630	752	742	597	817	706
PPN/PPnBM	412	494	475	481	542	512
PBB	19	17	15	17	17	17
Cukai	144	157	153	153	155	167
Pajak perdagangan internasional	35	34	36	39	39	41
Bea masuk	32	34	33	35	36	37
Bea impor	3	0	3	4	3	4
Pajak lainnya	8	9	9	7	10	7
2. Penerimaan negara bukan pajak	262	250	260	310	275	294
(% dari PDB)	2,1	1,8	1,9	2,3	1,9	2,0
Penerimaan sumber daya alam	65	87	96	112	104	123
Migas	44	64	72	83	80	99
Non-Migas	21	23	23	29	23	23
Penerimaan negara bukan pajak lainnya	197	163	165	198	172	172
3. Hibah	9	1	3	6	1	1
B. Pengeluaran	1.860	2.080	2.133	1.986	2.221	2.134
(% dari PDB)	15,0	15,2	15,7	14,6	15,0	14,5
1. Pemerintah pusat	1.149	1.316	1.367	1.244	1.455	1.391
(% dari PDB)	9,3	9,6	10,0	9,2	9,8	9,4
Pegawai	305	345	340	313	366	332
Barang	260	270	319	280	340	353
Modal	169	221	206	200	204	204
Bunga pinjaman	183	221	219	217	239	234
Subsidi	174	160	169	166	156	171
Energi	107	77	90	98	95	119
BBM	44	32	44	50	47	59
Listrik	63	45	45	47	48	60
Non-energi	67	83	79	69	62	51
Hibah	7	2	6	5	1	3
Sosial	50	56	58	55	81	80
Lainnya	6	41	50	9	67	14
2. Transfer ke daerah	710	710	766	742	766	743
(% dari PDB)	5,7	5,5	5,6	5,5	5,2	5,0
Saldo Keseluruhan	-308	-308	-397	-326	-326	-341
(% dari PDB)	-2,5	-2,4	-2,9	-2,4	-2,2	-2,31
<i>Asumsi</i>						
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	5,0	5,1	5,2	5,1	5,4	5,3
IHK (%)	3,5	4,0	4,3	3,8	3,5	3,5
Nilai tukar (Rp/USD)	13.300	13.300	13.400	13.381	13.400	13.550
Harga minyak mentah (USD/barrel)	51	45	48		48	58

Sumber: Kementerian Keuangan

B. Memungut lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif



Keputusan terkait belanja pemerintah dan realisasi penerimaan – yang merupakan inti dari kebijakan fiskal – memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang efektif yang mendorong pertumbuhan inklusif, seperti berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia atau meningkatkan konektivitas daerah terpencil, keduanya menurunkan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. Pengalaman Indonesia selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, kebijakan fiskal kurang berhasil dalam membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas: kesenjangan memperoleh kesempatan yang sama masih besar, dan perkiraan menunjukkan bahwa pajak dan belanja publik hanya menurunkan koefisien Gini Indonesia sebesar 0,04 poin, dibandingkan dengan 0,18 poin di Afrika Selatan. Di masa lalu, dampak dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran pada pertumbuhan inklusif belum optimal akibat tidak hanya kurangnya pengeluaran di bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, tetapi juga oleh pengeluaran yang tidak efektif di bidang-bidang prioritas tersebut dan di bidang-bidang penting lainnya, terutama pendidikan. Belanja di bidang-bidang prioritas tersebut baru-baru ini meningkat karena adanya realokasi belanja dari subsidi energi; namun demikian, realisasi penerimaan yang rendah terus menghambat peningkatan belanja sektor prioritas. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih inklusif, Indonesia harus lebih baik lagi dalam melakukan pengeluaran dan membelanjakan lebih banyak di bidang-bidang prioritas. Ini akan membutuhkan upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja kementerian dan lembaga serta belanja daerah, melakukan realokasi lebih lanjut terhadap pengeluaran lintas sektoral dan di dalam sektor, dan merealisasikan lebih banyak lagi penerimaan dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan. Melakukan reformasi pajak yang terkait termasuk memperluas basis pajak, menyederhanakan peraturan pajak, dan secara signifikan memperkuat manajemen kepatuhan.

1. Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak dan membelanjakan dengan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif

Memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif adalah hal yang tepat untuk dilakukan – dan perekonomian yang cerdas

Pertumbuhan inklusif – pertumbuhan ekonomi yang secara tidak proporsional menguntungkan bagian terbawah dalam distribusi pendapatan⁷⁷ – telah menjadi tujuan semua pemerintah yang pernah berkuasa di Indonesia. Konsep pertumbuhan inklusif layak untuk menjadi arus utama kebijakan pembangunan karena dapat memperkecil kesenjangan ekonomi. Hal ini juga merupakan konsep ekonomi yang cerdas, karena ketimpangan yang tinggi bersifat kontra produktif terhadap laju dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi⁷⁸. Ini disebabkan karena ketimpangan (i) membatasi kemajuan di sektor kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan akumulasi modal manusia, (ii) meredam semangat kewirausahaan dan keberanian mengambil resiko karena terhalangnya akses sejumlah besar rumah tangga terhadap kredit⁷⁹; dan (iii) dapat memicu terjadinya ketidak-stabilan politik dan sosial⁸⁰. Oleh karena itu, upaya menurunkan kesenjangan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari proses transisi negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi⁸¹.

Kebijakan mengenai pengeluaran dan penerimaan adalah alat utama untuk pertumbuhan yang lebih tinggi...

Sementara kebijakan moneter dan struktural, seperti kerangka hukum dan peraturan, juga memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan, Bagian dari *IEQ* ini fokus pada pembahasan peranan kebijakan fiskal, khususnya kebijakan Pemerintah untuk memobilisasi penerimaan dan belanja pemerintah.⁸² Pengeluaran pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi terutama melalui investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Infrastruktur menghubungkan pekerja terampil dengan perusahaan, dan menghubungkan perusahaan ke pasar, dan berkontribusi pada penciptaan pekerjaan yang lebih baik dan lebih produktif⁸³. Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan stok infrastruktur fisik sebesar 5persen selama tahun 2001-2012. Angka pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 3.0 persen pertahun berkontribusi terhadap terciptanya laju pertumbuhan PDB yang lebih tinggi selama periode tersebut, secara kumulatif angka pertumbuhan lebih tinggi sebesar 0,5 poin persentase.⁸⁴

⁷⁷ Terdapat banyak definisi dari pertumbuhan inklusif. Bank Dunia (2018a) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan dan menjamin keamanan ekonomi untuk semua kelompok masyarakat. OECD mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang bagi semua segmen penduduk dan mendistribusikan dividen peningkatan kemakmuran, baik dalam hal moneter maupun non-moneter, secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Dalam laporan ini, pertumbuhan inklusif mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan bagian paling bawah dari distribusi penghasilan secara tidak proporsional dan oleh karena itu disertai dengan ketimpangan yang stabil atau lebih rendah.

⁷⁸ Lihat Ostry dkk. (2014); Berg dan Ostry (2011).

⁷⁹ Lihat Banerjee dan Newman (1993); Banerjee dan Duflo (2007); Aghion and Bolton (1997); Kray and McKenzie (2014)

⁸⁰ Alesina dan Perotti (1996).

⁸¹ Bulman dkk. (2016).

⁸² Kebijakan fiskal juga mencakup keputusan mengenai tingkat defisit dan tingkat utang yang dihasilkan (“pengelolaan fiskal”), yang juga mempengaruhi pertumbuhan. Rekam jejak kepatuhan Indonesia dengan plafon sebesar 3 persen untuk defisit pemerintah secara umum telah meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan mendukung pertumbuhan. Dengan tingkat utang yang moderat dan komitmen yang kredibel terhadap aturan fiskal, artikel ini berfokus pada reformasi kebijakan pengeluaran dan perpajakan.

⁸³ Lihat misalnya, Fan dan Rao (2003; Mitchell (2005); dan Dao (2012);

⁸⁴ World Bank (2015a).

dan lebih inklusif, dengan melakukan redistribusi sumber daya...

Kebijakan pengeluaran dan penerimaan juga mempengaruhi distribusi penghasilan yang dapat dibelanjakan dan konsumsi yang dapat dilakukan saat ini dan di masa depan. Dalam suatu periode tertentu, kebijakan fiskal melakukan redistribusi sumber daya dari pembayar pajak kepada konsumen barang dan jasa publik. Misalnya, ketika keluarga miskin yang tidak membayar pajak mengirim anak-anak mereka ke sekolah umum gratis, mereka dapat menikmati tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada jika harus membayar biaya di sekolah swasta. Sementara itu, keluarga kaya yang membayar pajak yang digunakan untuk mendanai pendidikan publik pada akhirnya memiliki penghasilan yang dapat dibelanjakan yang lebih kecil. Secara keseluruhan, dampak yang mungkin terjadi adalah perbedaan yang lebih kecil dalam tingkat konsumsi antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Di Indonesia, perkiraan menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan pengeluaran publik terhadap penurunan ketimpangan masih terbilang kecil, sebagaimana dapat dilihat pada penurunan koefisien gini sebesar 0,04 poin..

...dan dengan menyamakan peluang serta mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan

Di luar berbagai macam dampak yang terjadi secara bersamaan sebagaimana diuraikan di atas, kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat membantu menurunkan ketimpangan di masa depan dengan menciptakan peluang yang lebih setara. Misalnya, pengeluaran untuk pendidikan memungkinkan anak-anak dari keluarga kaya dan miskin untuk memperoleh keterampilan yang lebih sepadan. Seiring berjalannya waktu, kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pendidikan akan dapat menurunkan kesenjangan dalam hal kemampuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, dan pada akhirnya berdampak pada lebih rendahnya ketimpangan penghasilan yang dapat dibelanjakan. Contoh dalam pendidikan tersebut juga mengilustrasikan bagaimana kebijakan yang sama dapat memiliki dampak yang terjadi secara serentak maupun tidak serentak terhadap ketimpangan, serta dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sepertiga dari ketimpangan yang ada saat ini adalah karena adanya kesenjangan kesempatan,⁸⁵ yaitu keadaan yang berada di luar kendali seseorang, seperti jenis kelamin, kebangsaan, tempat kelahiran atau latar belakang keluarga.

Untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, Indonesia harus membelanjakan secara lebih efektif - dan membelanjakan lebih banyak untuk sektor-sektor prioritas ...

Untuk dapat meraih kemajuan dalam mengupayakan pertumbuhan inklusif, Indonesia harus membelanjakan lebih banyak dan dengan cara yang lebih efektif di sektor-sektor prioritas, yang mendukung pertumbuhan dan inklusi. Sektor-sektor prioritas tersebut termasuk pendidikan, dan juga infrastruktur, kesehatan serta bantuan sosial. Pengeluaran yang efektif berarti mendapatkan hasil maksimal dari setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Contoh konkrit misalnya mencapai tingkat kematian ibu melahirkan yang lebih rendah dengan sumber daya yang sama. Di banyak sektor prioritas – terutama infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial – Indonesia harus membelanjakan tidak hanya secara lebih efektif tetapi juga memperbesar jumlah pengeluaran di sektor tersebut untuk mencapai kesetaraan dengan negara-negara berkembang lainnya, baik dalam hal jumlah pengeluaran maupun pertumbuhan inklusif.

⁸⁵ Untuk informasi lebih lanjut mengenai konsep dan pengukuran ketimpangan peluang, lihat Roemer (1993), Van Der Gaer (1993), Barros dkk., (2010) dan World Bank (2006). Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketimpangan peluang di Indonesia, lihat World Bank (2015a).

... dengan membelanjakan secara berbeda dan merealisasikan penerimaan lebih banyak dalam cara yang efisien dan berkeadilan

Indonesia memprioritaskan pengelolaan fiskal yang berhati-hati dan berkomitmen untuk membatasi pembiayaan defisit. Dengan demikian, untuk membelanjakan lebih banyak di sektor-sektor prioritas, Pemerintah harus melaksanakan dua hal yaitu mengurangi pengeluaran dari sektor-sektor dengan prioritas yang lebih rendah (“membelanjakan secara berbeda”) dan mengalihkannya ke sector prioritas, dan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, merealisasikan penerimaan yang lebih banyak harus dilakukan dengan cara yang efisien dan berkeadilan (“merealisasikan penerimaan dengan lebih baik”). Singkatnya, Indonesia harus merealisasikan penerimaan lebih banyak lagi (dan lebih baik) serta membelanjakan dengan lebih baik (Gambar B.1).

Gambar B.1: Untuk membelanjakan lebih banyak dan dengan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif, Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak



2. Kebijakan fiskal telah mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, tetapi ketimpangan tetap tinggi

Pengelolaan fiskal yang berhati-hati telah mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia ...

Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang tinggi sejak Krisis Keuangan Asia tahun 1997-1998 (Gambar B.2). Selama tahun 2003-2016, pertumbuhan PDB riil rata-rata sebesar 5,5 persen – lebih lambat dari rata-rata sebelum krisis sebesar 7,0 persen, tetapi lebih berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari kemampuan Indonesia dalam mengatasi Krisis Keuangan Global dengan cukup baik. Pengelolaan fiskal yang berhati-hati adalah penyumbang utama stabilitas ekonomi makro⁸⁶: sejak tahun 2003, Indonesia telah mentaati batasan defisit fiskal dan tingkat utang pemerintah secara umum, masing-masing sebesar 3 persen dan 60 persen dari PDB.⁸⁷

...menyebabkan kemajuan yang besar dalam pengentasan kemiskinan ...

Stabilitas ekonomi makro yang meluas, pertumbuhan berbasis komoditas dan transformasi struktural berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan menjadi setengahnya, yaitu sebesar 10,9 persen selama tahun 2000-2016. Lebih dari 30 juta lapangan kerja di sektor jasa dan industri tercipta selama periode ini, menggantikan

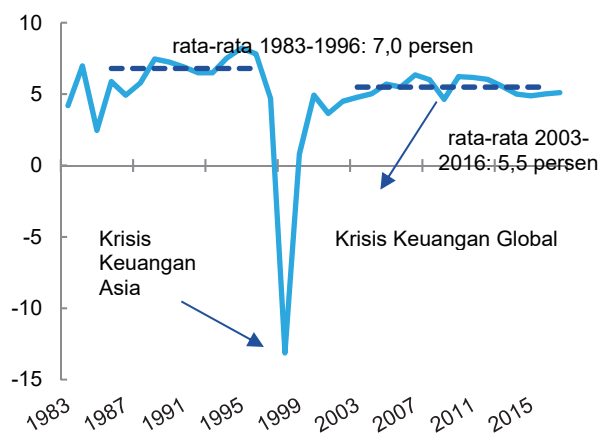
⁸⁶ Varians (perbedaan antara realisasi dengan perencanaan – *pent.*) dari pertumbuhan PDB menurun dari 14,4 persen sepanjang tahun 1993-2003 kecuali untuk tahun-tahun terjadinya krisis (1997-1999) menjadi 5,7 persen sepanjang tahun 2004-2016.

⁸⁷ Defisit fiskal rata-rata 1,4 persen dari PDB dari tahun 2000-2016 dan rasio utang pemerintah terhadap PDB menurun dari 92,3 persen menjadi 27,9 persen selama periode tersebut.

pekerjaan di sektor pertanian yang kurang produktif dan meningkatkan penghasilan bagi jutaan orang Indonesia. Meningkatnya pendapatan per kapita riil sebanyak dua kali lipat menjadi hampir USD 4.000 telah menghasilkan tambahan 32 juta orang yang menjadi bagian dari kelas menengah dalam kurun waktu 2006 dan 2016.⁸⁸

Gambar B.2: Kebijakan fiskal yang berhati-hati mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil...

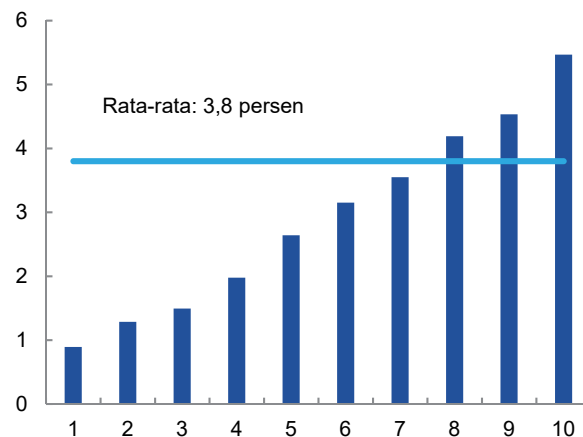
(Sumbu Y: pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, sumbu X: tahun)



Sumber: Indikator Pembangunan Dunia (*World Development Indicators*, WDI), perhitungan staf Bank Dunia

Gambar B.3: ...tetapi pertumbuhan belum terlalu inklusif

(Sumbu Y: rata-rata pertumbuhan tabungan konsumsi per kapita dari tahun 2006-2016, persen; Sumbu X: desil konsumsi rumah tangga)



Sumber: Survei rumah tangga Susenas, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Terdapat jeda dalam strategi pengambilan sampel antara tahun 2010-2011 dan 2014-2015.

Namun demikian, ketimpangan konsumsi telah meningkat...

Terlepas dari pencapaian ini, manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata. Konsumsi riil dari kelompok 40 persen rumah tangga termiskin meningkat sebesar 1,5 persen per tahun antara tahun 2006-2016, sayangnya angka ini lebih kecil dibandingkan dengan 5,1 persen per tahun untuk kelompok 20 persen rumah tangga terkaya (Gambar B.3). Akibatnya, ketimpangan meningkat secara substansial: koefisien Gini⁸⁹ pada konsumsi meningkat dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada tahun 2013⁹⁰.

... sementara dampak kebijakan fiskal secara serentak terhadap ketimpangan terbatas

Dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya, efek serentak dari kebijakan fiskal di Indonesia terhadap ketimpangan penghasilan yang dapat dibelanjakan sangat kecil. Pada tahun 2012, koefisien Gini di Indonesia, sebagai ukuran dari ketimpangan, hampir tidak berubah setelah memperhitungkan pajak dan bantuan langsung⁹¹ (Gambar B.4). Sementara itu, di Afrika Selatan, pajak langsung yang sangat progresif dan belanja sosial menurunkan koefisien Gini sebesar 0,08 poin. Dengan memperhitungkan elemen lain dari kebijakan fiskal seperti pajak tidak langsung, subsidi tidak langsung dan bantuan langsung dalam bentuk natura di

⁸⁸ Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan data Susenas.

⁸⁹ Mengukur sejauh mana distribusi penghasilan atau konsumsi di antara orang perseorangan / rumah tangga menyimpang dari distribusi yang merata secara sempurna (koefisien Gini sebesar 1,0).

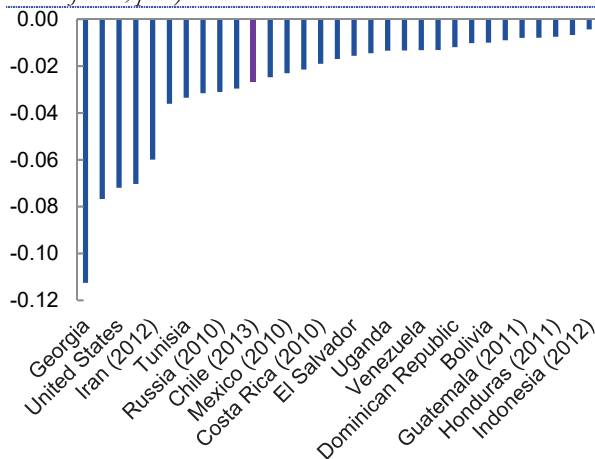
⁹⁰ Tingkat ketimpangan yang sebenarnya mungkin lebih tinggi, karena survei cenderung mengecualikan rumah tangga terkaya dan hanya menyumbang 45 persen konsumsi secara nasional.

⁹¹ Pengaruh kebijakan fiskal pada ketimpangan dapat diperkirakan dengan menggunakan metodologi Komitmen terhadap Kesetaraan, yang membandingkan penghasilan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan fiskal. Informasi lebih lanjut tersedia di Lampiran 1.

sektor kesehatan dan pendidikan, kebijakan fiskal menurunkan koefisien Gini di Afrika Selatan sebesar 0,18 poin secara total⁹². Di Argentina dan Brasil, bantuan langsung tunai bersyarat dan instrumen kebijakan fiskal lainnya juga memainkan peranan penting dalam menurunkan ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini, masing-masing sebesar 0,07 dan 0,03 poin. Kebijakan fiskal memainkan peranan yang lebih besar di negara-negara OECD, di mana pajak progresif dan jaring pengaman sosial menurunkan ketimpangan sebesar rata-rata 0,14 poin (Gambar B.5).

Gambar B.4: Keputusan tentang belanja Pemerintah dan pemungutan penerimaan secara substansial mengurangi ketimpangan di negara-negara berkembang lainnya

(perubahan koefisien Gini dari pasar ke penghasilan yang dapat dibelanjakan, poin)



Sumber: Indikator Standar Komitmen terhadap Kesetaraan (*Commitment to Equity*, CEQ), versi web (30 November 2017); perhitungan staf Bank Dunia

Catatan:

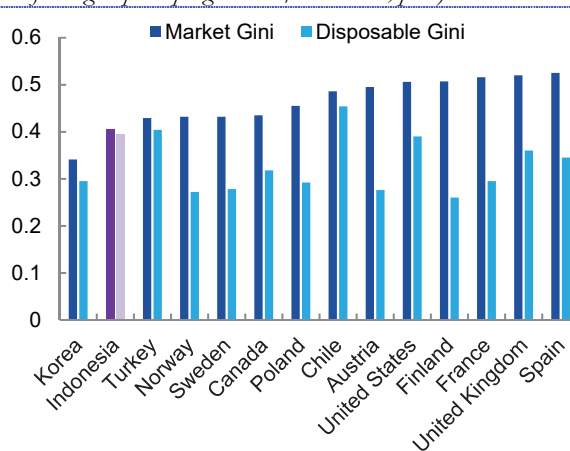
1. Data untuk Indonesia, Ghana, Etiopia, Yordania dan Tanzania mengacu pada koefisien Gini pada konsumsi; data untuk negara lain mengacu pada koefisien Gini pada penghasilan.
2. Penghasilan di pasar mengacu pada upah, gaji, atau penghasilan pribadi lainnya sebelum memperhitungkan pajak pemerintah (yang dikurangkan dari penghasilan), kontribusi dan transfer jaminan sosial (yang menambah penghasilan). Penghasilan yang dapat dibelanjakan mengacu pada penghasilan setelah memperhitungkan pajak dan transfer tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 1.

Ketimpangan peluang masih menjadi tantangan utama.

Indonesia masih menghadapi disparitas yang cukup tinggi dalam hal akses masyarakat terhadap layanan dasar dan ini terjadi hampir di seluruh pelosok nusantara. Meskipun akses rata-rata terhadap layanan dasar meningkat dari 48,8 persen di tahun 2001 menjadi 70,9 persen di tahun 2015, banyak kabupaten masih tertinggal dari rata-rata nasional⁹³. Kurang dari 30 persen rumah tangga di beberapa kabupaten di Papua dan Kalimantan yang memiliki akses terhadap air bersih, dibandingkan dengan lebih dari

Gambar B.5: Koefisien Gini sebelum diberlakukannya kebijakan fiskal di Indonesia tidak jauh berbeda dari negara-negara OECD, tetapi kebijakan fiskal memiliki dampak redistributif yang lebih besar di negara-negara OECD

(Koefisien gini pada penghasilan / konsumsi, poin)



Sumber: Statistik OECD, Tiwari dkk. (2018), perhitungan staf Bank Dunia

Catatan:

1. Semua data mengacu pada data tahun 2015 kecuali dinyatakan lain. Data untuk Indonesia mengacu pada koefisien Gini pada konsumsi; data untuk negara lain mengacu pada koefisien Gini pada penghasilan.
2. Penghasilan di pasar mengacu pada upah, gaji, atau penghasilan pribadi lainnya sebelum memperhitungkan pajak pemerintah (yang dikurangkan dari penghasilan), kontribusi dan transfer jaminan sosial (yang menambah penghasilan). Penghasilan yang dapat dibelanjakan mengacu pada penghasilan setelah memperhitungkan pajak dan transfer tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 1.

⁹² Tidak diperlihatkan pada Gambar B.4, yang hanya memperhitungkan pajak, kontribusi jaminan sosial, dan bantuan langsung.

⁹³ Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan data Susenas. Mengacu pada rata-rata sederhana dari angka pendaftaran bersih di SMP dan SMA, akses terhadap air bersih yang aman, akses terhadap sanitasi yang aman, dan proporsi kelahiran yang ditolong oleh pekerja kesehatan yang terampil. Lihat World Bank (2017e).

70 persen di sekitar setengah dari seluruh kabupaten. Kualitas pendidikan juga tidak merata: koefisien perbedaan nilai ujian sekolah menengah naik dari 0,09 di tahun 2006 menjadi 0,15 di tahun 2015, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin melebar dalam hasil belajar⁹⁴.

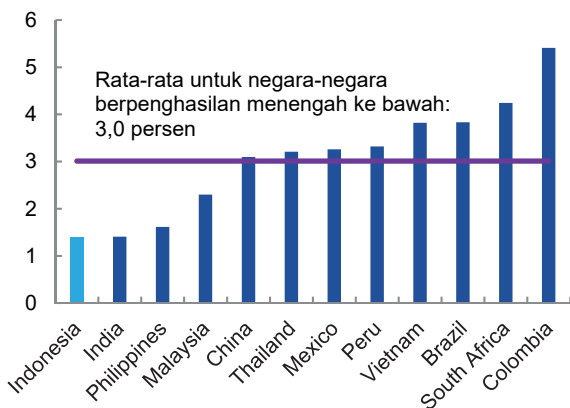
3. Efektivitas yang terbatas dan rendahnya tingkat belanja di sektor-sektor prioritas menghambat pertumbuhan dan pemerataan

Belanja di beberapa sektor yang penting untuk pertumbuhan inklusif belum cukup...

Ada beberapa alasan mengapa keputusan mengenai belanja dan realisasi penerimaan pemerintah belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Pertama, Indonesia tidak membelanjakan cukup banyak untuk sektor-sektor tertentu yang sangat penting untuk pertumbuhan inklusif: infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial. Tahun-tahun di mana investasi di sektor infrastruktur kurang dilakukan telah menyebabkan defisit besar yang diperkirakan mencapai sebesar USD 1,5 triliun⁹⁵. Antara tahun 2000-2013, Indonesia membelanjakan rata-rata 3,6 persen dari PDB dalam investasi publik dan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta di sektor infrastruktur per tahun, dibandingkan dengan 17,7 persen di Tiongkok, 11,3 persen di Malaysia dan 6,3 persen di Thailand⁹⁶. Di sektor kesehatan, Indonesia membelanjakan 1,4 persen dari PDB atau sepertiga dari rata-rata global (Gambar B.6). Hal ini berkontribusi terhadap hasil kesehatan yang lebih buruk: harapan hidup saat lahir adalah 69 tahun untuk orang Indonesia, lima tahun lebih rendah dari rata-rata penduduk Asia Timur & Pasifik⁹⁷. Di sektor bantuan sosial, Indonesia juga membelanjakan lebih sedikit sebagai bagian dari PDB dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah bawah (Gambar B.7).

Gambar B.6: Indonesia adalah salah satu negara yang membelanjakan paling sedikit untuk sektor kesehatan di dunia...

(belanja pemerintah secara umum untuk kesehatan, persen dari PDB)

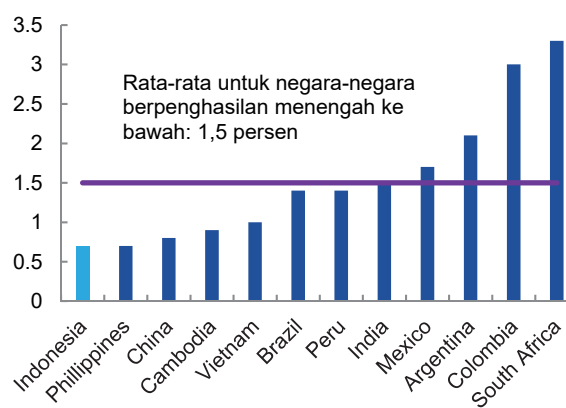


Sumber: WDI, Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Data untuk Indonesia mengacu pada data tahun 2016 dan termasuk belanja daerah. Data untuk negara-negara lain mengacu pada data tahun 2014.

Gambar B.7:... dan juga kurang membelanjakan di sektor bantuan sosial dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya

(belanja pemerintah untuk program bantuan sosial, persen dari PDB)



Sumber: ASPIRE (the Atlas of Social Protection - Indicators of Resilience and Equity, Atlas Perlindungan Sosial - Indikator Ketahanan dan Kesetaraan) Bank Dunia, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Data untuk Filipina mengacu pada data tahun 2013-14, Tiongkok (2014), India (2016), Indonesia dan negara-negara lain (2015).

⁹⁴ World Bank (2017e).

⁹⁵ Untuk rincian lebih lanjut tentang metodologinya, lihat World Bank (2017b).

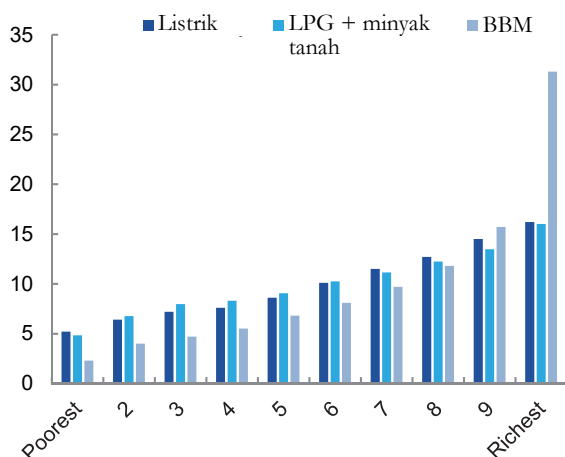
⁹⁶ Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan Dataset Investasi dan Modal Saham IMF (2017).

⁹⁷ Tidak termasuk negara-negara berpendapatan tinggi di Asia Timur dan Pasifik.

... sebagian karena pengeluaran yang tinggi untuk subsidi energi yang regresif di masa lalu...

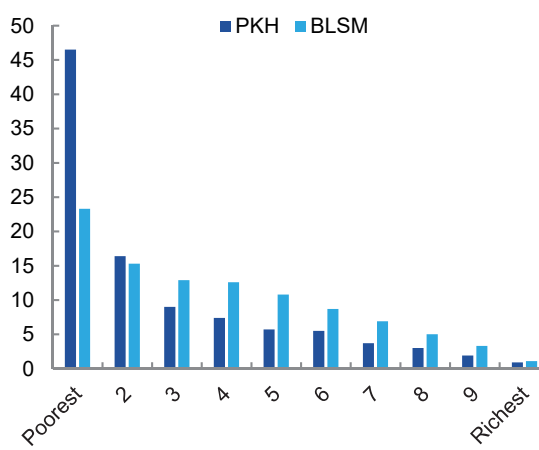
Sampai dengan tahun 2015, sebagian besar penerimaan yang diperoleh selama ledakan komoditas (*commodity boom*) dibelanjakan untuk subsidi energi yang regresif. Pada tahun 2012, Pemerintah membelanjakan seperlima dari anggarannya atau 4,0 persen dari PDB untuk subsidi energi, sekitar empat kali lipat dari jumlah yang dibelanjakan untuk bantuan sosial. Subsidi tidak berkontribusi secara berarti terhadap pertumbuhan, dan penetapan targetnya tidak dilakukan dengan baik, dengan hanya sekitar 35 persen-nya yang menjangkau rumah tangga miskin dan rentan (Gambar B.8). Sebagai perbandingan, dana bantuan sosial langsung seperti PKH dan BLSM⁹⁸ jauh lebih progresif, dengan sekitar 60 persen dan 40 persen masing-masing menjangkau rumah tangga miskin dan rentan (Gambar B.9). Namun demikian, bantuan langsung tersebut hanya menyumbang sekitar 5 persen dari total pengeluaran atau 0,9 persen dari PDB di tahun yang sama.

Gambar B.8: Hingga saat ini, sekitar seperlima dari anggaran dibelanjakan untuk subsidi energi yang regresif...
(pangsa dari manfaat yang diterima menurut desil konsumsi)



Sumber: Susenas 2015, perhitungan staf Bank Dunia

Gambar B.9: ... daripada untuk bantuan langsung tunai yang progresif untuk bantuan sosial
(pangsa dari manfaat yang diterima menurut desil konsumsi)



Sumber: Susenas 2015, perhitungan staf Bank Dunia

... tetapi juga karena realisasi penerimaan yang lemah, yang membatasi keseluruhan pagu anggaran (*resource envelope*)

Tingkat pengeluaran Indonesia yang sebesar 14,6 persen dari PDB di tahun 2017 adalah kurang dari setengah dari pengeluaran rata-rata negara-negara pasar berkembang lainnya⁹⁹, menjadikan Indonesia sebagai pembelanja yang kecil dibandingkan dengan negara-negara setara (Gambar B.10). Bahkan selama berlangsungnya ledakan komoditas, total belanja pemerintah nasional hanya mencapai 20 persen dari PDB. Realisasi penerimaan yang rendah merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat pengeluaran di sektor-sektor prioritas yang penting bagi pertumbuhan inklusif. Rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia rendah: sebesar 12,2 persen di tahun 2017, dibandingkan dengan rata-rata negara-negara berkembang sebesar 27,8 persen (Gambar B.11)¹⁰⁰. Belanja juga sebagian dibatasi oleh batas defisit fiskal sebesar 3,0 persen dari PDB. Namun demikian, mengingat pentingnya pengelolaan fiskal yang bijaksana (*prudent*) untuk mempertahankan pertumbuhan,

⁹⁸ Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah bantuan langsung tunai sementara, yang tepat waktu dan didistribusikan kepada masyarakat miskin sebagai tanggapan terhadap guncangan harga seperti pemotongan subsidi energi.

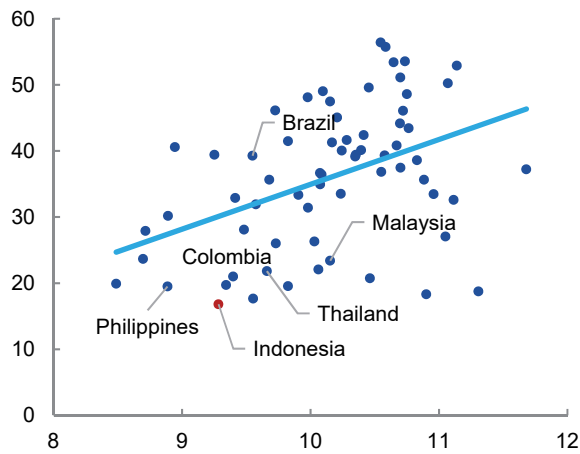
⁹⁹ Rata-rata rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB untuk 39 negara pasar berkembang, termasuk Indonesia adalah sebesar 35,4 persen di tahun 2016. Lihat IMF (2017b).

¹⁰⁰ Negara-negara dan sumber data yang sama seperti di atas.

Indonesia harus membiayai pengeluaran yang lebih tinggi dengan merealisasikan penerimaan yang lebih banyak agar tidak mengalami defisit yang lebih tinggi.

Gambar B.10: Tingkat belanja pemerintah di Indonesia relatif rendah

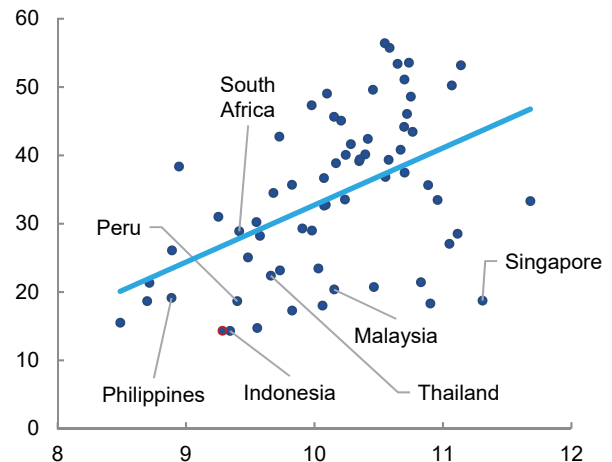
(Sumbu Y: Belanja pemerintah secara umum, persen dari PDB, 2016; Sumbu X: log dari PDB per kapita di tahun 2011 (paritas daya beli, PPP))



Sumber: Pemantauan Fiskal IMF, perhitungan staf Bank Dunia

Gambar B.11:... terutama karena rasio penerimaan terhadap PDB yang rendah

(Sumbu Y: Penerimaan pemerintah secara umum, persen dari PDB, 2016; Sumbu X: log dari PDB per kapita di tahun 2011 (paritas daya beli, PPP))



Sumber: Pemantauan Fiskal IMF, perhitungan staf Bank Dunia

Efektivitas belanja di sektor-sektor pendorong pertumbuhan inklusif terbatas – misalnya di sektor infrastruktur ...

Alasan yang kedua mengapa belanja Pemerintah memiliki dampak yang terbatas pada pertumbuhan inklusif adalah karena pengeluaran tidak selalu mengarah pada hasil yang lebih baik. Meskipun belanja Pemerintah Pusat untuk jalan nasional meningkat enam kali lipat secara riil antara tahun 2005-2015, hal tersebut tidak menyebabkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas jalan secara bersamaan. Pembangunan jalan relatif konstan sebesar 2.000-3.000 kilometer per tahun dan hanya 60 persen dari jaringan jalan nasional ini berada dalam kondisi yang baik. Hal ini sebagian disebabkan oleh karena perawatan jalan yang lebih mahal oleh karena standar desain yang lebih tinggi dan meningkatnya penggunaan beton sebagai pelapis jalan di koridor-koridor jalan utama, tetapi juga belanja yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan. Demikian pula, meskipun terdapat peningkatan tujuh kali lipat dalam hal belanja pemerintah pusat secara riil di sektor sektor penyediaan air minum sejak tahun 2005-2013, penggunaan air ledeng untuk keperluan minum telah turun hampir sepertiga dan penggunaan untuk tujuan pembersihan pada umumnya tetap tidak berubah.

Bentuk lain dari belanja infrastruktur yang tidak efisien adalah penggunaan dana pemerintah untuk proyek-proyek yang dapat dibangun oleh sektor swasta. Sektor swasta dapat membangun infrastruktur secara lebih efisien dan dengan nilai yang sepadan dengan biayanya (*value for money*) yang lebih baik dibandingkan dengan pengadaan pemerintah yang pada umumnya dilakukan. Namun demikian, investasi swasta di sektor infrastruktur telah menurun dari 19 persen rata-rata selama tahun 2006-2010 menjadi rata-rata 9 persen antara tahun 2011-2015¹⁰¹. Salah satu tantangan dalam upaya untuk menarik sektor swasta adalah kurangnya mekanisme yang sistematis untuk alokasi proyek antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Badan Kontrak Pemerintah (*Government Contracting Authorities, GCAs*) menetapkan apakah proyek didanai oleh pemerintah atau swasta di tahap awal

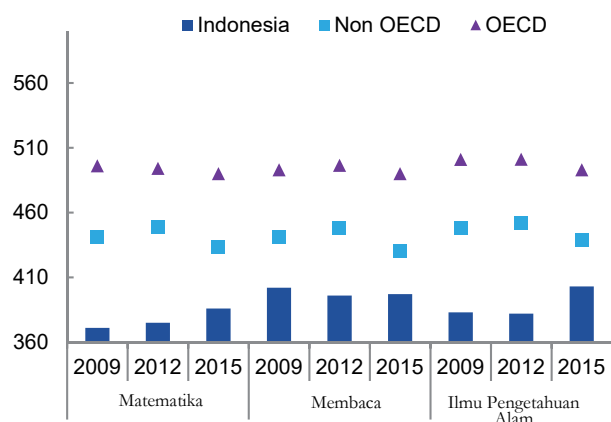
¹⁰¹ Lihat World Bank (2017b).

pengembangan proyek, tanpa kriteria yang jelas untuk menetapkan proyek mana yang harus ditenderkan secara kompetitif dan mana yang harus diserahkan kepada BUMN. Akibatnya, proyek-proyek yang layak banyak yang diserahkan kepada BUMN, mengurangi jumlah proyek infrastruktur secara keseluruhan yang dapat dibangun dalam pagu anggaran yang diberikan.

... dan pendidikan

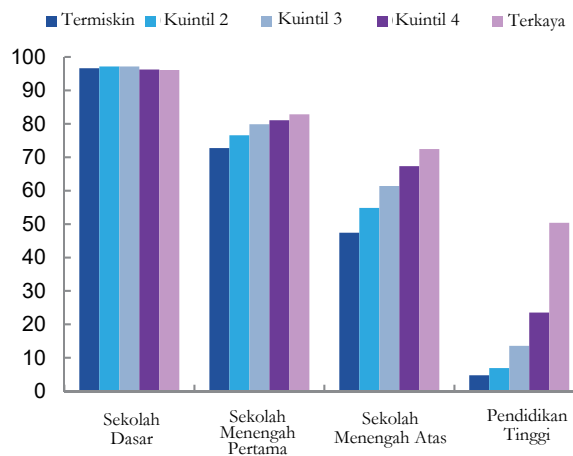
Di sektor pendidikan, peningkatan belanja¹⁰² belum menyebabkan adanya peningkatan yang berarti dalam sumber daya manusia, terutama dalam hal kualitas. Meskipun belanja pendidikan meningkat hampir sebelas kali lipat dari tahun 2001-2016 menjadi 3,6 persen dari PDB, dengan lebih banyak guru yang diangkat untuk menurunkan rasio murid-guru¹⁰³ dan dengan gaji guru yang dinaikkan sebanyak dua kali lipat, kinerja siswa yang diukur dengan nilai ujian nasional hampir tidak berubah.¹⁰⁴ Ini sebagian karena Indonesia tidak secara sistematis menghubungkan peningkatan gaji dengan kinerja pengajaran yang diamati. Meskipun Vietnam dan Indonesia mengalokasikan seperlima dari APBN mereka untuk pendidikan, Vietnam¹⁰⁵ adalah salah satu dari 10 negara yang berprestasi dalam tes PISA (*Programme for International Student Assessment*, Program Penilaian Pelajar Internasional dari OECD), sedangkan Indonesia tetap berada di peringkat terbawah, meskipun telah terjadi sedikit peningkatan dalam nilai dari tahun-tahun sebelumnya (Gambar B.12).

Gambar B.12: Meskipun tingkat belanja tinggi untuk pendidikan, kinerja siswa melalui tes PISA belum meningkat secara signifikan
(nilai tes PISA, poin)



Sumber: OECD, perhitungan staf Bank Dunia

Gambar B.13: Anak-anak miskin masih jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah menengah dan universitas...
(tingkat pendaftaran sekolah menurut tingkat pendidikan)



Sumber: Susenas 2015, perhitungan staf Bank Dunia

¹⁰² Sejak dikeluarkannya perubahan UUD di tahun 2002, Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari total APBN untuk belanja pendidikan. Mandat dari peraturan tersebut sepenuhnya dipenuhi untuk pertama kalinya di tahun 2009. Saat ini, belanja pemerintah untuk pendidikan di Indonesia sebanding dengan negara-negara setara dan tidak jauh dari rata-rata negara-negara anggota OECD sebesar 5,3 persen dari PDB.

¹⁰³ Pada tahun 2014, Rasio Siswa-Guru (*Student-Teacher Ratio*, STR) untuk sekolah dasar di Indonesia adalah 1:17, dibandingkan dengan 1:14 untuk rata-rata negara-negara berpenghasilan tinggi dan 1:29 di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.

¹⁰⁴ Lihat Bank Dunia (2018d) dan De Ree dkk. (2017).

¹⁰⁵ Parandekar dan Sedmik (2016) menunjukkan bahwa Vietnam mengungguli negara-negara setara di tes PISA karena tingkat akses yang lebih tinggi terhadap pra-sekolah, investasi di infrastruktur sekolah, dan faktor budaya.

Di sektor pendidikan, belanja tidak selalu dialokasikan untuk intervensi dengan dampak yang paling tinggi ...

... sementara dukungan keuangan yang tidak tepat sasaran untuk sekolah justru menyerap sumber daya yang langka

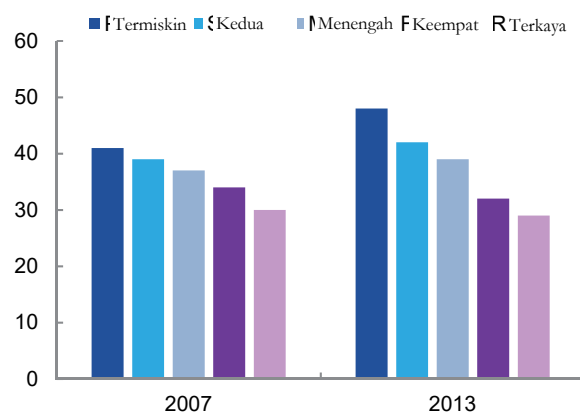
Belanja yang tidak efektif di sektor kesehatan dan bantuan sosial juga membatasi dampak belanja publik pada kualitas sumber daya manusia ...

Selain itu, dalam sektor pendidikan, pengeluaran tidak selalu dialokasikan untuk intervensi dengan potensi dampak terbesar pada pertumbuhan inklusif. Meskipun terbukti manfaat investasi dalam pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PAUD)¹⁰⁶, sumber daya yang dihabiskan untuk PAUD rendah. Hal ini terutama mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak yang lebih miskin: seorang anak berusia empat tahun yang lahir di kelompok 20 persen rumah tangga termiskin hanya memiliki peluang sebesar 16 persen untuk dapat mengikuti layanan PAUD, sementara seorang anak berusia empat tahun dari kelompok 20 persen rumah tangga terkaya memiliki peluang sebesar 40 persen untuk melakukannya¹⁰⁷.

Skema bantuan sosial yang ada tidak dapat mengatasi ketimpangan peluang dalam pendidikan ini secara memadai. Terlepas dari perluasan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan langsung tunai diberikan kepada siswa yang terdaftar atau anak-anak usia sekolah dari 25 persen rumah tangga termiskin, hampir setengah dari anak-anak yang memenuhi syarat dari kelompok 20 persen rumah tangga termiskin tidak dapat bersekolah di sekolah menengah atas di tahun 2016. Hal ini sebagian besar karena masih adanya kesenjangan yang besar antara biaya sekolah dan nilai bantuan langsung tunai PIP, terutama di tingkat sekolah menengah atas¹⁰⁸. Meskipun programnya progresif, program tersebut tidak ditargetkan dengan baik: 36 persen dari mereka yang tidak miskin mendapat manfaat dari PIP di tahun 2016¹⁰⁹. Anak-anak yang lebih miskin dengan demikian masih memiliki kemungkinan yang kecil untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan lebih mungkin untuk putus sekolah: sekitar sepertiga anak dari keluarga termiskin yang terdaftar di sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke tingkat menengah atas, dibandingkan dengan 17 persen anak-anak dari keluarga terkaya (Gambar B.13).

Efektivitas belanja di sektor kesehatan, terutama di tingkat daerah tetap kurang optimal, sebagian menghasilkan ketimpangan dalam skala regional dan ketimpangan terkait penghasilan yang besar dalam hasil kesehatan di seluruh negeri. Angka kematian ibu (AKI) tetap tinggi di Indonesia, sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target SDG 2030 yang kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada saat yang sama, 37 persen anak balita mengalami *stunting*, dan *stunting* berdampak lebih

Gambar B.14: *Stunting* (kekerdilan, gangguan pertumbuhan pada anak) memiliki dampak lebih besar pada anak-anak yang lebih miskin
(persen anak-anak balita yang menderita *stunting*, menurut desil penghasilan)



Sumber: Riskesdas 2007 dan 2013, perhitungan staf Bank Dunia

¹⁰⁶ Setiap dolar yang diinvestasikan dalam program pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan antara USD 6-17 sebagai imbalannya. Lihat Engle dkk. (2011).

¹⁰⁷ Lihat World Bank (2017a) untuk pembahasan lebih lanjut.

¹⁰⁸ Lihat World Bank (2017f).

¹⁰⁹ Perhitungan staf Praktik Pendidikan Global Bank Dunia dengan menggunakan data Susenas (2016).

terhadap anak-anak yang lebih miskin (Gambar B.14)¹¹⁰.

Efektivitas dibatasi oleh kurangnya mekanisme untuk memberi insentif bagi pelaksanaan program di tingkat daerah, dan dengan alokasi belanja yang tidak proporsional terhadap intervensi kuratif (pengobatan), sementara intervensi promotif dan preventif (pencegahan) yang lebih hemat biaya mendapat alokasi yang sangat rendah (kurang dari 1 persen dari total belanja kesehatan). Demikian pula, dalam bantuan sosial, program yang paling efektif dalam pengentasan kemiskinan menerima jumlah belanja publik terendah sedangkan yang tidak efektif menerima jumlah yang tinggi. Meskipun setiap rupiah yang dikeluarkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menurunkan ketimpangan¹¹¹ hingga 10 kali lipat dibandingkan setiap rupiah yang dibelanjakan untuk subsidi beras, Rastra, anggaran untuk Rastra justru 2,5 kali lebih tinggi pada tahun 2016.¹¹²

Transfer dari pemerintah pusat tidak cukup mengatasi ketimpangan regional, atau memberi insentif pada kinerja

Pemerintah daerah berperan penting dalam pemberian layanan di sektor-sektor prioritas yang dibahas di atas. Pemerintah pusat memiliki mekanisme yang terbatas untuk mempengaruhi atau memberi insentif pada penginkatan keluar dan hasil dari penggunaan sumber daya di tingkat daerah. Selain itu, transfer fiskal dari Pemerintah Pusat ke kabupaten dan desa tidak cukup mengatasi ketimpangan regional. Distribusi dana bantuan/transfer pemerintah, seperti Dana Alokasi Umum, DAU dan Dana Desa memprioritaskan ‘alokasi dasar’ yang sama di seluruh kabupaten dan desa tanpa memandang jumlah penduduk dan kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah, daripada distribusi ‘per kapita’ yang memperhitungkan faktor-faktor tersebut¹¹³. Akibatnya, mereka yang tinggal di kabupaten yang berpenduduk lebih banyak menerima dana bantuan 8 kali lebih sedikit per kapita dibandingkan dengan warga di kabupaten yang jumlah penduduknya paling sedikit. Hal ini membatasi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan lainnya di daerah perkotaan yang lebih besar.

4. Kualitas belanja telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemajuan lebih lanjut masih mungkin terjadi

a. Indonesia telah meningkatkan kualitas belanja melalui realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas ...

Kualitas belanja telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa dampak pada pertumbuhan inklusif

Upaya yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah telah sedikit meningkatkan dampak kebijakan fiskal pada penurunan ketimpangan. Setelah memperhitungkan berbagai instrumen kebijakan fiskal – pajak, dana transfer, pajak tidak langsung dan

¹¹⁰ Lihat Bank Dunia (2016b) untuk pembahasan yang lebih rinci

¹¹¹ Menurut analisis oleh Badan Kebijakan Fiskal (2018), setiap Rp 1 triliun yang dikeluarkan untuk PKH dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan masing-masing sebesar 0,08 poin persentase dan 0,03 poin Gini.

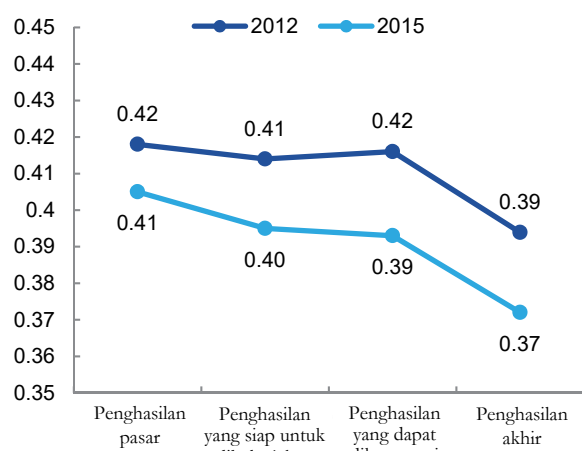
¹¹² Lihat World Bank (2017f) untuk pembahasan yang lebih rinci.

¹¹³ 77 persen dana dari Dana Desa dialokasikan berdasarkan alokasi dasar (alokasi yang sama untuk setiap desa); 3 persen dialokasikan untuk daerah tertinggal, dan 20 persen sisanya dialokasikan sesuai dengan formula yang mencakup jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.

subsidi, dan bantuan dalam bentuk natura¹¹⁴ seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, koefisien Gini menurun dari 0,41 menjadi 0,37 di tahun 2015 (Gambar B.15). Ini merupakan peningkatan dari tahun 2012. Demikian pula, dengan memperhitungkan pajak, dana transfer, pajak tidak langsung dan subsidi, angka kemiskinan menurun sebesar 2,6 persentase poin dari 14,3 persen menjadi 11,7 persen – peningkatan dari tahun 2012 ketika angka kemiskinan menurun sebesar 1,0 poin persentase (Gambar B.16). Meskipun demikian, besaran ini tetap kecil jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara-negara maju lainnya seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya.

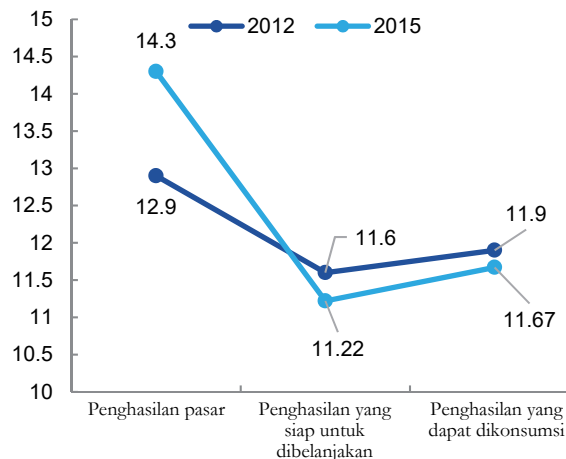
Gambar B.15: Kebijakan Fiskal menurunkan ketimpangan sedikit lebih banyak di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012...

(poin Gini)



Gambar B.16: ... dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012

(Angka kemiskinan, persen dari jumlah penduduk)



Sumber: Tiwari dkk. (2018) dan Jellema dkk. (2017) berdasarkan data Susenas dari tahun 2012 dan 2015

Catatan: Penghasilan pasar mengacu pada upah, gaji dan penghasilan pribadi lainnya sebelum membayar pajak atau menerima dana bantuan. Penghasilan yang dapat dibelanjakan memperhitungkan dampak dari pajak, yang dikurangkan dari penghasilan, dan bantuan langsung, yang menambah penghasilan. Penghasilan yang dapat dibelanjakan atau dikonsumsi disesuaikan lebih lanjut dengan pajak tidak langsung / subsidi. Penghasilan akhir mempertimbangkan lebih lanjut dampak peningkatan kesejahteraan dari layanan publik bersubsidi seperti kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah telah mengalokasikan belanja ke sektor-sektor prioritas untuk pertumbuhan inklusif...

Pemerintah baru-baru ini membelanjakan lebih banyak di sektor-sektor yang penting bagi pertumbuhan inklusif. Pada tahun 2015, Pemerintah menghapus subsidi bensin, memicu timbulnya pergeseran yang penting dalam pengeluaran dari subsidi energi yang regresif ke arah investasi yang lebih tinggi dalam modal manusia dan fisik. Total belanja untuk subsidi energi turun dari 3,7 persen dari PDB di tahun 2014 menjadi 1,4 persen dari PDB di tahun 2016¹¹⁵, sementara belanja untuk sektor infrastruktur dan kesehatan masing-masing meningkat menjadi 1,9 persen dari PDB dan 1,4 persen dari PDB (Gambar B.17)¹¹⁶. Pada tahun 2017, pemerintah juga meningkatkan

¹¹⁴ Dampak dari kebijakan fiskal terhadap ketimpangan dapat diperkirakan dengan menggunakan analisis insiden. Penghasilan pasar mengacu pada upah, gaji dan penghasilan pribadi lainnya sebelum membayar pajak atau mendapat dana bantuan. Penghasilan yang dapat dibelanjakan memperhitungkan pajak dan dana bantuan; penghasilan yang dapat dibelanjakan kemudian menyesuaikan untuk pajak tidak langsung/subsidi, dan penghasilan akhir juga memperhitungkan dampak pengurangan ketimpangan dari layanan publik bersubsidi seperti kesehatan dan pendidikan. Informasi ini tidak tersedia di negara-negara OECD, maka Gambar B.4 hanya membandingkan penghasilan pasar dan penghasilan yang dapat dibelanjakan. Untuk informasi lebih lanjut lihat Lampiran 1.

¹¹⁵ Di tahun 2017, belanja untuk subsidi energi (listrik, solar dan LPG) mencapai sekitar Rp 90 triliun.

¹¹⁶ Dibandingkan dengan masing-masing 1,4 persen dan 1,1 persen dari PDB di tahun 2014.

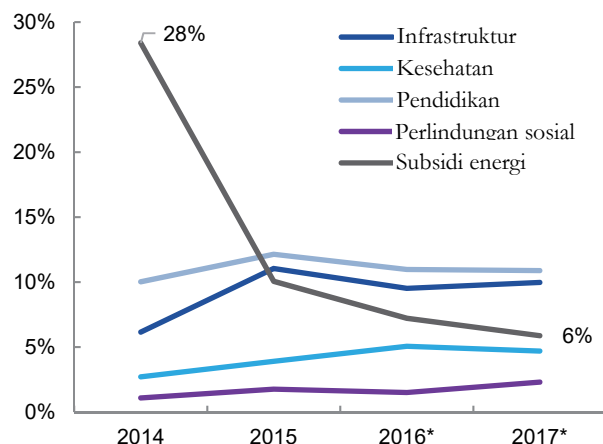
penetapan target subsidi listrik dengan memindahkan para pelanggan listrik dengan daya 900 VA dari rumah tangga yang tidak miskin dan tidak rentan ke dalam tarif non-subsidi. Jumlah yang dialokasikan di bawah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur lokal, telah meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 30 persen secara nominal dari tahun 2008 hingga 2016. Meskipun belanja untuk bantuan sosial keseluruhan masih rendah, sebesar 0,4 persen dari PDB, belanja untuk PKH, program kesejahteraan yang paling berpihak kepada masyarakat miskin¹¹⁷, telah meningkat secara absolut menjadi lebih dari Rp 8 triliun, sejalan dengan perluasan dari 3,2 juta rumah tangga menjadi 6 juta rumah tangga di tahun 2017. Pada tahun 2018, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan program ini hingga mencakup 10 juta rumah tangga; sebagai akibatnya, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial hampir dua kali lipat dari tahun 2016-2017.

... dan sedikit meningkatkan distribusi alokasi Dana Desa

Pada tahun 2015, Pemerintah juga mulai menyalurkan Dana Desa kepada 75.000 desa, sebesar Rp 60 triliun atau 0,4 persen dari PDB di tahun 2018. Sementara desain keseluruhan sistem transfer fiskal masih memprioritaskan pemerataan dana di seluruh daerah terlepas dari kebutuhan pembangunan yang ada di daerah, telah ada peningkatan baru-baru ini dalam penyaluran Dana Desa. Pada tahun 2018, 20 persen dari dana tersebut akan disalurkan sesuai dengan rumus per kapita yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan kebutuhan desa, dibandingkan dengan 10 persen sebelumnya.¹¹⁸

Gambar B.17: Pengeluaran untuk subsidi energi yang regresif telah dialihkan ke infrastruktur...

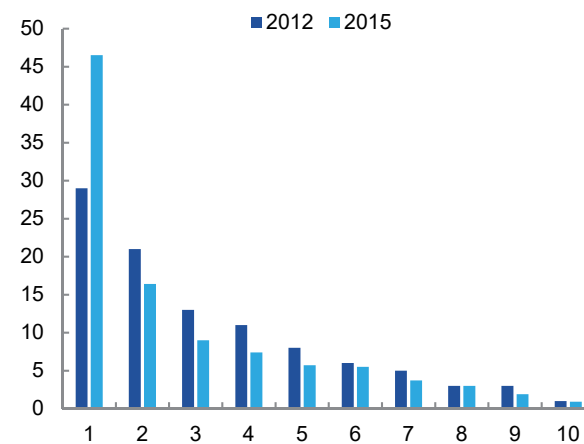
(persen dari belanja Pemerintah Pusat tidak termasuk transfer ke pemerintah daerah)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data tahun 2014-2015 mengacu pada belanja aktual, data tahun 2016 dan 2017 mengacu pada belanja yang dianggarkan. Infrastruktur hanya mencakup belanja kementerian lini dan tidak termasuk dana suntikan modal dari suntikan kementerian lini ke BUMN.

Gambar B.18: ... dan pembelanjaan untuk PKH telah menjadi lebih berpihak kepada masyarakat miskin

(Sumbu Y: pangsa manfaat PKH, sumbu X: desil konsumsi rumah tangga)



Sumber: Tiwari dkk. (2018) dan Jellema dkk. (2017) berdasarkan data Susenas dari tahun 2012 dan 2015

Pemerintah sedang berusaha untuk membelanjakan

Beberapa program bantuan sosial telah menjadi lebih berpihak pada masyarakat miskin: pada tahun 2015, 60 persen dari manfaat PKH diterima oleh masyarakat dalam kelompok 20 persen terbawah, dibandingkan dengan 50 persen di tahun 2012

¹¹⁷ Lihat pembahasan terperinci di World Bank (2017f).

¹¹⁸ Lihat Kementerian Keuangan (2018).

lebih baik lagi dengan membuat program bantuan sosial lebih berpihak pada masyarakat miskin...

(Gambar B.18). Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan program bantuan sosial lainnya: pada tahun 2017, Pemerintah memulai uji coba dengan 5 juta rumah tangga untuk meningkatkan penyaluran subsidi pangan dengan mengintegrasikan Rastra ke dalam sistem pengiriman melalui *e-voucher* yang lebih bertanggung jawab di bawah program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Program ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran bantuan tersebut kepada rumah tangga yang bukan rumah tangga sasaran dan untuk mendukung keuangan inklusi. Pemerintah berencana untuk mengakhiri program Rastra sepenuhnya pada tahun 2018 dengan meningkatkan BPNT ke 10 juta rumah tangga yang tersisa, meskipun masalah pada penyaluran *e-voucher* dan mengkomunikasikan perubahan ini kepada para penerima manfaat¹¹⁹ dapat menunda rencana ini.

... dan memiliki beberapa rencana untuk menata ulang subsidi energi lebih lanjut

Pemerintah juga telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan penetapan sasaran bagi subsidi energi yang tersisa untuk rumah tangga miskin dan rentan. Di antara rencana yang digariskan untuk tahun 2018 adalah: (i) mengembangkan jaringan gas kota untuk mengoptimalkan penyaluran LPG¹²⁰ dan meningkatkan penetapan sasaran bagi subsidi LPG untuk rumah tangga miskin; dan (ii) membatasi subsidi listrik hanya untuk pelanggan pasokan listrik berdaya 450 volt-ampere (VA) dan 900VA yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan kesejahteraan.¹²¹

b. ...tetapi belanja yang lebih baik tetap menjadi tantangan di banyak bidang

Indonesia harus membelanjakan lebih banyak lagi di sektor-sektor prioritas untuk pertumbuhan inklusif...

Untuk mencapai target pembangunan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), total belanja tambahan bersih tahunan Pemerintah yang diperlukan diperkirakan sebesar sekitar 4 persen dari PDB di tahun 2020 (Gambar B.19). Sementara belanja di bidang ini telah meningkat baru-baru ini, seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, tingkat belanja tetap rendah dibandingkan dengan target Pemerintah dan kebutuhan Indonesia. Di sektor infrastruktur, untuk mencapai target Pemerintah sebesar USD 500 miliar dalam investasi tambahan di tahun 2020 akan membutuhkan peningkatan investasi publik menjadi 4,9 persen dari PDB per tahun. Di sektor kesehatan, untuk dapat sepenuhnya melaksanakan program cakupan layanan kesehatan universal membutuhkan peningkatan belanja kesehatan pemerintah (tidak termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial Nasional) menjadi sebesar sekitar 2,3 persen dari PDB per tahun. Di sektor bantuan sosial, belanja harus dilipat-gandakan menjadi 1,1 persen dari PDB di tahun 2020 untuk memungkinkan terlaksananya perluasan program bagi kaum miskin dan rentan.

... dengan lebih jauh lagi melakukan realokasi pengeluaran terhadap subsidi yang tidak tepat sasaran...

Peningkatan pendanaan untuk sektor-sektor prioritas dapat dicapai dengan melakukan realokasi pengeluaran terhadap subsidi yang tidak produktif. Meskipun reformasi baru-baru ini telah dilakukan, pengeluaran untuk subsidi energi yang kurang tepat sasaran dan regresif masih menyumbang 0,7 persen dari PDB atau sebesar 7,4 persen dari total anggaran pada tahun 2017¹²². Sementara melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari harga energi yang lebih tinggi adalah tujuan yang layak dipuji, mekanisme alternatif, terutama dana bantuan langsung sosial, akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan memberikan subsidi energi¹²³. Selain itu, penataan ulang/rasionalisasi lebih lanjut dari subsidi non-energi dapat meningkatkan efisiensi

¹¹⁹ Berita di Metro TV (07 Februari 2018).

¹²⁰ Lihat Nota Keuangan tahun 2018 dan The Jakarta Post (11 Februari 2018).

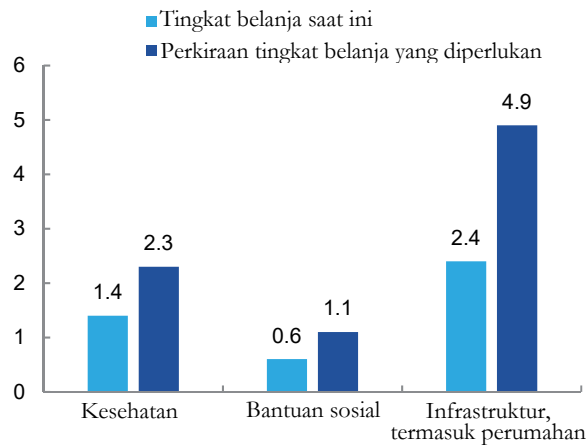
¹²¹ Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2018).

¹²² Data awal dari Kementerian Keuangan, Februari 2018.

¹²³ Subsidi energi cenderung regresif, sedangkan bantuan langsung sebagian besar memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan. Lihat Gambar B.8 dan Gambar B.9 sebelumnya.

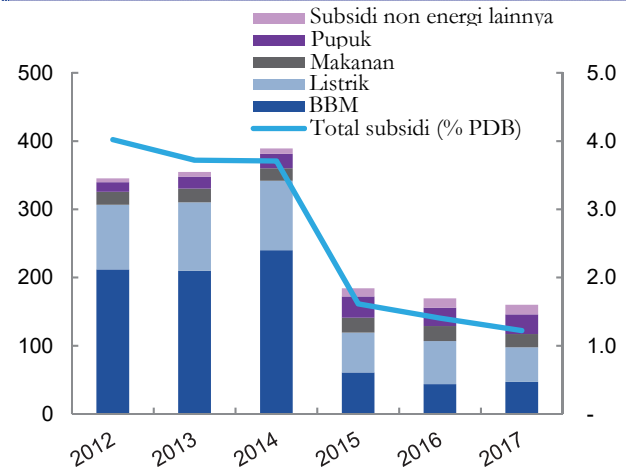
belanja. Subsidi pupuk, program Rastra, dan program subsidi bunga kredit adalah tiga program subsidi non-energi yang terbesar (Gambar B.20), yang menghabiskan 0,4 persen dari PDB atau 4,1 persen dari APBN di tahun 2017.

Gambar B.19: Indonesia harus membelanjakan lebih banyak lagi untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial ...
(persen dari PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Hanya mengacu pada belanja Pemerintah.

Gambar B.20: ... dan menciptakan ruang fiskal untuk melaksanakannya dengan mengurangi subsidi lebih banyak lagi
(Sumbu Y: Rp triliun, sumbu sekunder: persen dari PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data untuk tahun 2017 mengacu pada data realisasi awal, data untuk semua tahun lainnya mengacu pada data realisasi yang sudah diaudit.

... dan dengan memanfaatkan partisipasi sektor swasta di sektor-sektor prioritas

Di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, usulan yang terperinci dan tepat untuk semua proyek infrastruktur harus dipersiapkan, apakah proyek-proyek tersebut pada akhirnya didanai oleh pemerintah atau swasta. Usulan tersebut harus menyediakan data yang cukup untuk membuat keputusan pendahuluan mengenai metode pelaksanaan proyek, sebelum proses penyusunan APBN dilakukan. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama/PJPK (*Government Contracting Agencies, GCA*) berdasarkan Undang-Undang APBN diwajibkan untuk menunjukkan bahwa suatu proyek tidak dapat memobilisasi modal swasta sebelum mencari pendanaan melalui APBN. Selain itu, PJPK hanya boleh menyerahkan proyek kepada BUMN apabila investasi swasta dan pembiayaan komersial tidak tersedia. Akhirnya, PJPK hanya dapat meminta dukungan pemerintah sejauh dukungan tersebut mutlak diperlukan agar proyek mampu memenuhi persyaratan perbankan (*bankable*).

Indonesia harus terus meningkatkan efektivitas belanja di tingkat pusat dan daerah...

Untuk memastikan bahwa pengeluaran yang lebih tinggi dapat membawa hasil yang lebih baik, perbaikan yang lebih berarti juga diperlukan di tingkat sektoral dan di tingkat daerah, di mana yang terakhir ini menyumbang setengah dari belanja pemerintah. Seperti yang telah disebutkan, peningkatan kualitas belanja sangat penting oleh karena sepertiga dari penurunan ketimpangan karena kebijakan fiskal di negara-negara maju berasal dari pengeluaran, daripada kebijakan perpajakan¹²⁴. Mengingat sumber daya Indonesia yang terbatas, penting bahwa setiap Rupiah dari sumber daya wajib pajak diupayakan untuk menjadi keluaran dan hasil yang lebih baik di semua sektor pengeluaran publik di tingkat pusat dan daerah, tetapi terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi terbesar untuk menurunkan ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan, yaitu: sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

¹²⁴ IMF (2014).

...melalui pengintegrasian program bantuan sosial yang lebih baik...

Saat ini, oleh karena adanya perbedaan dalam penetapan sasaran dan pelaksanaannya, hanya sedikit rumah tangga miskin dan rentan yang menerima paket manfaat kesejahteraan yang 'lengkap': pada tahun 2014, hanya lebih dari 2 persen rumah tangga miskin menerima semua empat program bantuan sosial utama (Rastra, JKN-PBI, PIP, dan PKH). Integrasi antar program yang lebih baik akan memungkinkan rumah tangga untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih baik untuk menanggapi guncangan, yang berpotensi mengisolasi individu dan rumah tangga dari dampak negatif jangka panjang. Simulasi menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan program-program ini ke dalam satu manfaat akan memberikan dorongan signifikan terhadap pengeluaran untuk konsumsi kepada rumah tangga yang layak, yang setara dengan sekitar 14 hingga 21 persen dari anggaran rumah tangga sasaran rata-rata¹²⁵. Hal ini juga diharapkan dapat menyebabkan pengurangan kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan yang lebih besar dibandingkan dengan skenario yang ada saat ini.

...dan dengan merealokasikan belanja di beberapa sektor, terutama di sektor pendidikan, untuk membantu mengurangi kesenjangan kesempatan

Mengalihkan sumber daya ke program-program intervensi yang secara khusus menangani kesenjangan peluang juga merupakan hal yang sangat penting. Di bidang pendidikan, misalnya, dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini akan meningkatkan keuntungan pembelajaran jangka panjang dan berkontribusi pada penurunan angka *stunting* lebih lanjut. Mengalokasikan sumber daya ke bantuan langsung yang progresif di bidang pendidikan, misalnya dengan meningkatkan besarnya manfaat dan meningkatkan lebih lanjut penargetan beasiswa Program Indonesia pintar, juga akan membantu meningkatkan angka partisipasi di antara masyarakat miskin. Selain itu, dengan menghubungkan tunjangan profesional guru secara lebih langsung dengan kinerja dan memulai mekanisme sertifikasi ulang guru secara ketat dapat membantu Pemerintah untuk mengatasi keterputusan antara pengeluaran yang tinggi pada gaji dan tunjangan guru dengan hasil pembelajaran yang buruk.

... serta belanja yang lebih efektif di sektor kesehatan, di samping peningkatan belanja yang lebih tinggi...

Di sektor kesehatan, merealokasikan pengeluaran untuk program-program intervensi promotif dan preventif (pencegahan), daripada intervensi yang kuratif, akan lebih efektif dalam mencapai hasil kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, mempercepat dan meningkatkan proses akreditasi fasilitas kesehatan untuk memastikan kesiapan di sisi persediaan dan kualitas layanan di seluruh fasilitas kesehatan akan meningkatkan hasil kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat dapat menggunakan sistem transfer fiskal antar pemerintahan yang sudah ada seperti DAK dan pembayaran kapitasi asuransi kesehatan (JKN) untuk mendorong fasilitas kesehatan untuk dapat meraih akreditasi. Insentif dan program yang lebih baik untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil juga sangatlah penting.

... dan meningkatkan efektivitas transfer ke pemerintah daerah

Memberi insentif dan melengkapi kabupaten dan desa dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan dasar juga merupakan kunci dalam memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Sejalan dengan yang dilakukan sebagian besar negara yang menormalkan ukuran kebutuhan jumlah pengeluaran dan kapasitas fiskal sesuai dengan basis per kapita, Indonesia harus beralih ke formula per kapita dalam transfer antar pemerintahannya, daripada desain yang ada saat ini. Untuk DAU, Pemerintah dapat mengurangi porsi alokasi dasar dari formula, yang mengasumsikan kebutuhan jumlah pegawai dan mendanai seluruh gaji pegawai negeri sipil daerah.

¹²⁵ Lihat World Bank (2017f) untuk pembahasan yang lebih terinci mengenai manfaat mengintegrasikan program-program ini.

Demikian pula untuk Dana Desa, Pemerintah harus mengalokasikan proporsi yang lebih besar dari formula tersebut dengan basis per kapita¹²⁶. Namun demikian, terdapat kasus yang tepat untuk pemberian dana transfer khusus untuk daerah-daerah tertinggal, banyak dari daerah tersebut adalah daerah yang terpencil dan jarang penduduknya, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal akses terhadap layanan. Namun demikian, ini akan lebih baik dilakukan melalui dana transfer khusus, seperti DAK, yang mencakup kerangka kerja yang jelas, dan dalam kurun waktu tertentu. Lebih lanjut, Pemerintah harus menetapkan tujuan dan aturan yang jelas untuk setiap jenis DAK untuk memastikan bahwa DAK tersebut mencerminkan prioritas nasional dan mengatasi defisit infrastruktur.

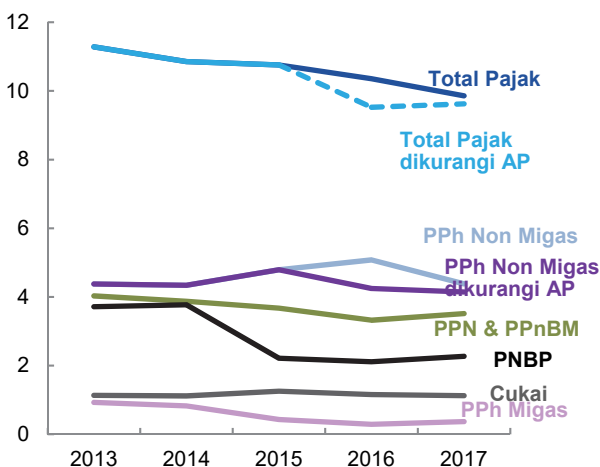
5. Indonesia harus memacu lebih banyak penerimaan agar dapat berbelanja lebih banyak lagi

a. Indonesia memungut terlalu sedikit penerimaan, serta seringkali tidak efektif

Realisasi pungutan pajak di Indonesia rendah, di mana nisbahnya terhadap PDB terus menurun dalam beberapa tahun terakhir

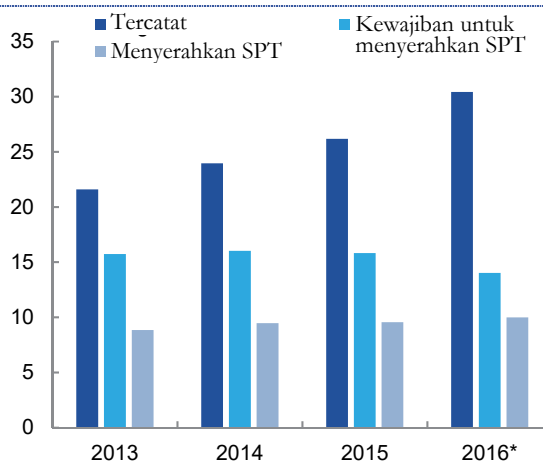
Mengingat pentingnya menjaga posisi fiskal dengan kehati-hatian, tidaklah mungkin bagi Indonesia untuk membelanjakan lebih banyak lagi pada sektor-sektor yang penting bagi pertumbuhan inklusif tanpa merealisasikan penerimaan yang juga lebih banyak lagi. Penerimaan yang rendah disebabkan oleh penerimaan pajak yang rendah, yang pada gilirannya, turut didorong oleh akumulasi berbagai faktor lainnya, antara lain: siklus; struktural; kapasitas administrasi; dan kebijakan pajak (Kotak B.1). Yang mengkhawatirkan, rasio pajak telah menurun sejak tahun 2013 (Gambar B.21).

Gambar B.21: Penerimaan pajak telah menurun sejak tahun 2013, namun tanda-tanda pemulihan muncul di tahun 2017
(persen dari PDB)



Sumber: Data Kemenkeu, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data tahun 2017 didasarkan pada data realisasi awal; AP adalah singkatan dari program amnesti pajak; Non-Migas untuk non-minyak dan gas; PPh untuk pajak penghasilan; PPN untuk pajak pertambahan nilai; PPnBM untuk pajak penjualan barang mewah; PNBP untuk penerimaan negara bukan pajak

Gambar B.22: Basis pajak Indonesia terlalu sempit
(jumlah sebagai nisbah dari total pekerja yang dipekerjakan, persen)



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Analisis Bank Dunia
Catatan: Data tahun 2016 adalah perkiraan dan belum diverifikasi dalam laporan resmi

¹²⁶ Pada tahun 2018, bagian yang lebih besar dari formula ini akan dialokasikan dengan basis per kapita (20 persen, dibandingkan dengan 10 persen di tahun-tahun sebelumnya). Lihat Kementerian Keuangan (2018).

Rasio pajak yang rendah sebagian disebabkan oleh basis pajak yang sempit

Basis pajak Indonesia saat ini terlalu sempit. Kurang dari 10 persen penduduk Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan SPT tahunan, atau sekitar 15 persen dari jumlah pekerja yang dipekerjakan (Gambar B.22). Dibandingkan dengan tingkat sebesar 50 persen atau lebih tinggi di banyak negara maju¹²⁷.

‘Kualitas’ pemungutan pajak juga rendah

Indonesia saat ini menduduki peringkat yang lebih rendah pada indikator kemudahan membayar pajak dibandingkan dengan negara-negara setara pada laporan indikator Kemudahan Melakukan Usaha (*Doing Business*) Bank Dunia (Gambar B.24). Selain itu, kerumitan yang ada saat ini serta perlakuan yang tidak setara dalam peraturan pajak meningkatkan inefisiensi sistem pajak, yang menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan inklusif. Sebagai contoh, pengecualian PPN secara meluas menghasilkan “efek berjenjang (*cascading effect*)” di mana beberapa sektor dan/atau wajib pajak menanggung beban pajak yang lebih tinggi daripada yang seharusnya mereka tanggung jika PPN dilaksanakan secara merata dan pembebasan tidak diberikan¹²⁸. Hal ini merusak kaidah pemerataan PPN, dan mengganggu pertumbuhan sektor-sektor tersebut serta merugikan wajib pajak yang menanggung beban pajak yang lebih tinggi¹²⁹.

¹²⁷ Di Inggris, misalnya, 56,2 persen dari jumlah penduduk dewasa (yaitu, baik pekerja maupun non-pekerja) membayar pajak di tahun 2015-2016. Lihat *Institute of Fiscal Studies* (2016).

¹²⁸ Untuk penjelasan tentang masalah “*cascading effect*” dan bagaimana kaitannya dengan desain PPN, lihat Le (*Tuan Minh Le*) (2003).

¹²⁹ Selain itu, “*deadweight loss* (biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang diakibatkan oleh ketidakefisienan pasar – pent.)” yang terkait dengan pajak meningkat dengan meningkatnya inefisiensi, sama seperti yang diakibatkan oleh *cascading effect*.

Kotak B.1: Mengapa rasio pajak terhadap PDB Indonesia sangat rendah?

Berbagai faktor telah berinteraksi selama bertahun-tahun yang menyebabkan rasio pajak terhadap PDB yang rendah untuk Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia dapat dikelompokkan dalam empat tema: 1) siklus; 2) struktural; 3) kapasitas administrasi; dan 4) kebijakan pajak.

(1) **Faktor siklus.** Sebagian besar penerimaan Indonesia secara tradisional terkait dengan harga komoditas¹. Akibatnya, total penerimaan turun sekitar 1,6 poin persentase terhadap PDB di tahun 2014-2015 karena jatuhnya harga minyak. Meskipun terjadi peningkatan dalam harga minyak di tahun 2017, penerimaan negara bukan pajak belum mengalami peningkatan: menyumbang sekitar 2,3 persen terhadap PDB dibandingkan dengan 3,8 persen pada tahun 2014. Pendapatan pajak memiliki komponen yang bergantung pada siklus yang lebih luas: karena basis untuk pajak adalah komponen utama dari kegiatan ekonomi (konsumsi, investasi, dll.), sehingga guncangan secara siklis terhadap komponen-komponen ini menghasilkan guncangan siklis pula terhadap penerimaan pajak yang terkait. Sebagai contoh, dampak dari resesi global di tahun 2008 tercermin dalam penurunan tajam pada penerimaan pajak penghasilan non-migas, yang turun dari 1,6 persen terhadap PDB di tahun 2008 menjadi 0,9 persen terhadap PDB di tahun 2009.

(1) **Struktur perekonomian.** Besarnya komponen siklis dari harga komoditas secara langsung terkait dengan adanya fakta bahwa perekonomian Indonesia tetap bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan, khususnya dalam hal ekspor. Kurangnya diversifikasi dari penerimaan sumber daya alam merupakan salah satu kendala struktural bagi upaya pemungutan penerimaan Indonesia². Faktor lainnya adalah besarnya ekonomi informal, yang mewakili sekitar 57 persen tenaga kerja Indonesia³. Aktivitas informal cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah sehingga kurang mampu menanggung beban perpajakan. Selain itu, kurangnya digitalisasi atau jejak kertas yang terlibat dalam banyak transaksi informal menyebabkan biaya untuk mengenakan pajak kepada mereka menjadi lebih sulit dan mahal⁴.

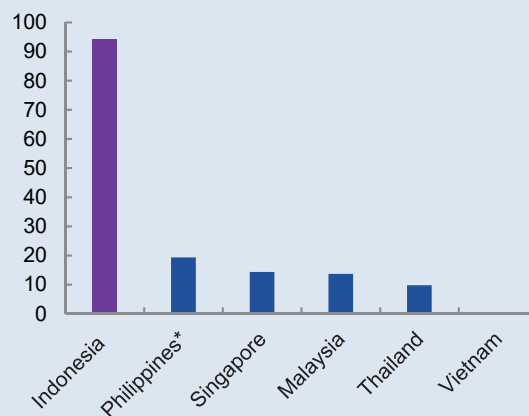
(1) **Kapasitas Administrasi Penerimaan.** Badan penerimaan pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi kendala kapasitas serta kelemahan organisasi yang berat⁵. Kapasitas TI dan staf adalah dua bidang yang menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Sistem TI di DJP sudah usang dan terbatas kapasitasnya. Selain itu, sebagian besar staf DJP kurang terampil dalam menjalankan fungsi manajemen risiko atau audit. Staf tidak terbantu

(1) akibat proses bisnis yang tidak efisien, serta penerapan kebijakan dan peraturan pajak yang terlalu rumit dan terkadang tidak pasti dan tidak jelas. Kapasitas administrasi penerimaan yang lemah berkontribusi terhadap basis pajak Indonesia yang sempit (kapasitas pendaftaran wajib pajak yang terbatas), dan yang lebih serius adalah terhadap rasio kepatuhan pajak yang rendah di antara basis pajak yang sudah ada⁶.

(1) **Kebijakan pajak.** Rasio pajak yang rendah di Indonesia juga merupakan produk keputusan atas desain kebijakan pajak. Kebijakan yang kurang optimal ini meliputi: a) pembebasan PPN yang ekstensif; b) ambang batas pendaftaran PPN yang tinggi (Gambar B.23); c) sistem preferensial yang distortif; d) ambang batas penghasilan tidak kena pajak yang tinggi untuk pajak penghasilan pribadi; dan e) kurangnya pemanfaatan koreksi eksternalitas perpajakan tembakau dan perpajakan hijau (green taxes). Banyak dari kebijakan tersebut dirancang dengan tujuan yang tidak seragam. Bagaimanapun juga, pada akhirnya kebijakan-kebijakan tersebut secara agregat telah menyebabkan terjadinya penyempitan basis pajak, penurunan beban pajak di beberapa sektor, jenis wajib pajak dan jenis kegiatan ekonomi, inefisiensi yang lebih besar, dan ruang yang lebih besar untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak⁷.

Gambar B.23: Ambang batas pendaftaran PPN Indonesia sebagai rasio dari PDB per kapita riil adalah yang tertinggi di dunia

(Ambang batas PPN sebagai rasio dari PDB per kapita)



Sumber: Informasi mengenai ambang batas PPN dari vatlive.com; data mengenai PDB dari Bank Dunia

Catatan: PDB per kapita adalah untuk tahun 2016 paritas daya beli (PPP); Rasio Filipina dihitung menggunakan ambang batas sebesar 3 juta Peso Filipina, yang hanya berlaku di bulan Januari 2018; ambang batas sebelumnya adalah sebesar 1,9 juta Peso Filipina; Vietnam tidak memiliki ambang batas minimum PPN

Persoalan yang disorot di atas sudah diketahui oleh staf teknis dan para pembuat kebijakan yang bergulat dengan perancangan dan penerapan program reformasi pajak Indonesia yang ambisius.

¹ Sebagai contoh, pada tahun 2014, 20 persen dari penerimaan terkait langsung dengan sektor minyak dan gas, dan 30 persen dari penerimaan berkorelasi positif dengan hal tersebut. Lihat Kotak 4 di World Bank (2017e) untuk pembahasan tentang hubungan antara penerimaan dan harga minyak dan gas.

² Menurut data dari Bank Indonesia, lebih dari sepertiga ekspor Indonesia tahun 2017 berasal dari kategori yang terkait dengan komoditas berikut ini: minyak kelapa sawit, produk minyak, gas alam cair dan produk pertambangan seperti batubara dan gas alam.

³ Perkiraan ukuran segmen pedesaan masyarakat dari survei rumah tangga Susenas.

⁴ Lihat misalnya Joshi dkk. (2014).

⁵ Untuk informasi lebih lanjut tentang tantangan langkah-langkah administrasi dan reformasi yang dilakukan Pemerintah, lihat World Bank (2017c). Reformasi adalah kunci untuk menurunkan biaya kepatuhan, dan untuk mengatasi masalah seperti korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berbicara secara terbuka mengenai kasus-kasus korupsi sebagai bagian dari upaya untuk memberantas masalah ini; lihat misalnya: Yoga Sukmana, "Sri Mulyani Jengkel dengan Petugas Pajak yang Ditangkap KPK", Kompas.com (11 November 2016). Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan, yang menjabat di akhir November 2017, juga telah menyampaikan kepada publik untuk menekankan bahwa tujuan utama di balik reformasi organisasi yang saat ini sedang dilaksanakan adalah untuk mencegah korupsi; lihat, misalnya, "Direktur Jenderal Pajak yang Baru Berkomitmen untuk Memerangi Korupsi", Netral News (6 Desember 2017).

⁶ Misalnya, Sugana dan Hidayat memperkirakan bahwa kepatuhan terhadap PPN adalah sekitar 56,6 persen. Lihat Sugana dan Hidayat (2014).

⁷ Untuk pembahasan tentang bagaimana pembebasan PPN dan ambang batas pendaftaran PPN yang tinggi mengikis basis, lihat Le (Tuan Minh Lee) (2003). Untuk informasi lebih lanjut tentang hubungan antara pembebasan pajak dan pemotongan serta penghindaran pajak, lihat Alm (2001) dan Feust dan Riedel (2009).

Rumitnya sistem pajak juga terlihat di sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, di samping tarif pajak penghasilan badan yang standar, Indonesia memiliki pemotongan tarif untuk PPh badan bagi perusahaan publik, pemotongan tarif yang berbeda untuk perusahaan dengan omset kurang dari Rp 50 miliar, insentif pajak yang berbeda, dan sistem pajak dengan dugaan (*presumptive*) untuk sektor konstruksi dan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di mana perusahaan dikenai pajak atas omset kotor mereka

dibandingkan dengan penghasilan kena pajak mereka. Sebagai hasil dari ketentuan yang berbeda ini, sistem pajak penghasilan badan adalah sistem yang rumit dan sulit bagi wajib pajak untuk memahaminya, dan tarif pajak efektif untuk berbagai wajib pajak badan bervariasi, sehingga merusak kesetaraan horizontal pajak dan berdampak pada pertumbuhan inklusif.

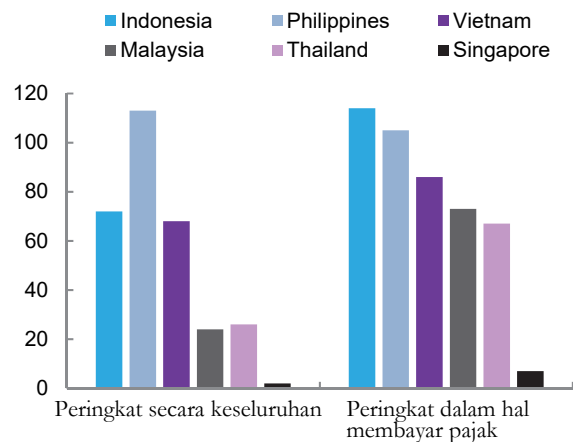
b. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan pemungutan pajak...

Pemerintah telah meningkatkan upaya untuk memungut

Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan proses yang menantang: undang-undangnya rumit dan membutuhkan penyeimbangan berbagai kepentingan politik dan bisnis sehingga dapat diloloskan melalui kabinet dan DPR. Kementerian

Gambar B.24: Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara lainnya dalam hal kemudahan membayar pajak pada Indikator Kemudahan Melakukan Usaha tahun 2018

(peringkat negara, di mana jika skor-nya lebih tinggi berarti peringkat negara tersebut lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara lainnya)



Sumber: Indikator Kemudahan Melakukan Usaha, Bank Dunia

penerimaan lebih banyak lagi

Keuangan sedang mempersiapkan perubahan undang-undang pajak yang utama, yang sedang dibahas dengan kementerian-kementerian lain dan para pemangku kepentingan yang terkait, serta menyusun strategi reformasi pajak jangka menengah hingga jangka panjang untuk menjadi pedoman bagi proses reformasi untuk beberapa tahun mendatang¹³⁰.

Meskipun kemajuan dalam meloloskan undang-undang pajak melalui DPR tersebut berjalan lambat, Pemerintah telah berusaha untuk memungut penerimaan lebih banyak lagi melalui tindakan jangka pendek serta melalui peraturan di tingkat Presiden dan tingkat Menteri. Program Amnesti Pajak (PAP) yang diluncurkan pada tahun 2016 meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi yang setara dengan 10,4 persen dari penerimaan pajak rata-rata di tahun 2013-15, dan menghasilkan adanya deklarasi terhadap total aset senilai Rp 4,882 triliun, 39,3 persen terhadap PDB tahun 2016¹³¹. Keberhasilan PAP ini sebagian didorong oleh kemampuan Pemerintah untuk mengajak orang perseorangan dengan kekayaan bersih yang tinggi untuk berpartisipasi¹³². Upaya untuk mengumpulkan penerimaan lebih banyak terhadap kelompok bagian atas dari kelompok tarif pajak (*tax bracket*) juga diupayakan melalui keterlibatan proaktif dalam Kerangka Inklusif yang diprakarsai oleh OECD untuk mengatasi tergerusnya basis pajak dan pengalihan keuntungan (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS), yang diadopsi Indonesia di bulan Juli 2016¹³³. Pada bulan Juni 2017, Indonesia menjadi salah satu penandatangan Konvensi Multilateral untuk Pelaksanaan Perjanjian Pajak mengenai Tindakan Terkait untuk Mencegah Tergerusnya Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (*Multilateral Instrument* atau MLI)¹³⁴, dan pada bulan September 2018, Indonesia telah siap untuk melakukan pertukaran informasi yang pertama sebagai bagian dari pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial account information*, AEOI). Melalui peraturan yang dikeluarkan setiap tahunnya, Pemerintah juga merevisi cukai tembakau, meningkatkan harga minimum yang diatur, dan menaikkan tarif (Kotak B.3).

... dan berusaha untuk memungut penerimaan lebih baik lagi, dengan menargetkan peningkatan kemudahan untuk membayar pajak...

Pemerintah juga berusaha untuk memungut penerimaan dengan lebih baik lagi, dengan memfasilitasi pembayaran pajak sehingga beban terhadap kepatuhan dari wajib pajak berkurang. Pada bulan Juli 2015, misalnya, Pemerintah meluncurkan aplikasi faktur PPN elektronik secara daring (*online*) yang memungkinkan pengajuan informasi terperinci mengenai barang dan jasa kena pajak oleh wajib pajak secara sistematis, sebagai bagian dari kebijakan mengamankan pengenaan PPN untuk dunia usaha yang mulai diberlakukan pada tahun 2016-17. Sistem pengajuan secara elektronik (*e-filing*) juga sedang dikembangkan dan diluncurkan, di mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk secara bertahap memberlakukan *e-filing* bagi pajak penghasilan badan dan pemotongan pajak dari gaji karyawan. Menerapkan

¹³⁰ Perubahan Undang-Undang Umum Perpajakan (UU KUP) telah diajukan ke DPR dan merupakan bagian dari agenda legislatif untuk tahun 2018. Perubahan undang-undang pajak utama lainnya yang sedang dilakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Materai dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Penyusunan strategi penerimaan jangka menengah hingga jangka panjang dipimpin oleh Badan Kebijakan Fiskal, dan mendapat manfaat dari bantuan teknis dari organisasi-organisasi internasional dan para pakar pajak. Lihat misalnya, IMF (2017a)

¹³¹ Lihat Kotak 2 di World Bank (2017a).

¹³² Lihat misalnya, Doebele (2016); Hutton (30 November 2016); dan Indonesia-Investments (3 September 2016).

¹³³ Lihat OECD (2017a).

¹³⁴ Lihat OECD (2017b).

reformasi semacam ini secara luas dan efektif adalah hal yang penting jika Indonesia ingin meningkatkan kemudahan untuk membayar pajak, di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara di bidang ini pada indikator-indikator Kemudahan Melakukan Usaha (*Doing Business*) Bank Dunia. Pengalaman internasional menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak dan manfaat ekonomi jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sukses. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengajuan SPT pajak dan pembayaran pajak akan mengurangi beban bagi para wajib pajak, mendorong tingkat kepatuhan secara sukarela yang lebih tinggi, serta menambah waktu dan sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif.¹³⁵

c. ... tetapi kebutuhan terhadap dan ruang lingkup untuk reformasi pajak tambahan tetaplah besar

Reformasi telah menghasilkan beberapa kemajuan, tetapi ruang untuk perbaikan tetap besar

Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan telah menghasilkan beberapa peningkatan yang terbatas hingga saat ini. Sebagaimana dibahas di Bagian A, Bagian 4 dari laporan ini, pemungutan penerimaan secara nominal meningkat di tahun 2017, sebagian besar karena dorongan harga komoditas, tetapi juga karena adanya kemajuan dari reformasi. Pertumbuhan ini berarti bahwa, saat penerimaan dari PAP dikeluarkan dari penghitungan, penurunan *yoj* dalam rasio pajak yang telah dimulai di tahun 2013 akhirnya dapat ditahan di tahun 2017 (Gambar B.21)¹³⁶. Tetapi dengan tambahan sebesar 4 persen terhadap PDB yang diperlukan untuk dibelanjakan di sektor-sektor prioritas utama untuk pertumbuhan inklusif, peningkatan yang lebih substansial dalam pengumpulan pajak masih sangat dibutuhkan. Namun demikian, penting untuk dicatat agar kebijakan pajak dan reformasi administrasi yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan tambahan dilaksanakan dengan cara yang efisien, adil, dan transparan (Kotak B.2).

Untuk dapat merealisasikan/memungut penerimaan yang lebih banyak, Pemerintah harus memprioritaskan reformasi yang memperluas basis pajak untuk berbagai pajak yang ada ...

Mengingat basis pajak Indonesia saat ini yang sempit, Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan perluasan basis pajak sebagai bagian dari upaya untuk memungut lebih banyak lagi. Perluasan ini terutama harus meliputi cakupan komprehensif dari kelas menengah Indonesia saat ini dan yang sedang muncul, yang mendapat manfaat dari tambahan belanja kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, serta mereka yang akan menikmati penghasilan yang lebih tinggi melalui adanya pertumbuhan PDB yang berkelanjutan, yang dengan demikian memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk membayar pajak di masa depan. Banyak langkah kebijakan yang masuk akal yang mungkin, dan saat ini sedang dipelajari oleh Pemerintah, termasuk: menurunkan ambang batas pendaftaran PPN; menurunkan ambang batas peredaran bruto di mana UMKM ditetapkan untuk berada di dalamnya; dan mengganti ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan kredit pajak untuk wajib pajak dari ambang batas penghasilan rendah tertentu¹³⁷.

... serta mempertimbangkan untuk

Upaya memungut lebih banyak sebagian juga dapat dicapai melalui pemberlakuan pajak baru, atau dengan menaikkan tarif pajak yang ada. Terdapat alasan yang kuat untuk memberlakukan pajak baru yang dapat mengatasi kegagalan pasar saat ini

¹³⁵ Lihat misalnya, *Institute of Chartered Accountants* di Inggris dan Wales (2016) serta Microsoft dan PricewaterhouseCoopers (PwC) (2017).

¹³⁶ Untuk informasi lebih lanjut tentang analisis tahun 2017, silakan lihat Bagian A dari laporan ini. Penerimaan dari biaya penebusan yang dipungut di PAP dapat dikecualikan karena diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak akan terulang lagi (*one-off*); keuntungan jangka menengah lainnya dari PAP (misalnya, wajib pajak baru yang tertarik ke jejaring pajak) diperlakukan sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas untuk memperluas basis dan meningkatkan kepatuhan.

¹³⁷ Untuk pembahasan lebih lanjut tentang agenda reformasi kebijakan, lihat World Bank (2017e)

memberlakukan pajak baru, atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada

sehubungan dengan adanya dampak dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Apa yang disebut sebagai “pajak hijau”, antara lain adalah pengenaan pajak terhadap emisi karbon dan penggunaan zat berbahaya seperti plastik yang tidak dapat terurai dan tembakau, yang bermanfaat positif dalam menghasilkan penerimaan pemerintah maupun mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kotak B.3 menjelaskan mengenai bagaimana menaikkan cukai tembakau Indonesia, mereformasi pajak untuk kendaraan bermotor, dan memberlakukan cukai kantong plastik yang baru dapat berkontribusi pada tujuan-tujuan tersebut.

Untuk memungut dengan lebih baik lagi, Pemerintah harus menyederhanakan pajak lebih lanjut ...

Penyederhanaan dalam peraturan pajak sangat diperlukan untuk mengatasi kerumitan yang ada yang menciptakan inefisiensi dan peluang untuk penghindaran pajak. Mengurangi pembebasan PPN sebagaimana dibahas di atas adalah salah satu cara untuk menyederhanakan sistem pajak. Menyederhanakan peraturan pajak penghasilan badan adalah reformasi lain yang patut dipertimbangkan. Langkah-langkah tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan kemudahan untuk membayar pajak, meningkatkan kesetaraan horizontal dari sistem pajak, dan mengurangi inefisiensi yang diakibatkannya.

... dan meningkatkan kepatuhan melalui upaya penegakan yang lebih baik ...

Seperti yang disebutkan di Kotak B.1, perkiraan untuk tingkat kepatuhan terhadap sebagian besar pajak utama Indonesia adalah sekitar 50 hingga 60 persen¹³⁸. Peningkatan kepatuhan membutuhkan penguatan kapasitas DJP yang besar. Misalnya, sistem TI yang ada di DJP sudah ketinggalan zaman dan banyak dari administrasi penerimaan masih bergantung pada kertas. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah berencana untuk membeli sistem IT komersial, yang merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dari proses bisnis dan reformasi organisasi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pergeseran budaya organisasi dan cara-cara bekerja untuk berfokus pada perusahaan dan manajemen risiko kepatuhan (*enterprise risk-management* atau ERM dan *compliance risk-management* atau CRM) adalah faktor penting untuk keberhasilan¹³⁹. Yang juga sama pentingnya adalah perubahan yang mensyaratkan untuk memperlakukan wajib pajak sebagai konsumen dan menetapkan target pada perbaikan secara reguler dalam kemudahan membayar pajak bagi masyarakat. Upaya untuk mengubah perilaku warga melalui suatu ‘sentuhan’—perubahan kecil dalam bagaimana pemerintah menjalankan operasinya—akan membantu, seperti ditunjukkan oleh bukti dari negara-negara lain¹⁴⁰. Pada akhirnya, sistem administrasi penerimaan yang paling efektif adalah sistem yang dapat memfasilitasi tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi¹⁴¹.

¹³⁸ Lihat Sugana dan Hidayat, *Ibid*.

¹³⁹ Lihat Khwaja, Awasthi, dan Loeprick (2011).

¹⁴⁰ Untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak inisiatif perilaku pada peningkatan kepatuhan pajak, lihat Kettle, Hernandez, Ruda dan Sanders (Juni 2016).

¹⁴¹ Disarankan agar rencana peningkatan kepatuhan secara komprehensif dirancang dengan memasukkan semua fitur tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Russell (2010).

Kotak B.2: Prinsip-prinsip pedoman untuk reformasi pajak Indonesia

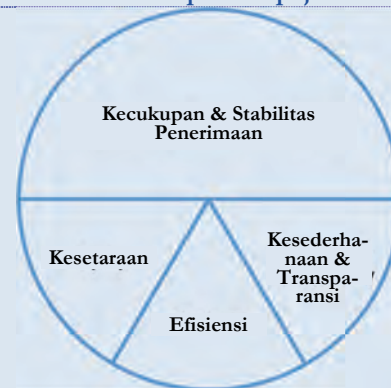
Reformasi kebijakan Indonesia harus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan yang diperlukan Pemerintah untuk melaksanakan rencana pengeluarannya dengan cara yang efisien, adil dan transparan¹ (Gambar B.26):

1. **Kecukupan dan stabilitas penerimaan.** Alasan mengenai diberlakukannya kebijakan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan yang memungkinkan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dengan baik selama jangka menengah sampai jangka panjang. Setelah kebutuhan pengeluaran diidentifikasi, dan penerimaan berdasarkan kebijakan yang ada diproyeksikan, kesenjangan antara kebutuhan pengeluaran dan proyeksi penerimaan dapat diperkirakan. Bagian dari 'kesenjangan' seperti ini dipenuhi melalui utang tambahan yang mungkin akan diambil oleh Pemerintah; sementara bagian lainnya berfungsi untuk memotivasi tujuan peningkatan penerimaan untuk reformasi pajak. Seringkali target tersebut dinyatakan dalam nisbah terhadap PDB. Memutuskan untuk "meningkatkan rasio pajak Indonesia sebesar 3 persen dalam lima tahun" akan menjadi contoh dari target penerimaan jangka menengah. Mengingat rasio pajak yang rendah serta kebutuhan pengeluaran yang tinggi di Indonesia, meningkatkan kecukupan penerimaan dari penerimaan pajak harus menjadi prinsip yang paling penting bagi agenda reformasi pajak.
2. **Efisiensi.** Kebijakan pajak selalu menghasilkan distorsi dalam ekonomi, tetapi jika dirancang secara efektif, inefisiensi dapat diminimalkan. Selain itu, beberapa kebijakan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi jika kebijakan-kebijakan tersebut mampu mengatasi kegagalan pasar (Kotak B.3).
3. **Kesetaraan.** Dua unsur kesetaraan yang penting untuk kebijakan pajak. "Kesetaraan vertikal" mengacu pada mempertahankan prinsip bahwa pajak harus ditanggung oleh mereka yang memiliki kapasitas terbesar untuk membayar. Prinsip ini memotivasi elemen progresif perpajakan: misalnya, dalam peraturan pajak penghasilan pribadi, penghasilan yang berada di kelompok tarif yang berbeda dikenai tarif yang berbeda. "Kesetaraan horizontal" adalah unsur yang kedua, dan berbicara mengenai prinsip bahwa obyek pajak yang sama harus mendapat perlakuan yang sebanding: misalnya, dua perusahaan yang menghasilkan tingkat pendapatan kotor yang sama harus dikenai tarif pajak efektif yang sama.
4. **Kesederhanaan dan transparansi.** Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi beban kepatuhan bagi wajib pajak dengan menyederhanakan peraturan pajak dan membuat agar semua ketentuannya transparan. Selain itu, transparansi dapat ditingkatkan melalui penerbitan pernyataan pengeluaran pajak setiap tahunnya yang mencantumkan semua pengeluaran pajak dalam sistem pajak, dan idealnya mengkuantifikasi dampaknya². Kesederhanaan dan transparansi pemerintah akan mempermudah tugas pengelolaan penerimaan, yang pada gilirannya akan memfasilitasi berjalannya manajemen kepatuhan yang lebih efektif dan lebih murah.

¹ Prinsip-prinsip ini banyak dijumpai di literatur pajak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat misalnya, Le, Jensens, Biletska dan Shukla (Juni 2016).

² Untuk informasi lebih lanjut tentang pengeluaran pajak, lihat: Brix, Valenduc, dan Swift (Ed.) (2004).

Gambar B.25: Reformasi harus meningkatkan kecukupan penerimaan, efisiensi, kesetaraan, kesederhanaan dan transparansi pajak



Reformasi kebijakan perpajakan yang berhasil dapat menghasilkan pertukaran (*trade-offs*), dan dilaksanakan dengan cara yang

Upaya untuk dapat menetapkan target bagi peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek-menengah harus pula menyeimbangkan tujuan-tujuan lainnya, terutama pertumbuhan dan pemerataan. Pertukaran (*trade-off*) tidak dapat dihindari. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah merancang suatu paket agar berbagai langkah yang berbeda dapat menangani berbagai tujuan sehingga dukungan untuk reformasi dapat diperluas dengan mengajukannya ke kelompok-kelompok yang berbeda. Upaya reformasi saat ini di Filipina telah mengadopsi strategi seperti itu (Tabel B.1). Langkah-langkah kebijakan yang dirancang dengan baik harus juga secara

memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan, dan memudahkan pelaksanaan administrasi penerimaan

hati-hati menilai bagaimana penerapan perubahan pajak dapat dilakukan dengan cara sedemikian rupa untuk mengurangi risiko di industri dan dunia usaha, dan menurunkan biaya kepatuhan. Satu contoh yang baik adalah mengenai pajak di Swiss atas emisi senyawa organik bergejolak (*volatile organic compound*, VOC). Kebijakan ini diberlakukan pada tahun 1997 sebagai bagian dari upaya untuk ‘menghijaukan’ pajak di Swiss, tetapi undang-undang tersebut diberlakukan dengan masa percobaan selama dua tahun, sehingga industri tersebut memiliki kesempatan untuk berinovasi dengan rancangannya dan menyesuaikan prosesnya, sehingga otoritas pajak dapat membangun kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengelola pajak baru tersebut¹⁴². Sosialisasi secara luas dari reformasi yang diusulkan juga merupakan faktor penentu keberhasilan: jika masyarakat tidak memahami perubahan pajak, ini akan mendorong munculnya kebingungan, atau yang lebih buruk lagi, ketidakpercayaan terhadap sistem, yang mengurangi tujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi reformasi pajak tahun 2010 di Denmark adalah salah satu contoh yang baik, di mana Komisi Pajak Denmark menyiarkan secara langsung rekomendasi-rekomendasinya atas reformasi pajak sebagai bagian dari proses penyusunan undang-undang¹⁴³. Keberhasilan dan kekurangan dari reformasi baru-baru ini di negara-negara lain memberikan beberapa pelajaran dan cerminan bagi Indonesia. Dua kasus reformasi baru-baru ini yang menghasilkan pemungutan pajak yang lebih tinggi ditinjau secara singkat di Tabel B.1.

¹⁴² OECD (2011).

¹⁴³ Lihat OECD (2010) dan Kementerian Perpajakan Denmark (2009).

Tabel B.1: Pengalaman reformasi pajak internasional belum lama ini

Negara	Tahun	Lingkup Reformasi Pajak	Fitur Unik	Dampak
Filipina	2017-saat ini	Komprehensif termasuk PPN, PPh Pribadi (PIT) / PPh Badan (CIT), Cukai	Reformasi menyeimbangkan pertukaran (<i>trade-off</i>) yang dirancang dalam paket. Paket ke-1 dari 5 paket diberikan untuk pemotongan pajak penghasilan pribadi, menurunkan pajak bumi dan bangunan, mengurangi pembebasan PPN, tetapi meningkatkan ambang batas; reformasi ini meningkatkan pajak cukai, termasuk pada mobil, bahan bakar, dan minuman yang diberi pemanis. Reformasi administrasi termasuk <i>e-invoice</i> wajib bagi para wajib pajak besar dan eksportir, serta penandaan dan meteran bahan bakar wajib.	Diharapkan memiliki dampak positif bagi penerimaan, dengan tambahan peningkatan sebesar 0,5 persen terhadap PDB dalam rasio pajak dari paket 1 pada tahun 2018. Kesetaraan dalam sistem perpajakan diperkirakan akan menurun. Pemerintah menargetkan peningkatan dalam progresivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan melalui sisi pengeluaran
Meksiko	2013-2014	Meluas, berfokus pada reformasi pajak penghasilan dan cukai	Tarif pajak usaha yang merata (<i>Impuesto Especial a Tasa Unica</i> , IETU) dan pajak atas setoran tunai dihapus, diganti dengan pajak atas dividen. Memberlakukan pajak 'dosa' pada minuman yang diberi pemanis dan emisi karbon	Reformasi yang berdampak positif terhadap penerimaan, dengan kenaikan tarif pajak dari 13,8 di tahun 2013 menjadi 17,2 di tahun 2016. Peningkatan kesetaraan horizontal melalui penghapusan perlakuan istimewa pada kegiatan sektor primer. Tetapi reformasi pajak telah dikritik oleh beberapa analis sebagai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan, setidaknya dalam jangka pendek

Sumber: Untuk Filipina, lihat "Panduan untuk T.R.A.I.N (*Tax Reform for Acceleration and Inclusion*, Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi)", Kantor Juru Bicara Presiden (Januari 2018) dan "Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi - Paket 1", PricewaterhouseCoopers, Pemberitahuan mengenai masalah Pajak (*Tax Alert*) No. 34. Untuk reformasi pajak Meksiko, lihat: "Reformasi pajak Meksiko ditandatangani oleh Presiden dan diterbitkan", Ernst & Young, Global Tax Alert (13 Desember 2013); Gutierrez, Boyle dan Graham, Reuters (1 November 2013); dan Alvarez-Estrada (2013). Untuk informasi lebih lanjut tentang reformasi kebijakan pajak, lihat OECD (2010).

Kotak B.3: Pengenaan cukai untuk mengatasi eksternalitas

Cukai adalah instrumen kebijakan fiskal populer yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan untuk mengoreksi eksternalitas (biaya atau kerugian yang harus ditanggung oleh suatu pihak akibat adanya suatu aktivitas ekonomi—pent.) yang menghambat pertumbuhan inklusif. Misalnya, Indonesia dapat menaikkan cukai tembakau, mengefisienkan dan menaikkan pajak kendaraan bermotor, serta memberlakukan cukai terhadap kantong plastik sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi eksternalitas negatif pada kesehatan dan lingkungan.

Indonesia dapat menaikkan cukai tembakau untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan penerimaan

Cukai tembakau adalah jenis cukai yang paling umum, mengingat dampak negatif terhadap kesehatan dari konsumsi tembakau dan biaya terhadap ekonomi dalam memerangi dampak tersebut¹. Indonesia diperkirakan memiliki tingkat konsumsi tembakau per kapita tertinggi kedelapan di dunia (Tabel B.2). Pajak atas tembakau di Indonesia secara historis rendah, tetapi telah ditingkatkan di dalam peraturan tahunan dari tahun 2015-2018. Saat ini, total penerimaan pajak Indonesia untuk tembakau lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara setara di kawasan, tetapi masih lebih rendah daripada beberapa negara berkembang lainnya dan lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara maju (Gambar B.26). Selain itu, sebagian besar pajak Indonesia untuk tembakau berasal dari pajak cukai, yang rumit karena adanya beberapa tingkatan pengenaan cukai. Dengan demikian, sementara tarif pada merek yang paling banyak terjual pada tahun 2016 adalah sebesar 44,3 persen, produk dengan harga yang lebih rendah yang diproduksi oleh perusahaan rokok kecil dikenai pajak setengah dari tarif tersebut atau lebih rendah lagi. Dasar pemikiran untuk struktur beberapa tingkatan pengenaan cukai ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk dengan tingkat yang rendah bertanggung jawab atas lebih dari separuh dari total seluruh pabrik yang ada di dalam industri tembakau dan bertanggung jawab untuk mempekerjakan pangsa yang signifikan dari para pekerja di industri manufaktur tembakau (44 persen). Namun demikian, studi yang akan diterbitkan oleh Bank Dunia mendatang mendapati bahwa baik petani tembakau maupun pekerja di industri manufaktur tembakau hanya sebagian saja yang bergantung pada penghasilan dari tembakau, dan bahwa penanaman tembakau tidak menguntungkan bagi sebagian besar petani². Dengan demikian, mendorong petani tembakau untuk beralih ke produk-produk pertanian lainnya dapat membawa keuntungan ekonomi bagi para petani tersebut, serta berkontribusi untuk mengurangi produksi tembakau di Indonesia. Cukai tembakau yang lebih tinggi akan menimbulkan efek seperti itu melalui penurunan permintaan terhadap rokok.

Tabel B.2: Tingkat konsumsi rokok Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia

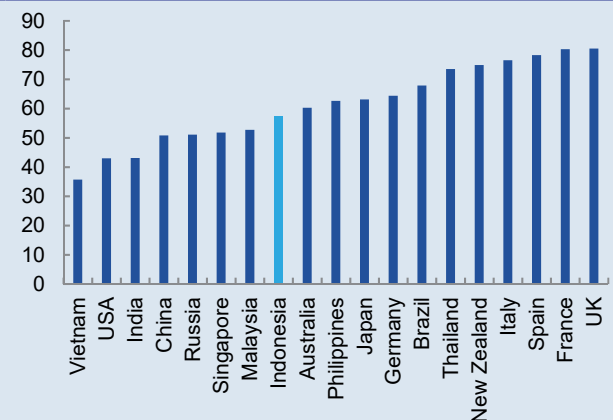
Negara	Tingkat konsumsi per kapita	Total Konsumsi (miliar)
Rusia	1	321,4
Tiongkok	2	2.568,1
Korea Selatan	3	87,7
Jepang	4	189,3
Jerman	5	106,4
Turki	6	89,6
Vietnam	7	87,1
Indonesia	8	239,2
Amerika Serikat	9	281,3

Sumber: Data konsumsi rokok dari *Euromonitor International*, 2014, dikutip di tobaccoatlas.org; Jumlah penduduk tahun 2014 dari Bank Dunia

Catatan: Jumlah Angka Konsumsi adalah jumlah batang rokok yang dijual eceran termasuk setara batang rokok yang digulung sendiri oleh penikmat (*roll-your-own*, RYO)

Gambar B.26: Pajak tembakau Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang dan banyak negara maju

(total penerimaan pajak sebagai nisbah dari harga eceran pada merek yang paling banyak terjual)



Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2017), perhitungan staf Bank Dunia.

Indonesia dapat mengefisiensikan dan menaikkan pajak untuk kendaraan bermotor

Indonesia memungut pajak penjualan barang mewah (PPnBM) rata-rata sebesar 0,2 persen terhadap PDB, 90 persen di antaranya diperkirakan berasal dari PPnBM untuk kendaraan bermotor. PPnBM yang dikenakan pada kendaraan bermotor adalah pajak *ad valorem* (pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor—pent.) pada harga pabrik kendaraan dengan tarif yang berbeda-beda untuk berbagai jenis kendaraan bermotor (mulai dari 0 hingga 75 persen dari harga pabrik). Sistem *ad valorem* ini menciptakan risiko yang signifikan untuk *transfer pricing*³ antara produsen dan dealer di mana harga pabrik yang dilaporkan (untuk keperluan pajak) lebih rendah dari harga pabrik sesungguhnya. Peraturan pajak saat ini juga membedakan beberapa kategori mobil dan tidak konsisten dengan pertimbangan lingkungan; misalnya, bak terbuka (*pick-up*)/truk diberi nilai nol, meskipun mereka menyebabkan lebih banyak kerusakan lingkungan dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya.

Pajak ini dapat direformasi dalam dua cara untuk meningkatkan potensi penerimaannya, meningkatkan efisiensi dan kesetaraan, serta mengatasi eksternalitas negatif yang terkait dengan lingkungan. Pertama, Pemerintah dapat mengubah pajak *ad valorem* PPnBM menjadi pajak cukai tertentu, yang seharusnya mengurangi kesenjangan kepatuhan dengan mengurangi dampak terhadap penerimaan dari praktik *transfer pricing*. Kedua, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak agar sistem menjadi lebih adil (dengan menghapus diskriminasi dan perlakuan istimewa) dan membuat sistem tersebut lebih konsisten dengan mengatasi eksternalitas negatif (pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan yang memiliki dampak lingkungan negatif yang lebih besar). Menurut analisis bersama yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Dunia, perubahan yang diusulkan untuk pajak pada kendaraan bermotor dapat menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 0,64 persen terhadap PDB, peningkatan yang signifikan terhadap rasio pajak yang ada (9,9 persen di tahun 2017).

Indonesia dapat memberlakukan cukai kantong plastik untuk membantu mengatasi masalah lingkungan

Indonesia diperkirakan memiliki persentase sampah plastik yang terbesar kedua di antara 192 negara pantai di dunia, menghasilkan 0,48-1,29 juta metrik ton sampah laut plastik setiap tahunnya⁴. Sampah plastik, khususnya di lingkungan laut, semakin mengkhawatirkan karena persistensi dan dampaknya terhadap lautan, margasatwa, dan manusia.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah lautnya sebesar 70 persen pada tahun 2025⁵. Pada bulan Juni 2016, Pemerintah meluncurkan program nasional untuk mengurangi sampah plastik dengan mengenakan pungutan terhadap kantong plastik. Setelah tiga bulan program ini berjalan, kantong plastik yang digunakan turun lebih dari 25 persen, menurut perkiraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun telah mengalami keberhasilan awalnya, program ini dihentikan setelah tiga bulan karena adanya tantangan hukum di sekitar dasar pengenaannya dan bagaimana mengatur penerimaan yang dipungut dari kantong plastik tersebut. Pengalaman tahun 2016 ini mengilustrasikan dampak potensial positif dari pajak terhadap kantong plastik. Menambahkan cukai kantong plastik sebagai bagian dari perubahan UU Cukai saat ini sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah dan akan menyelesaikan tantangan hukum terhadap kebijakan tersebut yang telah dihadapi di tahun 2016. Pengalaman yang menggembirakan dari Inggris: retribusi sebesar 5-sen pada kantong plastik menghasilkan penurunan tajam dalam penggunaannya, sebesar lebih dari 80 persen, di berbagai bagian Inggris. Selain itu, kebijakan tersebut terbukti menjadi langkah yang populer di kalangan masyarakat, dengan satu survei yang mendapati adanya dukungan sebesar 80 persen di Wales dan 61 persen di Inggris dan Skotlandia⁶.

¹ Tembakau secara langsung terkait dengan penyakit tidak menular (PTM) termasuk penyakit pada sistem peredaran darah, berbagai bentuk kanker, penyakit pernapasan kronis dan penyakit metabolik (Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS., 2014).

² World Bank (2018c, akan datang)

³ *Transfer pricing* mengacu pada pengaturan harga di mana barang atau jasa dijual di antara badan hukum yang berbeda dalam suatu perusahaan. Ini dapat digunakan untuk menghindari dari pajak penghasilan

⁴ Jambeck dkk. (2015).

⁵ "Fitur: Misi PBB untuk mencegah masuknya plastik ke lautan dan kehidupan laut," PBB (22 April 2017).

⁶ Lihat, misalnya, *Zero Waste Scotland* (2015), Smithers (2015) dan Poortinga dkk. (2016).

6. Bagaimana Indonesia dapat memungut lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif?

Untuk mempercepat penurunan ketimpangan dan mempercepat pertumbuhan membutuhkan upaya terus-menerus untuk memungut penerimaan lebih banyak lagi dan membelanjakan lebih baik

Indonesia dapat meningkatkan kontribusi dari kebijakan fiskal untuk pertumbuhan inklusif dengan membelanjakan dengan lebih baik dan memungut penerimaan lebih banyak.

Kebutuhan untuk membelanjakan lebih banyak di sektor-sektor prioritas – infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial – sangatlah mendesak. Ini hanya akan dapat dilakukan jika peningkatan alokasi belanja terus berlanjut. Namun demikian, Indonesia juga harus meningkatkan efektivitas belanja publik di semua sektor, dan khususnya di sektor pendidikan, untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Sumber daya harus dialokasikan untuk program-program yang ditargetkan dengan baik yang mengarah pada peningkatan hasil dan yang mendorong kesetaraan peluang.

Bagaimanapun juga, pada akhirnya pengeluaran akan dibatasi secara signifikan jika Pemerintah berusaha memungut penerimaan lebih banyak dan lebih baik tapi tidak diterjemahkan ke dalam pelaksanaan reformasi pajak yang berarti. Reformasi kebijakan harus menargetkan perluasan basis pajak yang sudah ada, meningkatkan tarif pada beberapa pajak, dan membuat sistem secara keseluruhan menjadi lebih efisien. Reformasi administrasi harus berfokus pada peningkatan manajemen kepatuhan dengan mempermudah pembayaran pajak dan dengan memperkuat kapasitas DJP.

Reformasi belanja dan penerimaan secara gabungan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil dari pertumbuhan tersebut juga akan dibagi bersama secara lebih luas. Pengeluaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi untuk infrastruktur akan membantu menghubungkan lebih banyak komunitas yang satu dengan yang lainnya dan membuka akses pasar yang lebih besar bagi individu dan bisnis. Pengeluaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi untuk layanan kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan harapan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan meningkatkan modal manusia yang mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan di masa depan. Dengan cara ini, reformasi fiskal, baik pada penerimaan maupun pengeluaran, akan membantu Indonesia mempercepat penurunan ketimpangan dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Memungut penerimaan lebih banyak dan membelanjakan lebih banyak lagi adalah alat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan ketimpangan. Sudah diterima secara luas bahwa kebijakan seperti ini memerlukan adanya konsensus politik, yang mungkin bisa lebih sulit dicapai mengingat pemilu mendatang ini. Namun demikian, karena kontribusinya untuk mempertahankan pembangunan ekonomi jangka panjang, sangatlah penting dilakukan agar Indonesia dapat membuat kemajuan yang berarti dalam menuju pertumbuhan yang inklusif.

Lampiran 1**Komitmen Umum terhadap metodologi Kesetaraan:**

Kita mulai dengan *penghasilan pasar* – semua penghasilan rumah tangga dari sumber-sumber non-pemerintah, termasuk penghasilan dari bekerja (upah dan gaji), penghasilan dari tabungan dan investasi (pembayaran uang sewa, bunga, dividen), bantuan dana dari rumah tangga lain atau orang perseorangan (seperti pengiriman uang).

Dari penghasilan pasar, beberapa rumah tangga akan membayar pajak penghasilan pribadi atau iuran untuk program dana pensiun publik, yang mengurangi penghasilan menjadi *penghasilan pasar bersih*.¹⁴⁴ Beberapa rumah tangga dapat menerima bantuan tunai (seperti dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, atau PKH, bantuan langsung tunai bersyarat di Indonesia), yang akan menghasilkan penghasilan yang dapat dibelanjakan yang lebih tinggi, yang tersedia untuk konsumsi.¹⁴⁵

Ketika rumah tangga melakukan konsumsi, mereka dapat membeli barang yang disubsidi oleh Pemerintah, seperti bahan bakar atau makanan. Hal ini memiliki efek meningkatkan penghasilan efektif mereka, karena mereka tidak membayar harga penuh dan secara tidak langsung menerima pengeluaran pemerintah. Pada saat yang sama, mereka mungkin membayar pajak atas konsumsi mereka, melalui pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), atau cukai seperti tembakau dan alkohol. Dalam hal ini harga akhir yang mereka bayar lebih tinggi dari harga pasar, dan mereka secara tidak langsung memberikan penerimaan kepada Pemerintah. *Penghasilan yang dapat dibelanjakan atau penghasilan pasca fiskal* adalah penghasilan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, disesuaikan dengan seberapa banyak rumah tangga tersebut secara tidak langsung menerima dari dan membayar kepada Pemerintah melalui konsumsinya (yaitu pajak tidak langsung dan subsidi tidak langsung).

Akhirnya, rumah tangga dapat mengkonsumsi layanan publik bersubsidi, seperti kesehatan dan pendidikan, yang merupakan bantuan langsung ke rumah tangga dalam bentuk natura (dengan cara non-tunai). Namun demikian, rumah tangga juga dapat membayar sejumlah biaya sebagai bagian dari penerimaan layanan ini, yang mengurangi manfaatnya bagi mereka. *Penghasilan akhir* memperhitungkan baik biaya dari layanan secara natura yang diterima dan pembayaran apa pun yang dilakukan oleh rumah tangga.

Sumber: Lustig, Nora, dan Sean Higgins. 2013. Komitmen terhadap Penilaian Ekuitas (*Commitment to Equity Assessment*, CEQ): Memperkirakan Kejadian Belanja Sosial, Subsidi, dan Pajak. (Buku Pegangan). Kertas Kerja CEQ No. 1, Juli 2011; direvisi Januari 2013. New Orleans: Universitas Tulane.

Metodologi untuk Indonesia:

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) digunakan untuk mencari tahu siapa yang menerima manfaat. Survei rumah tangga ini mengidentifikasi rumah tangga mana yang menerima bantuan tunai atau hampir tunai (PKH, BSM, Raskin), berapa banyak rumah tangga yang membelanjakannya untuk energi bersubsidi (bbm dan listrik), dan berapa anak mereka yang bersekolah dan di tingkat mana, serta jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan yang telah mereka lakukan. Survei ini juga memiliki informasi tentang berapa banyak yang dibelanjakan oleh setiap rumah tangga, dan untuk barang-barang apa, yang memfasilitasi perhitungan PPN dan cukai tembakau.

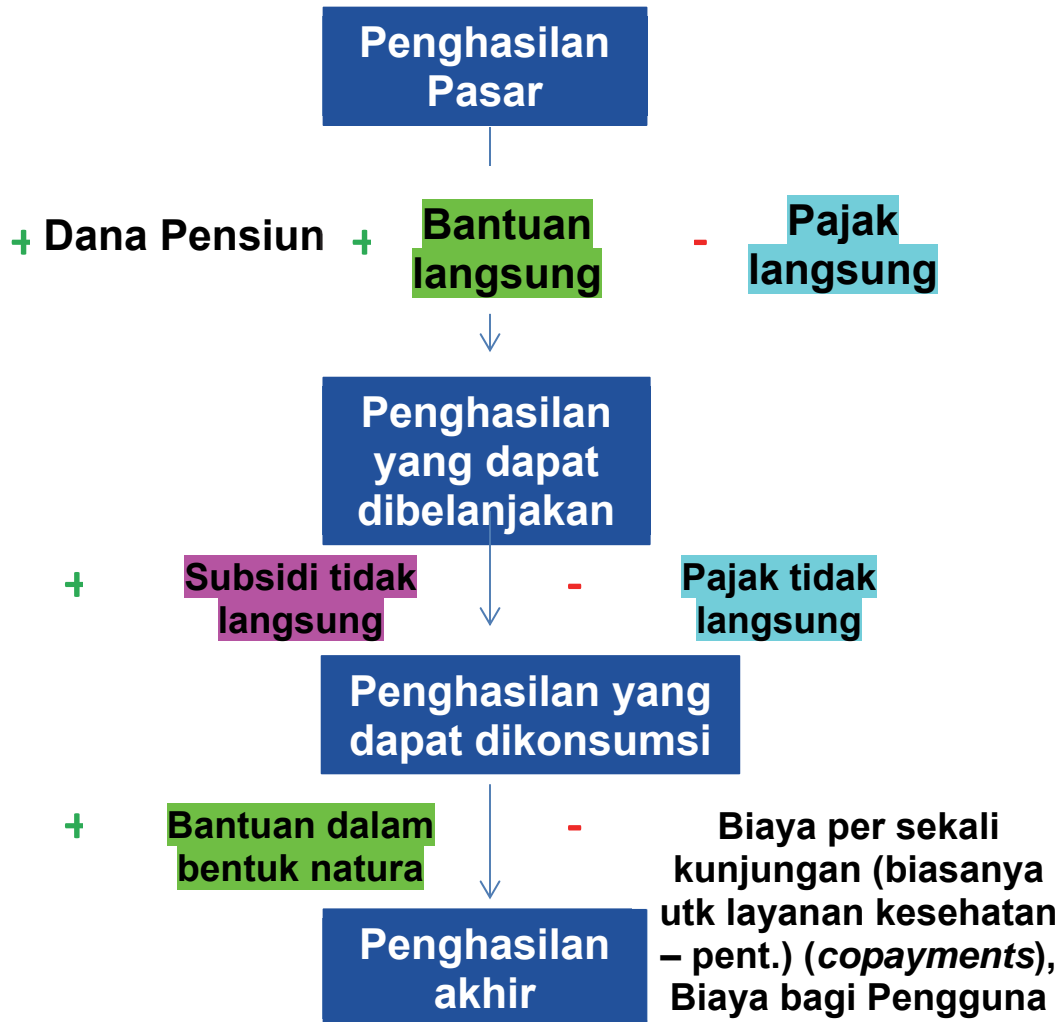
Informasi ini digabungkan dengan informasi mengenai pajak dan pengeluaran dari sistem neraca nasional (*national accounts*) Indonesia dan data fiskal administratif untuk menentukan seberapa banyak manfaat yang diperoleh rumah tangga dari setiap belanja yang dilakukan. Sebagai contoh, jika Pemerintah membelanjakan rata-rata USD 1.000 per anak sekolah dasar (SD), dan USD 3.500 per anak SMP, maka rumah tangga dengan dua anak yang bersekolah di SD dan satu anak SMP menerima tunjangan belanja dalam bentuk natura senilai

¹⁴⁴ Hasil dari CEQ untuk Indonesia yang dilaporkan di sini tidak memperhitungkan pajak penghasilan pribadi.

¹⁴⁵ Hanya konsumsi yang diamati dalam data Indonesia, yang dianggap sama dengan penghasilan yang dapat dibelanjakan. Kenyataannya, beberapa rumah tangga, terutama yang lebih kaya, akan menabung sebagian dari penghasilan mereka.

USD 5.500. Jika setiap liter bbm disubsidi sebesar USD 0,50, maka rumah tangga yang mengkonsumsi 100 liter per bulan menerima tunjangan subsidi sebesar USD 50 per bulan, atau USD 600 per tahun.

Sumber: Jellema, J., M. Wai-Poi dan R. Afkar. 2017. Dampak Distribusi Kebijakan Fiskal di Indonesia. Kertas Kerja Komitmen untuk Ekuitas No. 40, Mei 2017. New Orleans: Universitas Tulane.



Referensi

- Aghion, P. and P. Bolton. 1997. "A Theory of Trickle-Down Growth and Development." *The Review of Economic Studies* (Vol. 64, No. 2, April 1997).
- Alesina, A. and R. Perotti. 1996. "Income distribution, political instability, and investment". *European Economic Review*, Elsevier, vol. 40(6), pages 1203-1228, June.
- Alm, J. 2001. "Societal institutions and tax evasion in developing and transition countries". Georgia State University.
- Alvarez-Estrada, D. 2013. "2013 Tax Reform Proposal in Mexico: A New Chapter of a Never-Ending Reform Process." *Wilson Center* (September 23, 2013).
- Banerjee, A.V. and AF. Newman. 1993. "Occupational Choice and the Process of Development". *The Journal of Political Economy*, Vol. 101, No. 2. (April 1993)
- Banerjee, A. and E. Duflo. 2007. "The Economic Lives of the Poor." *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 21, No. 1, (Winter 2007)
- Bank Indonesia. December 14, 2017. Press release. http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199517.aspx
- Berg, A. and J.D. Ostry. 2011. "Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?" IMF Staff Discussion Note 11/08. Washington: International Monetary Fund.
- Brixi, H.P., C, MA. Valencuc and Z.L Swift (Ed.). 2004. "Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System," *The World Bank* (2004).
- Bulman, D., M. Eden and H. Nguyen. 2016. "Transitioning from Low-Income Growth to High Income Growth. Is There a Middle Income Trap?" Policy Research working paper; no. WPS 7104. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/229641468180252928/Transitioning-from-low-income-growth-to-high-income-growth-is-there-a-middle-income-trap>
- CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. December 2017. CPB World Trade Monitor. <https://www.cpb.nl/en/figure/cpb-world-trade-monitor-december-2017>
- Danish Ministry of Taxation. 2009. "Danish Tax Reform 2010". Paper to the OECD WP 2 meeting, November 2009.
- Dao, M.Q. 2012. "Government expenditure and growth in developing countries." *Progress in Developing Studies*, Vol 12, No. 1 (2012);
- De Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan, H. Rogers. 2017. "Double for nothing? experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia". Policy Research working paper No. WPS8264. Washington, DC: World Bank
- DJPPR. 2017. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2030/transaksi-penjualan-surat-utang-negara-dalam-valuta-asing-tahun-2017-dalam-rangka-pre-funding-tahun-anggaran-2018-sebesar-usd4-0-miliar-dengan-format-sec-registered-standalone>
- Doebele, J. and J. Hutton. (November 30, 2016). "Nine Indonesian Tycoons Agree to Disclose Hidden Assets to Tax Office," *Forbes*
- Economist Intelligence Unit. February 2018. World Commodity Forecast: Main Report.
- Engle, P., L. Fernald, H. Alderman, J. Behrman, C. O'Gara, A. Yousafzai, M. Cabral de Mello, M. Hidrobo, N. Ulkuer, I. Ertem, and S. Iltus. 2011. "Strategies for Reducing Inequalities and Improving Developmental Outcomes for Young Children in Low-Income and Middle-Income Countries." *The Lancet* 378 (9799): 1339–53
- Fan, S. and N. Rao. 2003. "Public Spending in Developing Countries: Trends, Determination, and Impact" International Food Policy Research Institute (February 2003)

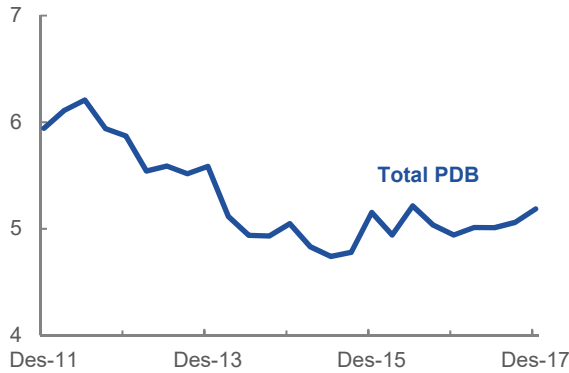
- Feust, C. and N. Riedel. 2009. "Tax evasion, tax avoidance and tax expenditure in developing countries". Oxford University Center for Business Taxation.
- Financial Times. 2018. Global equities under pressure for second day. <https://www.ft.com/content/89b7338c-055b-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5>
- Forbes.com. 30 November 2016. <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2016/11/30/indonesias-richest-take-advantage-of-amnesty/#114bd2c17f8f>
- Inchauste, G. and N. Lustig. 2017. *The Distributional Impacts of Taxes and Transfers: Evidence from Eight Low-and Middle-Income Countries*. Washington, D.C.: World Bank Group. <https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-1-4648-1091-6?download=true>
- Indonesia-investment.com. 2017. "Three giant businessmen join Indonesia's tax amnesty program". Available online at <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/three-giant-businessmen-join-indonesia-s-tax-amnesty-program/item7155?> September 3, 2017.
- IEA. 2017. The 2017 World Energy Outlook. <https://www.iea.org/weo2017/>
- International Monetary Fund. 2015. Fiscal Policy and Long-Term Growth. Washington, D.C.: International Monetary Fund. <http://www.imf.org/external/pp/ppindex.aspx>
- International Monetary Fund. 2017a. "Indonesia 2017 Article IV Consultation Staff Report," Country Report No. 18/32.
- International Monetary Fund. 2017b. IMF Fiscal Monitor. October
- International Monetary Fund. 2018. World Economic Outlook Update: Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead. January. Washington DC: IMF
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 2016. "Digitalisation of Tax: International Perspectives".
- Institute of Fiscal Studies. 2016. "The changing composition of UK tax revenues," Institute of Fiscal Studies Briefing Note BN182, 2016
- Jakarta Globe. November 30, 2017. <http://jakartaglobe.id/business/google-pays-2015-back-taxes-owed-to-indonesia-in-full/>
- Jambeck, J. et al. 2015. "Plastic waste inputs from land into the ocean," *Science*, Vol. 347, Issue 6223
- Jeffrey Hutton, "Nine Indonesian Tycoons Agree to Disclose Hidden Assets to Tax Office," *Forbes* (November 30, 2016); and "Three Giant Businessmen Join Indonesia's Tax Amnesty Program," *Indonesia-Investments* (September 3, 2016).
- Jellema, J., M. Wai-Poi and R. Afkar. 2017. The Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia. Commitment to Equity Working Paper No. 40. May 2017. New Orleans: Tulane University
- Joshi, A., W. Prichard, C. Heady. 2014. "Taxing the Informal Economy: The Current State of Knowledge and Agendas for Future Research", *The Journal of Development Studies*, 50(10), 1325-1347
- Kemenkeu. February 2018. Financial Note. <https://www.kemenkeu.go.id/media/7159/apbn-kita-edisi-februari-2018.pdf>
- Kettle, S., M. Hernandez, S. Ruda and M.Sanders. June 2016. "Behavioral Interventions in Tax Compliance: Evidence from Guatemala," The World Bank, *Policy Research Working Paper* 7690
- Khwaja, M. S., R. Awasthi and J. Loeprick. 2011, "Risk-Based Tax Audits: Approaches and Country Experiences," *The World Bank* (2011)
- Kompas. January 15, 2018. <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/21321251/februari-2018-dana-pkh-tahap-pertama-dicairkan-untuk-10-juta-keluarga>
- Kray, A. and McKenzie, D. 2014. "Do Poverty Traps Exist? Assessing the Evidence." *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 28, No. 3 (Summer 2014)
- Le, T.M. 2003. "Value-Added Taxation: Mechanism, Design, and Policy Issues".

- Le, T.M., L. Jensens, N. Biletska and G.P. Shukla. June 2016. "Assessing Domestic Revenue Mobilization: Analytical Tools and Techniques." The World Bank, MFM Discussion Paper
- Lopez, R. and G. Galinato. 2007. "Should governments stop subsidies to private goods? Evidence from rural Latin America". *Journal of Public Economics*, 2007, vol. 91, issue 5-6, 1071-1094
- Metal Bulletin. December 27, 2017. <https://www.metalbulletin.com/Article/3775728/coking-coal/2017-REVIEW-Coking-coal-market-not-catching-a-break.html>
- Metro TV News (February 07, 2018). <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/GNIJyagk-realisasi-penyaluran-bantuan-pangan-nontunai-meleset>
- Microsoft and PriceWaterHouseCoopers (PwC). 2017. "Digital Transformation of Tax Administration"
- Mitchell, D. 2005. "The Impact of Government Spending on Economic Growth." The Heritage Foundation (March 15, 2005)
- Netral English. February 3, 2018. <http://www.en.netralnews.com/news/business/read/18080/rupee.volatility.in.january.2018.consider-ed.stable.and.safe>
- OECD. 2010. "Tax Policy Reform and Economic Growth". OECD Tax Policy Studies, No. 20.
- _____. 2011. "Taxation, Innovation and the Environment: A Policy Brief". September 2011.
- _____. 2017a. "Inclusive Framework on BEPS." Progress report July 2016-June 2017
- _____. 2017b. "Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent BEPS". <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>
- Ostry, J.D., A. Berg and C.G. Tsangarides. 2014. "Redistribution, Inequality, and Growth". Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Parandekar, S.D. and E. Sedmik. 2016. "Unraveling a secret: Vietnam's outstanding performance on the PISA test". Policy Research working paper; no. WPS 7630. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/258431468196137980/Unraveling-a-secret-Vietnam-outstanding-performance-on-the-PISA-test>
- Poortinga, W.; E. Sautkina, G. O. Thomas, E. Wolstenholme. "The English Plastic Bag Charge". Cardiff University, September 2016
- Republika. January 15, 2018. <http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/15/p2lvax383-kurang-bayar-anggaran-subsidi-energi-membengkak-pada-2017>
- Reuters. November 1, 2013. Mexican Congress passes diluted government tax reform.
- Reuters. December 5, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-column-russell-coal-china/china-trims-appetite-for-coal-imports-but-prices-hold-up-russell-idUSKBN1DZ015>
- Reuters. January 17, 2018. UPDATE 1-Indonesia completes contract amendments with coal miners. Accessed through: <https://www.reuters.com/article/indonesia-coal/update-1-indonesia-completes-contract-amendments-with-coal-miners-idUSL3N1PC3GG>
- Reuters. February 3, 2018. Fed's Williams sees three or four rate hikes this year. <https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-williams/feds-williams-sees-three-or-four-rate-hikes-this-year-idUSKBN1FM2LV>
- Reuters. February 8, 2018. Coal buyers spooked by Indonesia's new shipping rules: Assoc. Jakarta. Reuters. Accessed through <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-shipping-cabotage/coal-buyers-spooked-by-indonesias-new-shipping-rules-assoc-idUSKBN1FS192>
- Russell, B. 2010. "Revenue Administration: Developing a Taxpayer Compliance Program." *The International Monetary Fund*, Technical Notes and Manuals 10/17
- Smithers, R. 2016. "England's plastic bag usage drops 85persen since 5p charge introduced". *The Guardian* (July 30, 2016).

- Sugana, R. and A. Hidayat. 2014. "Analysis of 2013 VAT Revenue Potential and Gaps in Indonesia". Journal of Indonesian Economic Development (JEPI). Jakarta: University of Indonesia.
- Tempo. January 21, 2018. Surplus Dulu Minus Kemudian. Jakarta. Tempo Magazine. Accessed (premium content) through: <https://majalah.tempo.co/konten/2018/01/21/LU/154798/Surplus-Dulu-Minus-Kemudian/48/46>
- The Jakarta Post. June 15, 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/15/government-launches-15th-economic-policy-package.html>
- The Jakarta Post. January 22, 2018. <http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/22/indonesia-can-only-import-346000-tons-of-rice.html>
- The Jakarta Post. February 11, 2018. <http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/11/pertamina-pgn-to-connect-78367-households-through-city-gas-network-in-2018.html>
- Tiwari, S., F.A. Darko, I. Setiawan and J. Jellema. 2018. "Revisiting the Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia." Forthcoming.
- World Bank. 2006. "Equity and Development". World Development Report. <http://documents.worldbank.org/curated/en/435331468127174418/World-development-report-2006-equity-and-development>
- _____. 2015a. "Technical Note: Estimating Infrastructure Investment and Capital Stock in Indonesia". Jakarta: World Bank, June 2015.
- _____. 2015b. *Indonesia Economic Quarterly: In Times of Global Volatility*. October. Jakarta: World Bank.
- _____. 2016a. "Indonesia's Rising Divide". Jakarta: World Bank. <http://pubdocs.worldbank.org/en/16261460705088179/Indonesias-Rising-Divide-English.pdf>
- _____. 2016b. "Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Right, and Better". Jakarta: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25363/110298-REVISED.pdf>
- _____. 2017a. *Indonesia Economic Quarterly: Upgraded*. June. Jakarta: World Bank.
- _____. 2017b. *Indonesia Economic Quarterly: Closing the gap*. October. Jakarta: World Bank.
- _____. 2017c. "Program Document for the Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan". October 3, 2017.
- _____. 2017d. World Bank Commodity Market Outlook. October. <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.
- _____. 2017e. *Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that delivers*. December. Jakarta: World Bank.
- _____. 2017f. "Towards a comprehensive, integrated, and effective social assistance system in Indonesia". Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/535721509957076661/Towards-a-comprehensive-integrated-and-effective-social-assistance-system-in-Indonesia>
- _____. 2018a. *Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century*. World Bank East Asia and Pacific Regional Report. Washington, DC: World Bank.
- _____. 2018b. Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn: Will It Last? January. Washington, DC: World Bank
- _____. 2018c (forthcoming). "Indonesia Tobacco Employment Study". Jakarta: World Bank.
- _____. 2018d. "Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific". <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29365>
- Zero Waste Scotland. 2015. "Carrier Bag Charge 'One Year On'". October 2015

LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

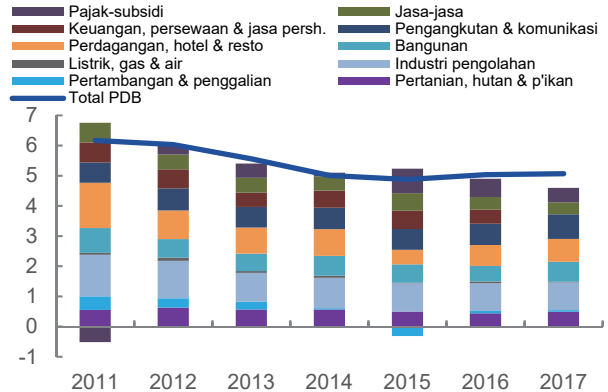
Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil
(pertumbuhan triwulanan yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB sector produksi

(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB harga konstan yoy, poin persentase)

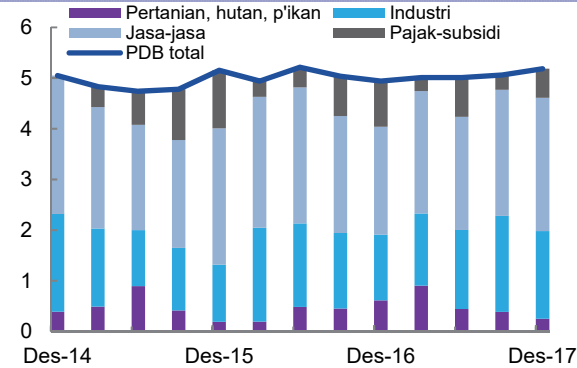


Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * termasuk perubahan stok

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB sector produksi

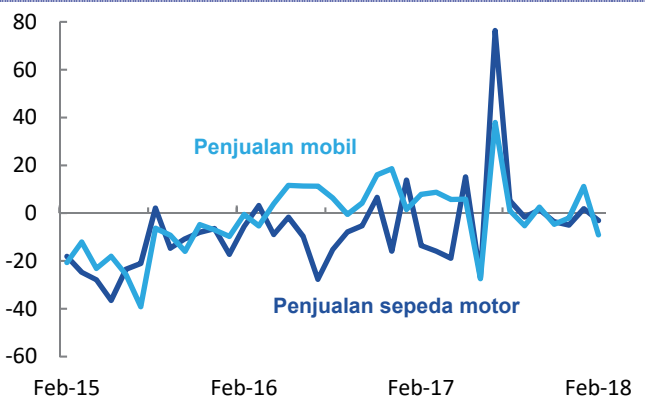
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor

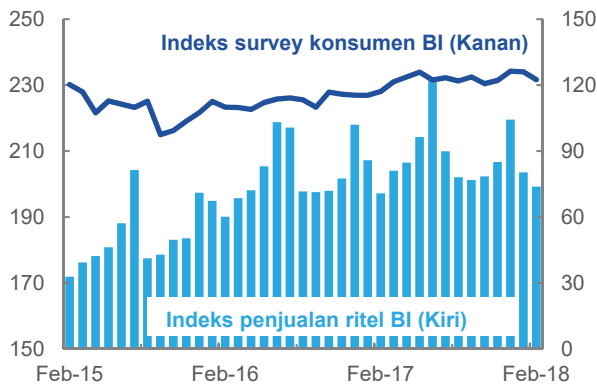
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen

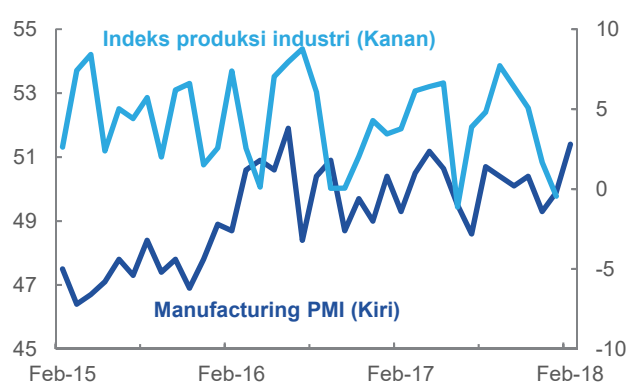
(tahun dasar penjualan eceran 2010=100)



Sumber: BI

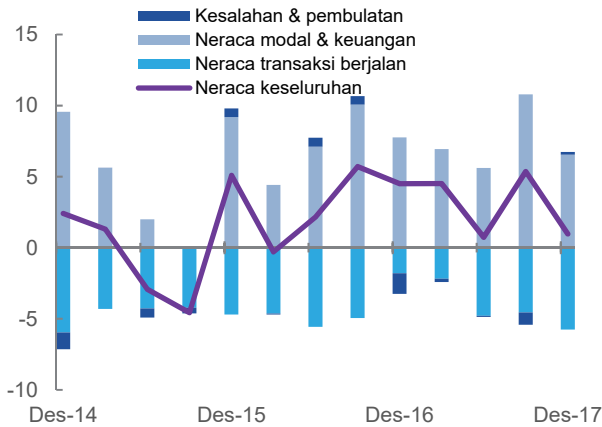
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI

(indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen)



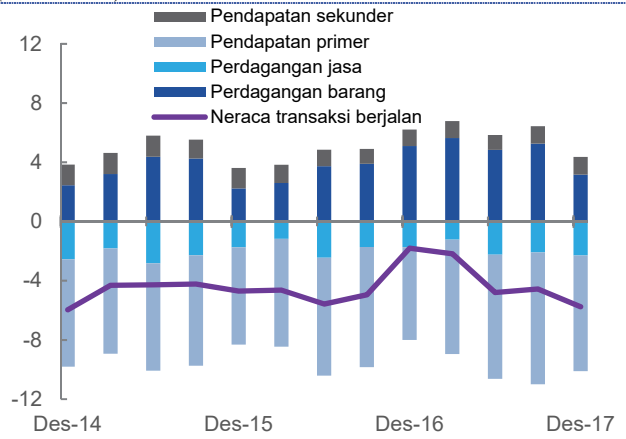
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran
(USD miliar)



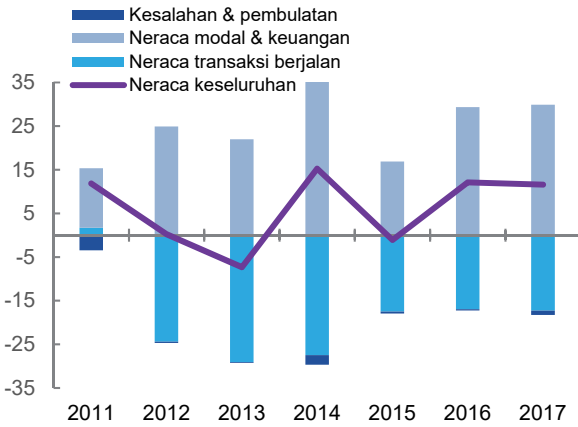
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan
(USD miliar)



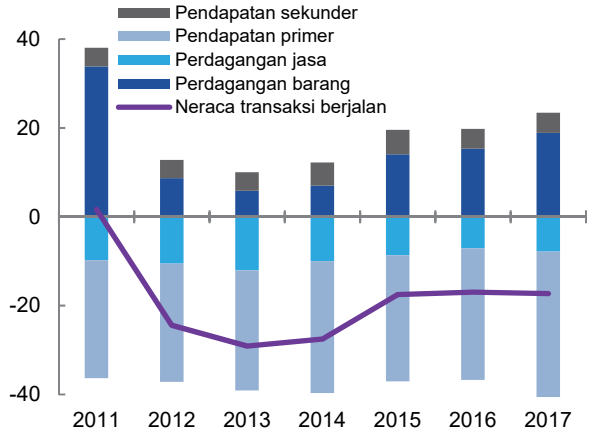
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Neraca pembayaran
(USD miliar)



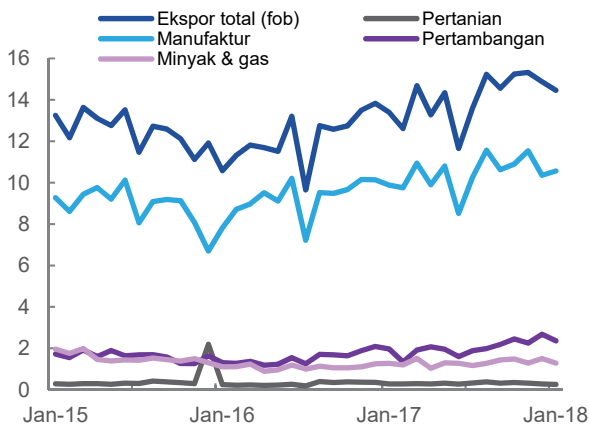
Sumber: BI

Lampiran Gambar 10: Komponen neraca berjalan
(USD miliar)



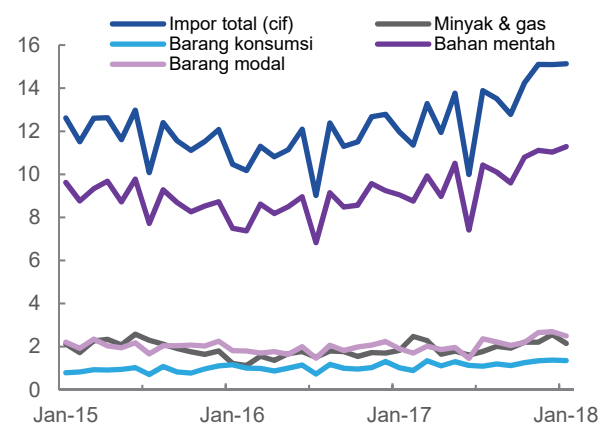
Sumber: BI

Lampiran Gambar 11: Ekspor barang
(USD miliar)



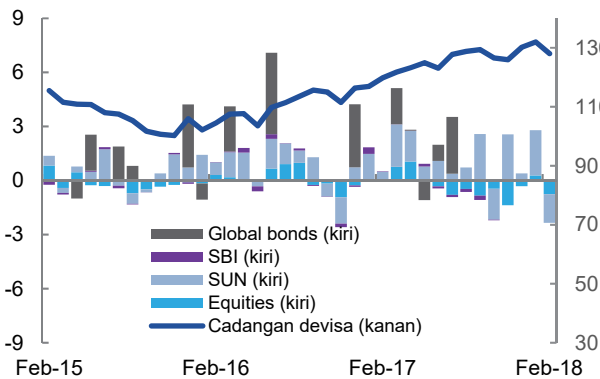
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 12: Impor barang
(USD miliar)



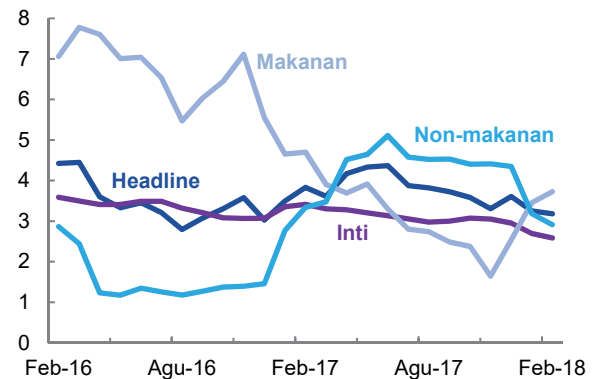
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 13: Cadangan devisa dan arus modal
(milyar USD)



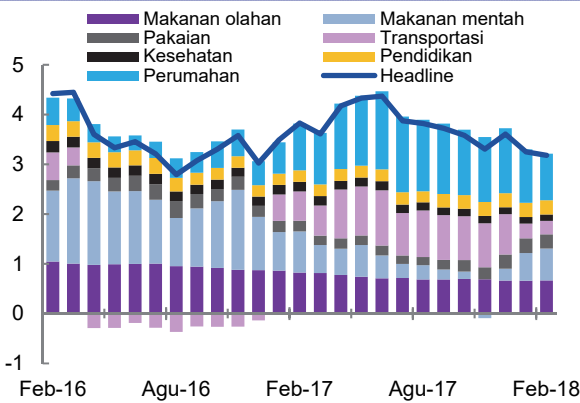
Sumber: BI; Kementerian Keuangan
Catatan: SUN = Surat Utang Negara; SBI = Surat Berharga BI

Lampiran Gambar 14: Inflasi
(pertumbuhan yoy, persen)



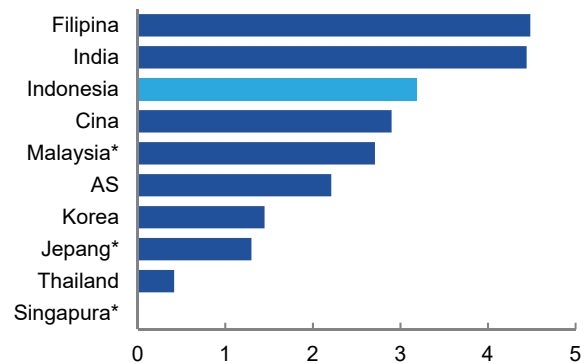
Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 15: Rincian IHK bulanan
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



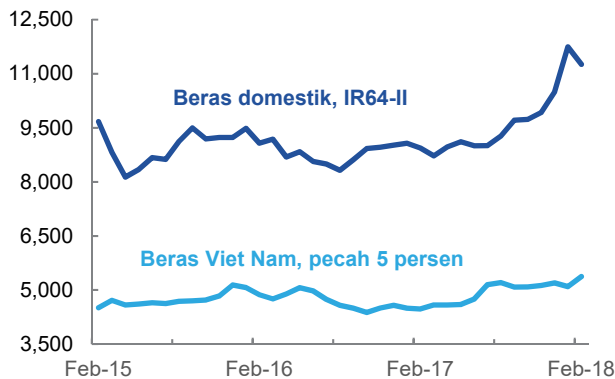
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 16: Perbandingan inflasi beberapa negara
(pertumbuhan yoy, persen)



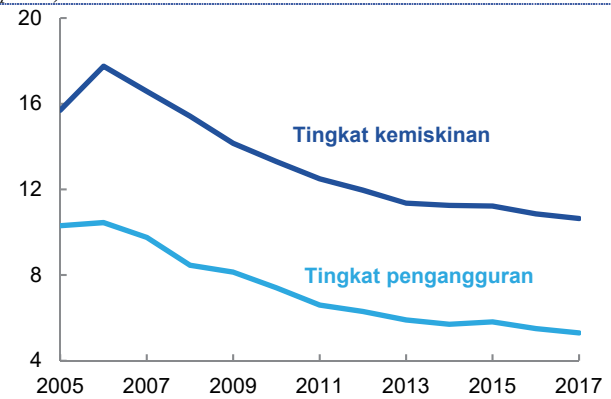
Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: data Februari 2018; *data Januari 2018.

Lampiran Gambar 17: Harga beras domestik dan internasional
(harga grosir, IDR per kg)



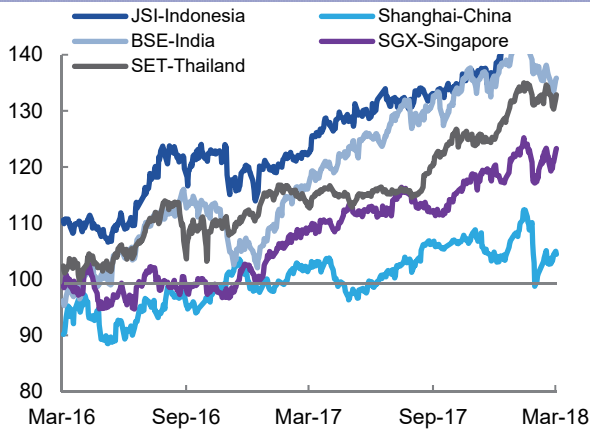
Sumber: Pusat perkulakan beras Cipinang; FAO
Catatan: "pecah 5%" mengacu pada kualitas penggilingan beras. 5% merupakan proporsi biji pecah selama proses penggilingan.

Lampiran Gambar 18: Tingkat kemiskinan dan pengangguran
(persen)



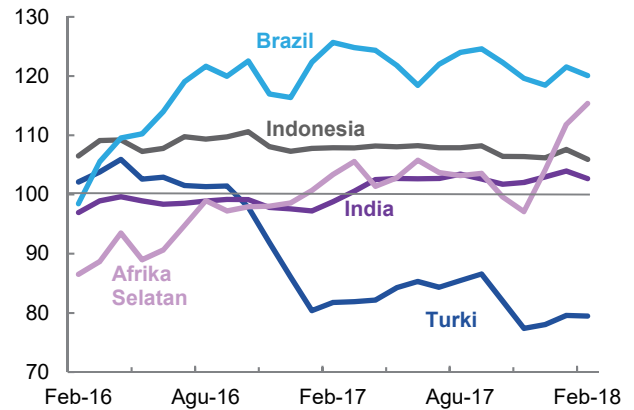
Sumber: BPS
Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 19: Indeks saham regional
(indeks barian, September 1, 2015=100)



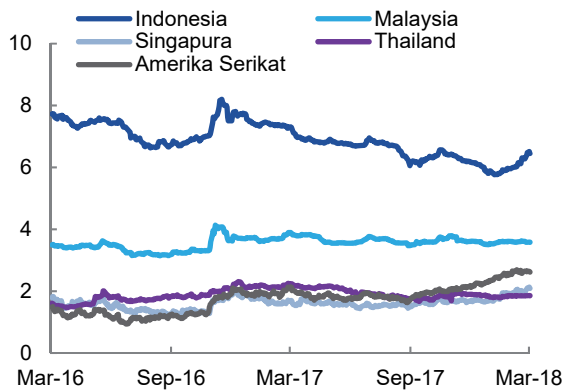
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 20: Nilai tukar dollar AS
(indeks bulanan, Agustus 2015=100)



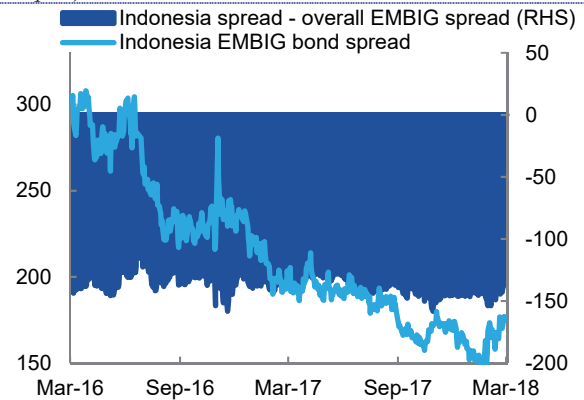
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal
(persen)



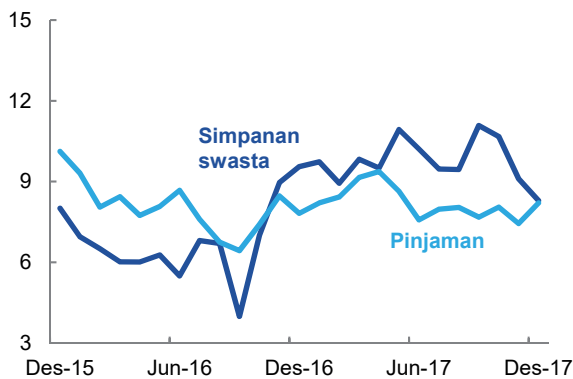
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 22: Selisih imbal obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global
(basis poin)



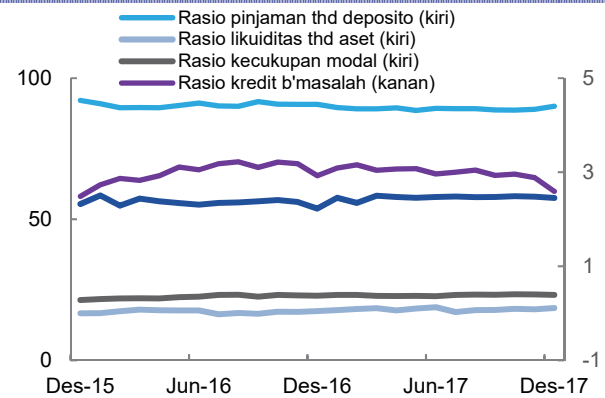
Sumber: JP Morgan

Lampiran Gambar 23: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan (*rural*) dan simpanan
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

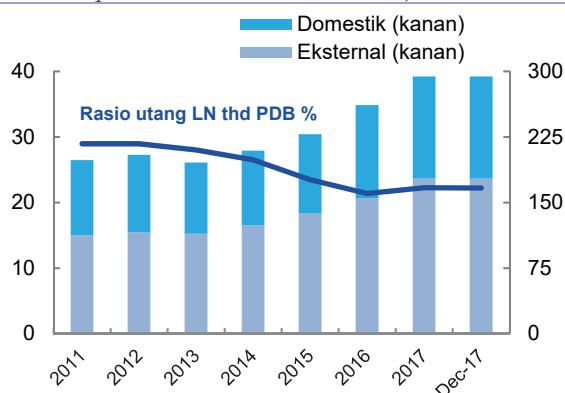
Lampiran Gambar 24: Indikator sektor perbankan
(bulanan, persen)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

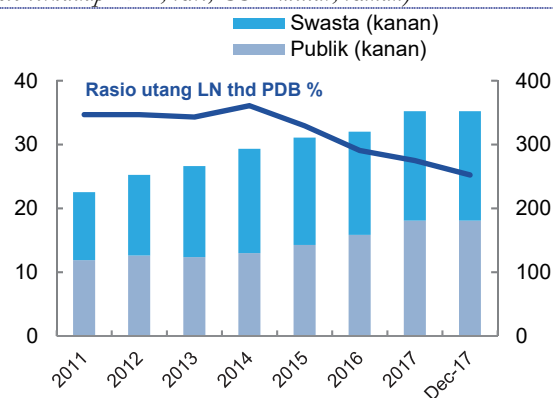
Lampiran Gambar 25: Utang pemerintah

(rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Lampiran Gambar 26: Utang luar negeri

(rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah

(IDR triliun)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN
A. Penerimaan dan hibah	1,211	1,338	1,439	1,550	1,508	1,556	1,736
1. Penerimaan pajak	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,473
2. Penerimaan non-pajak	331	352	355	399	256	262	260
B. Pengeluaran	1,295	1,491	1,651	1,777	1,807	1,864	2,133
1. Pemerintah pusat	884	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,367
2. Transfer ke pemerintah daerah	411	481	513	574	623	710	766
C. Neraca utama	9	-53	-99	-93	-142	-126	-178
D. SURPLUS / DEFISIT	-84	-153	-212	-227	-298	-308	-397
(persen dari PDB)	-1.1	-1.9	-2.3	-2.2	-2.6	-2.5	-2.9

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan.

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(milyar USD)

	2014	2015	2016	2016			2017			
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neraca pembayaran	15.2	-1.1	12.1	2.2	5.7	4.5	4.5	0.7	5.4	1.0
<i>Persen dari PDB</i>	1.7	-0.1	1.3	0.9	2.3	1.9	1.9	0.3	2.0	0.4
Neraca berjalan	-27.5	-17.5	-17.0	-5.6	-5.0	-1.8	-2.2	-4.8	-4.6	-5.8
<i>Persen dari PDB</i>	-3.1	-2.0	-1.8	-2.4	-2.0	-0.7	-0.9	-1.9	-1.7	-2.2
Neraca perdagangan	-3.0	5.4	8.2	1.3	2.2	3.4	4.4	2.6	3.2	0.9
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-24.5	-22.9	-25.2	-6.9	-7.1	-5.2	-6.6	-7.4	-7.7	-6.6
Neraca modal dan keuangan	44.9	16.9	29.3	7.1	10.1	7.8	6.9	5.6	10.8	6.5
<i>Persen dari PDB</i>	5.0	2.0	3.1	3.1	4.1	3.2	2.9	2.2	4.1	2.5
Investasi langsung	14.7	10.7	16.1	3.2	6.6	3.5	2.9	4.6	8.1	4.6
Investasi portfolio	26.1	16.2	19.0	8.3	6.6	-0.3	6.6	8.1	4.1	1.9
Investasi lain	4.3	-10.1	-5.8	-4.4	-3.1	4.4	-2.5	-7.1	-1.4	0.1
Kesalahan & pembulatan	-2.2	-0.4	-0.3	0.6	0.6	-1.5	-0.2	-0.1	-0.9	0.2
Cadangan devisa*	111.9	105.9	116.4	109.8	115.7	116.4	121.8	123.1	129.4	130.2

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Cadangan pada akhir periode.

Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neraca nasional (% perubahan)¹									
PDB riil	4.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1
Investasi riil	11.4	8.5	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5	6.2
Konsumsi riil	4.6	4.1	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3	4.6
Swasta	3.7	4.8	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0	5.0
Pemerintah	14.2	0.3	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1	2.1
Ekspor riil, barang dan jasa	30.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.6	9.1
Impor riil, barang dan jasa	26.6	17.3	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.2	-2.4	8.1
Investasi (% PDB)	20	31	32	33	32.5	32.4	32.4	32.2	32.6
PDB nominal (USD miliar)	165	755	893	918	915	891	861	933	1,015
PDB per kapita (USD miliar)	857	3,167	3,688	3,741	3,668	3,532	3,370	3,603	3,878
Anggaran Pemerintah Pusat (% PDB)²									
Pendapatan dan hibah	20.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	12.5	..
Pendapatan non-pajak	9.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	2.1	..
Pendapatan pajak	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4	..
Pengeluaran	22.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	15.0	..
Konsumsi	4.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	4.6	..
Modal	2.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.4	..
Bunga pinjaman	5.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	..
Subsidi	6.3	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	1.4	..
Surplus/defisit	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5	..
Utang Pemerintah	97.9	24.5	23.1	23.0	24.9	24.7	27.4	28.3	..
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2	11.9	11.3	..
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	87.1	26.8	25.2	27.5	29.1	32.9	36.1	34.3	34.8
Neraca pembayaran (% PDB)³									
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3	1.1
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8	-1.7
Ekspor, barang dan jasa	42.8	22.0	23.9	23.0	22.4	22.3	19.9	18.0	19.1
Impor, barang dan jasa	33.9	19.2	21.2	23.2	23.1	22.7	19.3	17.1	18.0
Transaksi berjalan	8.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	0.9	1.1
Neraca transaksi keuangan	..	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.1	2.9
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.7	2.0
Cadangan devisa bruto (USD miliar)	29.4	96	110	113	99	112	106	116	130
Moneter (% perubahan)³									
Deflator PDB ¹	20.4	8.3	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.5	4.3
Suku bunga Bank Indonesia (%)	6.3	4.8	4.3
Kredit domestik (akhir periode)	..	23.3	24.7	23.1	21.4	11.6	10.1	7.8	8.2
Nilai tukar nominal (rerata, IDR/USD)	8,392	9,087	8,776	9,384	10,460	11,879	13,392	13,307	13,384
Harga (% perubahan)¹									
Indeks Harga Konsumen (akhir periode)	9.4	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0	3.6
Indeks Harga Konsumen (rerata)	3.7	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5	3.8
Harga minyak mentah Indonesia (USD per barel, akhir periode) ⁴	28	79	112	113	107	60	36	51	61

Sumber: ¹ BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. ² Kementerian Keuangan dan Perhitungan staf Bank Dunia, ³ BI, ⁴ CEIC

Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kependudukan¹									
Penduduk (juta orang)	213	243	246	249	252	255	258	261	..
Pertumbuhan penduduk (%)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	..
Penduduk perkotaan (% dari total)	42	50	51	51	52	53	53.7	54	..
Rasio ketergantungan (% dari penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	50	49.2	49	..
Ketenagakerjaan²									
Angkatan kerja, total (juta orang)	98	117	117	120	120	122	122	125	128
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77	79
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48	49
Proporsi pekerja di sektor agrikultur (%)	45	38	36	35	35	34	33	32	30
Proporsi pekerja di sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21	22
Proporsi pekerja di sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47	48
Pengangguran, total (% dari jumlah angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6	5.5
Kemiskinan dan distribusi pendapatan³									
Median konsumsi rumah tangga (000 IDR per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697	765
Garis kemiskinan nasional (000 IDR per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354	375
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional (million)	38	31	30	29	28	28	29	28	28
Tingkat kemiskinan (% populasi di bawah garis kemiskinan nasional)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9	10.6
Urban (% dari populasi di bawah garis kemiskinan urban)	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8	7.7
Rural (% dari populasi di bawah garis kemiskinan rural)	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1	13.9
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0	8.7
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8	9.3
Indeks Gini	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	..
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1	7.0
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2	45.7
Belanja pemerintah untuk jaminan dan kesejahteraan sosial (% PDB) ⁴	..	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	..
Kesehatan dan Gizi¹									
Tenaga kesehatan (per 1,000 orang)	0.16	0.14	..	0.20
Angka kematian balita (per 1.000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	33	32	31	29	28	27	26	..
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	15	15	14	14	..
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	41	28	27	26	25	24	23	22	..
Angka kematian ibu (estimasi model, per 100.000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126
Imunisasi campak (% dari anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% dari PDB)	2.0	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% dari PDB)	0.7	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1
Pendidikan³									
Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	92	92	93	92	93	97	97	97
Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	61	60	60	61	65	66	66	79
Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%), APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	16	14	15	16	18	20	21	19
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95	96
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari PDB) ⁵	..	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3	3.0
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari APBN) ⁵	..	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	20.6	20.0	20.0
Air bersih dan kesehatan lingkungan¹									
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% dari total penduduk)	78	85	85	86	86	87	87
Urban (% dari penduduk urban)	91	93	93	94	94	94	94
Rural (% dari penduduk rural)	68	76	77	77	78	79	80
Penduduk dengan akses fasilitas sanitasi (% dari total penduduk)	44	57	58	59	60	61	61
Urban (% dari penduduk urban)	64	70	71	71	72	72	72
Rural (% dari penduduk rural)	30	44	45	46	47	48	48
Lainnya¹									
Skor perbaikan pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=paling baik)	3.3
Proporsi perempuan di kursi parlemen (%) ⁶	8	18	18	19	19	17	17	17	20

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) dan World Bank; ⁴ Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya termasuk pendistribusian Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk warga miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta realisasi; ⁵ Kementerian Keuangan; ⁶ Inter-Parliamentary Union



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

Supported by funding from the Australian Government
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
(SEMEFPA) program.